



Kenari

Majalah Penyuluhan Kehutanan

Komunikasi Edukasi Wana Lestari



**DAHSYATNYA SIMPING
MEMONITOR KINERJA
PENDAMPING**

**FORESTAMART.COM :
KENAPA TIDAK ?**

**SEKOLAH LAPANG, TERBUKTI
BERMANFAAT NYATA
BAGI MASYARAKAT**



ISSN : 0853 - 7524

EDISI 2018



DAFTAR ISI

- 04 Dasyatnya Simping Memonitor Kinerja Pendamping
- 06 Pengelolaan Hutan Rakyat oleh Kelompok Tani Hutan di Cabang Dinas Kehutanan
- 09 Gedong Gincu di Lahan Hutan
- 15 Pembangunan Hutan Desa Sebagai Salah Satu Pilar Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat dan Hutan Yang Lestari
- 19 “Cibiran yang Berbuah Kesuksesan”
- 22 Memampukan Masyarakat Desa Bukit Layang Mengurus Hutan Melalui Pola Hutan Taman Rakyat
- 25 Hutan Kemasyarakatan (HKM) Sikayan Balumuik Menyatukan “Mimpi” Anggota Menjadi “Fakta”
- 34 Alternatif Solusi Penggunaan Pupuk Kimia dan Pembakaran Limbah Pertanian Melalui Pengomposan Dengan Metode Aerated Static Pile di Tingkat Kelompok Tani
- 39 Mau Jadi Pengusaha Sukses? Yuuuuk Belajar di Wanawiyata Widyakarya!
- 44 Kiprah Kelompok Tani Hutan Klaceng Barokah KTH Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2018
- 49 Mengenal lebih Dekat Madu yang Bermutu
- 56 Zain Arafat “KTH Maju Adalah Kebanggaanku”
- 61 FORESTAMART.COM : Kenapa Tidak?
- 64 Berdaya Berkat Usaha KTH
- 70 Sekolah Lapang, Terbukti Bermanfaat Nyata Bagi Masyarakat
- 75 Peluang Investasi Budidaya Jamur Tiram
- 80 Pendampingan Berteman Kunci Sukses Perhutanan sosial
- 86 Mangrove Munjang Pengembangan Ekowisata di Bangka Tengah
- 90 Menuai Pengetahuan Melalui Workshop Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala, atas segala nikmat dan rahmat yang diberikan sehingga kita bisa menerbitkan Majalah Kenari Edisi Tahun 2018. Pembaca Majalah Kenari yang setia, Edisi Majalah Kenari saat ini hadir dengan tema "Monitoring Pendamping dan Kelompok Tani Hutan melalui Sistem Informasi Pendamping (SIMPING)".

Proses pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) baik dalam kerangka skema perhutanan sosial maupun non perhutanan sosial dapat berjalan efektif dan efisien jika didukung oleh SDM penyuluh kehutanan yang kompeten dan profesional. Selain itu, sinergitas dengan berbagai pihak (masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Pemda) penting dibangun untuk mewujudkan KTH yang kuat dan mandiri. Harapannya adalah masyarakat sejahtera dan kelestarian sumber daya alam terjaga.

Untuk mengetahui perkembangan pendampingan dari KTH, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan terkini secara berkelanjutan dari tingkat tapak. Guna monitoring dan evaluasi tersebut saat ini telah dibangun alat berupa Aplikasi Sistem Informasi Pendamping (SIMPING). Melalui Aplikasi SIMPING, dapat dilihat tingkat keberhasilan dan proses pendampingan yang mencakup kelola kelembagaan, kelola kawasan yang tertata serta kelola usaha. Selain itu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan data dan informasi yang berada di Aplikasi SIMPING, dapat diperoleh juga informasi tingkat keefektifan kinerja dari para pendamping di lapangan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung penerbitan Majalah Kenari Edisi Tahun 2018. Dengan izin Allah Subhanallahu Wata'ala, semoga sukses proses pendampingan untuk mewujudkan KTH yang mandiri dan kawasan hutan yang lestari.

Semoga bermanfaat. Salam Lestari!

Salam,
Dewan Redaksi

Tim Redaksi Kenari 2018

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penyuluhan

Ketua Redaktur

Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan

Anggota

- Kepala Sub Bidang Metode dan Materi Penyuluhan
- Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi
- Dr. Ir. Yumi Angelia, M.Si
- Cucu Setiawati, S.Hut

Penyunting/Editor

- Ir. Ryke Liliek S Siswari
- Firmansyah, S.Hut. M.Si
- Ernita M. Thersia, S.Hut
- Eli Sugianto, S.Hut

Sekretariat

- Sutarno
- Yamin
- Atu Badariah Fauziah, S.Hut

Design Grafis

- Jaya Suhendi
- Minggu S. Kalegom, S.Kom

Alamat Redaksi :

Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian LHK

Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lt.8, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270



DAHSYATNYA **SIMPING** Memonitor Kinerja Pendamping

Oleh : *Denni Rasyid, **Cucu Setiawati

*Kepala Sub Bidang Metode dan Materi Penyuluhan

** Staf Pusat Penyuluhan

Proses Pendampingan

Berawal dari proses pendampingan berupa aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus oleh para pendamping terhadap Kelompok Tani Hutan atau kelompok masyarakat perhutanan sosial yang sudah mendapatkan ijin akses kelola kawasan, maupun terhadap Kelompok Tani Hutan di lahan hak milik atau Hutan Rakyat, diharapkan tercipta output KTH mandiri dan sejahtera dari sisi kelembagaan yang kuat, kawasan yang tertata dan lestari serta usaha yang berkembang.

Apa itu SIMPING?

“SIMPING” disini bukan makanan khas dari daerah Jawa Barat tetapi singkatan dari Sistem Informasi Pendamping. Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sedang membuat dan mengembangkan “SIMPING”, yang merupakan suatu aplikasi yang berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja Pendamping dan perkembangan Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan pendamping dalam masa kurun waktu tertentu, dengan demikian data dan informasi KTH dari sisi kelola

kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha dapat diperoleh secara cepat dan tepat.

Permasalahan

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengukur KTH yang mandiri dan sejahtera sesuai yang diharapkan serta cara bagaimana melakukan monitoring dan evaluasinya..?. Untuk itu tentu diperlukan data dan informasi berupa nilai kuantitatif dan kualitatif pada sisi kelola kelembagaan yang kuat, pada sisi kelola kawasan yang tertata dan lestari, serta tidak lupa pada sisi kelola usaha, terutama pada nilai kuantitatif produksi dan pendapatan KTH. Disamping itu juga diperlukan alat untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap kinerja pendamping sekaligus terhadap kinerja KTH binaannya.

Solusi Permasalahan

Solusi bagi permasalahan tersebut serta untuk menjawab tantangan ke depan dari sisi alat monitoring dan evaluasi kinerja pendamping KTH dan KTH, maka aplikasi Sistem Informasi Pendamping (SIMPING) dianggap yang paling tepat. SIMPING memuat



informasi 3 unsur pilar kelola KTH, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha, yang bisa dilihat dan diambil secara cepat.

- **DAHSYATNYA** informasi yang diperoleh dari SIMPING mempunyai beberapa alasan yaitu sebagai berikut;
- **Validitas data;** data yg diambil dan diinput berasal dari tingkat tapak atau kelompok Tani Hutan (KTH) dianggap mendekati akurat.

Pendamping KTH; banyaknya para pendamping KTH yaitu Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), LSM, Bakti Rimbawan, Pendamping dari perguruan tinggi dan lain-lain yang tersebar di seluruh provinsi sangat menentukan ragamnya data dan informasi perkembangan KTH.

Sinergi

Aplikasi SIMPING disinergikan dengan aplikasi SINAV Perhutanan Sosial dalam rangka saling memberikan data dan informasi yg lengkap, tidak saling tumpang tindih atau double input terkait data dan informasi pendamping dan Kelompok Tani Hutan. Sebagai contoh; Aplikasi SIMPING menyediakan data produksi anggota dan kelompok, data pendamping kelompok PS/

KUPS, dan media informasi (seperti foto dan video) untuk Aplikasi SINAV (melalui aplikasi BUPSHA). Sedangkan Aplikasi BUPSHA menyediakan database izin perhutanan sosial dan data Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) serta Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk SIMPING.

Keunggulan

Aplikasi SIMPING mempunyai keunggulan pada data dan informasi yang lebih lengkap. Hal ini karena aplikasi tersebut didukung oleh dua aplikasi lain yaitu aplikasi BUPSHA (Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat) dari Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dan aplikasi SIMLUH dari Pusat Penyuluhan (PUSLUH) – Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Aplikasi (BUPSHA) mendukung dengan database kelompok Tani Hutan / Kelompok masyarakat yang sudah berijin di dalam kawasan, sedangkan SIMLUH mendukung dengan data base Kelompok Tani Hutan diluar kawasan.

Fungsi & manfaat

Aplikasi SIMPING berfungsi menghasilkan data dan informasi yang berbentuk data tabel dan info grafis dari 3 pilar kelola KTH sebagai berikut ;

- Kelola kelembagaan; berupa data anggota dan KTH, data penilaian kelas kelompok k yang dilakukan secara online.
- Kelola kawasan; sebaran peta lokasi anggota dan Kelompok Tani Hutan.
- Kelola usaha; data produksi dan data pendapatan usaha anggota maupun kelompok secara berkala.

Laporan dari data dan informasi dari alat monitoring dan evaluasi SIMPING bermanfaat untuk pengambilan kebijakan mengarah kepada perbaikan yang berkelanjutan dari suatu program yang terkait dengan pendampingan dan pemberdayaan Kelompok Tani Hutan.



SEKILAS TENTANG PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT OLEH KELOMPOK TANI HUTAN DI CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT

Oleh : Sarah Widyatami, S.Hut, MM

*Penyuluh Kehutanan Pertama di Provinsi Jawa Barat

Dewasa ini, kebutuhan pasokan kayu dari hutan alam sudah tidak dapat terpenuhi secara maksimal karena kerusakan hutan alam akibat perambahan, illegal logging maupun kebakaran hutan. Oleh karena itu, peran hutan rakyat menjadi sangat strategis untuk mencukupi kebutuhan pasokan kayu yang sudah tidak dapat diperoleh dari hutan alam. Hutan rakyat tentunya tidak terlepas dari petani hutan rakyat yang menanam dan mengelolanya. Petani hutan rakyat ini dalam bidang kehutanan lebih dikenal dengan nama Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH merupakan kumpulan masyarakat tani yang bergabung dengan tujuan untuk menciptakan hutan lestari yang secara global dapat menggantikan peran hutan alam melalui hutan rakyat yang ditanam dan dikelolanya. Di Kabupaten Bogor khususnya ada 150 KTH yang tersebar di 40 Kecamatan yang merupakan wilayah binaan penyuluh di bawah payung Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang mensupervisi Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I.

Keterbatasan pasokan kayu dari hutan alam untuk pasokan industri menyebabkan kayu dari hutan rakyat menjadi sangat diminati oleh industri pengolahan kayu. Pengembangan hutan rakyat saat ini telah banyak dilakukan oleh petani dan KTH. Seperti telah banyak

diketahui bahwa pemanenan kayu Hutan Rakyat pada umumnya dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dikenal dengan “tebang butuh”. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan baik untuk memasok industri maupun kebutuhannya, maka yang harus dipikirkan bersama saat ini adalah bagaimana agar kayu dari hutan rakyat ini tidak serta merta habis. Oleh karena itu, pengelolaan hutan rakyat mulai dari persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan/penebangan dan pemasaran menjadi penting untuk diperhatikan. Jadi, daur hidup kayu harus tetap dipertahankan mulai dari persemaian atau pembibitan, penyapihan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan hingga pemanenan. Jika hal ini dapat diterapkan oleh seluruh petani ataupun KTH maka sustainability lingkungan dapat tercapai. Sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 berdasarkan statusnya hutan rakyat termasuk hutan hak yaitu hutan yang terdapat di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Lebih lanjut pengertian dan kriteria hutan rakyat diperjelas melalui Permenhut No.03 tahun 2004, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%.



Kenampakan tutupan Hutan Rakyat di CDK Wilayah I

Hutan rakyat di KTH Kabupaten Bogor pada dasarnya dikelola dengan sistem agroforestry, sehingga strukturnya sudah menunjukkan adanya heteroginitas. Jenis-jenis tanaman berupa tanaman kayu-kayuan seperti sengon, afrika, gmelina, khaya, suren, maliya, jabon serta jenis tanaman MPTS seperti manggis, durian, duku, rambutan, melinjo, petai, jengkol, jambu kristal, cempedak, nangka, dan sebagainya. Untuk mencapai kelestarian hutan rakyat, KTH juga difasilitasi dengan kegiatan persemaian, Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR), dan agroforestry oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, sehingga tetap ada penanaman setelah kegiatan pemanenan dan pemasaran, secara kontinyu. Kegiatan ini diutamakan pada KTH-KTH atau koperasi hutan rakyat yang produksinya besar sehingga sangat memerlukan rotasi kegiatan pemanenan ke penanaman/persemaian dalam satu siklus/daur.

Hutan rakyat yang lestari tentunya tidak terlepas dari kelembagaan KTH yang kuat. Wijaya et. al. (2016) mendefinisikan kelembagaan sebagai tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku dan menjadi nilai bersama untuk melayani tujuan kolektif. Menurut North (1990), kelembagaan mengandung pengertian penting yaitu: (1) sebagai aturan main (rule of the games), berupa aturan baik formal maupun informal, yang tertulis dan tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia, (2) sebagai suatu

organisasi (players of the games) yang memiliki hierarki, terdapat stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya termasuk hutan. Kelembagaan merupakan wadah suatu organisasi yang dalam hal ini adalah KTH untuk dapat mengelola dengan baik hutan rakyat yang digarap sehingga dapat terwujud hutan rakyat yang lestari dan berkesinambungan.

Terkait kelembagaan ini, dinas terkait dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusluh) telah memfasilitasi KTH se-Jawa Barat dan se-Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor dengan kegiatan peningkatan kelas kelompok, dimana poin-poinnya adalah penguatan kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. Kelola kelembagaan melalui kegiatan pertemuan kelompok yang membahas tentang pemantapan kepengurusan KTH, menyusun uraian tugas/pembagian pengurus, membuat AD/ART KTH, menyusun visi dan misi KTH, menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang, menyepakati agenda pertemuan rutin, peningkatan kemampuan money, membuat laporan kegiatan KTH, pengadaan perlengkapan dan sarpras ruang sekretariat KTH, pengadaan buku administrasi kelompok serta pembelian ATK dan perlengkapan administrasi KTH, pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus dan anggota KTH yang terdiri dari materi manajemen kelompok, membangun kebersamaan, dan kepemimpinan. Kelola Kawasan melalui kegiatan (1) pertemuan kelompok untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kelola kawasan, melakukan pemetaan wilayah kelola KTH secara partisipatif, pembuatan peta/skets wilayah kelola, pembuatan peta/skets pemanfaatan wilayah kelola KTH, (2) Praktek pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan kearifan lokal. Kelola Usaha melalui kegiatan pertemuan kelompok yang membahas pelatihan pembuatan proposal untuk merintis kemitraan untuk pengembangan usaha, fasilitasi penjanggan kerjasama informasi/teknologi ke pusat sumber benih dan persemaian RSSNC – KOICA Rumpin, fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan konservasi, yaitu pembibitan tanaman albasia, Fasilitasi penambahan volume dan jenis usaha KTH (Pengembangan Lebah Madu). Output dari kegiatan fasilitasi peningkatan kelas

KTH ini adalah KTH mampu melaksanakan dengan baik kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha sehingga anggota dan pengurus kelompok dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari sisi rantai pemasaran produksi hasil hutan kayu, MPTS, dan hasil hutan bukan kayu seperti jamur, madu, dan bambu, KTH telah bermitra dengan pedagang besar, pengggajian maupun eksportir. Beberapa KTH malah sudah memiliki pengggajian kayu (sawmill) sendiri untuk memutus mata rantai pemasaran ke tengkulak. Sawmill ini merupakan bantuan dari dinas setempat kepada 7 KTH yang tergabung dalam suatu kelembagaan berupa koperasi hutan rakyat. Koperasi-koperasi hutan rakyat ini telah menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) agar hasil produksi kayu dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi bahkan bisa diekspor. Selain itu, pemasaran hasil produksi juga dilakukan ke perorangan, pasar, maupun pelanggan tetap dengan sistem jual di tempat ataupun langsung ke pasar sasaran.

Setelah KTH difasilitasi dengan kegiatan kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha, diharapkan organisasi KTH dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelaku utama sekaligus pelaku usaha yang berdayaguna dan berperan aktif dalam upaya menciptakan sustainability hutan rakyat (HR). HR terutama di wilayah hulu yang lestari akan memberikan kehidupan bagi masyarakat di wilayah hilir berupa air bersih dan oksigen yang dapat dipergunakan untuk mengairi sawah, memenuhi kebutuhan air dan udara rumah tangga serta industri juga merupakan tempat bernaung dan hidup satwa-satwa liar maupun yang dilindungi. Hutan merupakan paru-paru dunia yang harus selalu dijaga kelestariannya demi kehidupan seluruh masyarakat di wilayah hulu dan hilir, tidak terkecuali hutan rakyat yang sangat dekat dengan masyarakat, terutama KTH.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat membuka mata petani dan KTH untuk dapat melihat lebih jauh ke depan tentang dampak



Kegiatan Kelola Kelembagaan, Kawasan, dan Usaha

yang akan ditimbulkan jika budidaya hutan rakyat tidak dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembibitan atau persemaian hingga pemanenan, sehingga diharapkan dengan siklus tanaman kayu hutan rakyat yang sempurna atau sesuai dapat memasok kayu pada industri pengolahan kayu lebih maksimal agar rantai budidaya kayu dan pemasarannya tidak terputus. Terlebih lagi dengan sudah diterapkannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) akan lebih membuka jalan dan memudahkan petani maupun KTH untuk mengekspor kayu produksi hutan rakyatnya ke pasar internasional, bukan hanya lokal.



GEDONG GINCU DI LAHAN HUTAN

Pengalaman Pendampingan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) di LMDH Rimba Raya Lestari Majalengka

Oleh : Budi Budiman

*Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi

Pengakuan dan perlindungan Kemitraan Kehutanan atau yang biasa disingkat Kulin KK sejatinya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap kemitraan kehutanan. Pengakuan dan perlindungan terhadap kemitraan kehutanan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Menteri LHK No. P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial yang menyiratkan bahwa Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan persetujuan kemitraan kehutanan yang diajukan oleh Pengelola atau Pemegang Izin melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat.

Pengelola hutan yang menjalin kemitraan kehutanan meliputi kesatuan pengelolaan hutan (KPH), Balai Besar/ Balai Taman Nasional, Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kawasan Hutan Dengan Tujuan

Khusus (KHDTK), unit pelaksana teknis daerah taman hutan raya (UPT Tahura), dan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) pengelola hutan negara. Sampai dengan Maret 2018, pemerintah telah menerbitkan 29 surat keputusan (SK) Kulin KK yang tersebar di 3 provinsi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat 9 SK, Jawa Tengah 10 SK dan Jawa Timur 10 SK, skema Kulin KK tersebut seluas 9.478,68 ha, dengan jumlah penggarap 5.745 kepala keluarga.

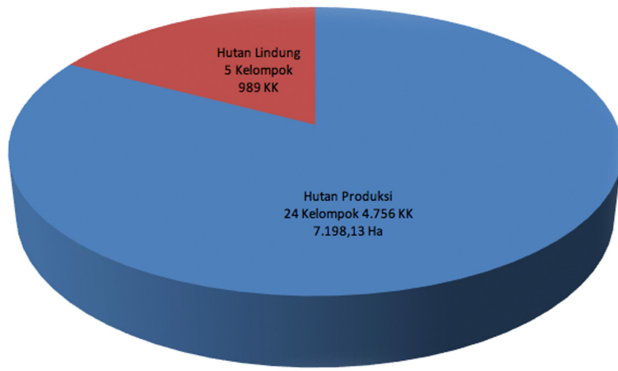
Berdasarkan fungsi hutan, skema Kulin KK tersebut sebanyak 5 kelompok berada di hutan lindung (HL) seluas 2.280,55 ha yang melingkupi 989 kepala keluarga. Sebanyak 24 kelompok berada di hutan produksi (HP), seluas 7.198,13 ha yang melingkupi 4.756 kepala keluarga.

No	Provinsi	Jumlah kelompok penerima SK Kulin KK	Jumlah Penggarap (KK)	Luas (Ha)
1	Jawa Barat	9	1.292	2.842,12
2	Jawa Tengah	10	1.054	1.084,07
3	Jawa Timur	10	3.399	5.552,49
	Jumlah	29	5.745	9.478,68

Tabel Rincian sebaran Kulin KK di Pulau Jawa

Sumber: Ditjen PSKL, 2018

Perbandingan Kulin KK di hutan lindung dan hutan produksi di Pulau Jawa



**Hutan Produksi 24 Kelompok
4.756 KK
7.198,13 Ha**

**Hutan Lindung 5 Kelompok
989 KK**

LMDH Rimba Raya Lestari dan Gedong Gincu

Salah satu penerima SK Kulin KK adalah LMDH Rimba Raya Lestari yang berlokasi di Desa Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. LMDH ini berdiri tahun 2007 sesuai akta notaris No.49 tanggal 29 Desember 2007. Dibentuknya LMDH ini bertujuan sebagai wadah bagi para petani hutan yang menggantungkan hidupnya pada areal hutan milik Perum Perhutani KPH Majalengka. Anggota LMDH Rimba Raya Lestari seluruhnya berjumlah 418 orang yang diketuai oleh Omo Sarma.

LMDH Rimba Raya Lestari termasuk salah satu kelompok yang diajukan untuk memperoleh SK perhutanan sosial melalui skema kemitraan kehutanan dengan Perum Perhutani KPH Majalengka. Dengan pendampingan dari tenaga pendamping masyarakat (TPM) Perum Perhutani, LMDH Rimba Raya Lestari akhirnya memperoleh SK Kulin KK dengan no SK.5677/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017. Kelompok ini memperoleh hak untuk mengelola salah satu areal hutan lindung yang terdapat di petak 2, 3 dan 4, RPH Pancurendang, BKPH Majalengka, KPH Majalengka.



Omo Sarma, Ketua LMDH Rimba Raya Lestari Majalengka

LMDH Rimba Raya Lestari mengelola areal seluas 106 hektar dari hutan pangkuan desa (HPD) seluas 370,90 Ha, untuk dimanfaatkan oleh 295 anggota LMDH agar menjadi areal tersebut lebih produktif. Usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok tersebut adalah penanaman mangga gedong gincu dengan pola agroforestry, jasa lingkungan, penanaman tanaman multi guna, pengembangan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan melalui penanaman tanaman palawija.



Pohon mangga gedong gincu di lokasi Kulin KK

Komoditi unggulan LMDH ini adalah mangga gedong gincu yang ditanam berdampingan dengan hutan pinus. Pemilihan jenis komoditi unggulan ini cukup beralasan karena Kabupaten Majalengka sudah terkenal sebagai penghasil mangga gedong gincu yang berkualitas. Dengan menanam mangga gedong gincu anggota LMDH berharap dapat memperoleh pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Jumlah pohon mangga gedong gincu yang ditanam oleh anggota LMDH sebanyak 1.109 pohon. Dengan estimasi produksi mangga 15 kg/pohon, maka diprediksi produksi mangga dari areal tersebut mencapai 16,635 ton/tahun. Jika sedang bagus, 1 kg mangga gedong gincu dihargai sekitar Rp.12.000,- sehingga dalam setahun bisa diperoleh pendapatan sekitar Rp.199.620.000,-. Setelah bagi hasil dengan Perum Perhutani, maka LMDH akan memperoleh penghasilan sebesar Rp.149.715.000,-.

Selain mengembangkan mangga gedong gincu sebagai komoditi unggulan, saat ini LMDH Rimba Raya Lestari juga sedang mengembangkan usaha wisata alam yang diberi nama "Gunung Karang Seribu Goa". Usaha wisata alam yang menonjolkan panorama alam, cocok untuk pengunjung yang suka swafoto. Pada lokasi wisata tersebut, terdapat juga gua alam di bawah bebatuan yang cukup besar. Konon katanya, di gua alam itulah Emen Slamet, Pahlawan asal Majalengka mengatur strategi kala bertempur melawan penjajah Jepang serta Belanda.

Pada tanggal 21 Desember 2017, di lokasi wisata alam tersebut dilaksanakan gelaran "Hajat Budaya Karuhun Sunda", dengan memunculkan kembali budaya karuhun sunda yang hampir punah. Hadir dalam gelaran budaya tersebut mencapai kurang lebih 1.200 orang. Hal ini tentunya merangsang tumbuhnya geliat ekonomi masyarakat sekitar.



Gelaran budaya karuhun sunda di wisata alam Gunung Karang Seribu Goa

(Dokumentasi: Ciputra Entrepreneurship Center)

Pengunjung lokasi wisata alam biasanya membeludak pada saat weekend. Tak kurang dari 200-250 orang pengunjung yang berkunjung setiap minggunya. Kondisi ini menambah penghasilan bagi kas LMDH. Selain dari komoditi gedong gincu, penghasilan dari usaha wisata mencapai rata-rata 4-5 juta rupiah setiap bulannya.



Lokasi wisata alam "Gunung Karang Seribu Gua"

Meskipun bagi hasil yang tertera dalam Naskah Kesepakatan kerjasama (NKK) adalah 50% untuk LMDH dan 50% untuk Perum Perhutani, namun dalam kenyataannya pembagian hasil LMDH dengan Perum Perhutani tidak demikian. Dari setiap tiket seharga Rp. 5.000,- hanya Rp. 1.000,- yang masuk ke kas LMDH sedangkan sisanya untuk Perum Perhutani. Hal ini memerlukan pembenahan oleh instansi terkait sehingga bagi hasil bisa sesuai dengan ketentuan yang tertera pada NKK.

Untuk mengembangkan usaha produktif, kelompok ini masih membutuhkan sarana dan prasarana pendukung usaha berupa gudang penyimpanan mangga gedong gincu ketika masa panen raya tiba. Jika gudang penyimpanan bisa terbangun, mangga gedong gincu hasil panen bisa disimpan terlebih dahulu sebelum dijual ke pasar sehingga kualitas mangga gedong gincu bisa dipertahankan.

Selain itu, untuk mendukung pengembangan wisata alam, kelompok ini memerlukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terkait manajemen wisata alam. Peningkatan kapasitas SDM kelompok bisa dilakukan dengan pelatihan, sekolah lapang maupun dengan magang di lokasi wisata alam yang telah maju.

Kiprah Ahdi Sang Pendamping

Adalah seorang Ahdi Rahdipermana, Sarjana Kehutanan kelahiran Majalengka 40 tahun silam. Sehari-hari Ahdi berprofesi sebagai tenaga pendamping masyarakat (TPM) Perum Perhutani KPH Majalengka. Wilayah kerja Ahdi meliputi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Majalengka dan BKPH Talaga. Sejak 2017 Ahdi ditugaskan untuk menjadi pendamping perhutanan sosial yang terdapat di wilayah kerjanya.

Yang menarik sejak 2013 Ahdi juga ditetapkan sebagai seorang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Majalengka, sehingga paripurnalah tugas pendampingan yang Ahdi lakukan. Diakui



Ahdi saat melakukan verifikasi lapangan

sebagai TPM oleh institusi Perum Perhutani, juga secara swadaya melaksanakan tugas penyuluhan kehutanan sesuai dengan tupoksi PKSM.

Sebagai pendamping, pertama-tama yang Ahdi lakukan adalah sosialisasi tentang Kulin KK kepada LMDH Rimba Raya Lestari. Lokasi dan LMDH yang sudah ditunjuk terlebih dahulu sebagai objek kemitraan kehutanan sedikit banyak memudahkan langkahnya untuk melakukan pendampingan. Ahdi tidak perlu melakukan identifikasi potensi kemitraan kehutanan. Disisi lain tugas Ahdi juga tidak terlalu berat karena LMDH sudah berdiri sejak 10 tahun lalu sehingga kelembagaan kelompoknya sudah kuat. Pendampingan penguatan kelembagaan kelompok tidak lagi diperlukan.

Bersama dengan pengurus LMDH, Ahdi menyusun profil kelompok sebagai bahan usulan kepada KPH Majalengka. Selanjutnya bersama dengan tim KPH Majalengka, Ahdi melakukan sosialisasi tahap kedua. Oleh Ahdi acara sosialisasi ini juga dijadikan ajang untuk mengumpulkan data penggarap yang dibuktikan oleh kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), sekaligus verifikasi apakah penggarap benar-benar berdomisili di



Penentuan koordinat lahan garapan (andil)

sekitar calon areal kemitraan kehutanan atau justru berada jauh dari calon areal kemitraan kehutanan. Ahdi juga melakukan identifikasi lahan garapan (andil) masing-masing penggarap. Keberadaan lokasi kepastian lahan garapan dan luasan lahan garapan harus dapat dipastikan pada kegiatan ini.

Selanjutnya Ahdi menjadi pendamping bagi tim yang melakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan ini bertujuan menentukan titik koordinat andil masing-masing penggarap. Penentuan titik koordinat andil masing-masing penggarap menjadi sangat penting karena dapat mengeliminir tumpang-tindih lahan garapan yang dapat memicu konflik rebutan andil masing-masing anggota LMDH. Mengingat jumlah andil anggota LMDH yang mencapai ratusan orang maka tim yang memeriksa lapangan dibagi menjadi 4 tim dengan masing-masing tim bekerja selama 3 hari penuh. Koordinat andil hasil pemeriksaan lapangan kemudian diverifikasi untuk menentukan apakah koordinat di peta sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jika terdapat kekeliruan maka dilakukan pembetulan dengan menentukan koordinat ulang.

Jika seluruh koordinat telah selesai maka tahap akhir dari proses pengajuan kemitraan kehutanan adalah penyusunan NKK. Dalam hal ini Ahdi kurang terlibat dalam menentukan butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam NKK. Draft naskah NKK sudah dibuat oleh KPH Majalengka dengan butir-

butir kesepakatan sebagaimana lazimnya kesepakatan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di wilayah kerja Perum Perhutani. Kesepakatan penting dalam NKK tersebut adalah prosentasi bagi hasil antara LMDH dengan Perum Perhutani sebesar 75% LMDH dan 25% Perum Perhutani untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan 50% LMDH dan 50% Perum Perhutani untuk pemanfaatan jasa lingkungan.

Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH Rimba Raya Lestari tertuang dalam NKK bernomor: 29/NKK/PS/MJL/DRJB/2017 dan Nomor: 01/RRL/IX/2017 dengan masa perjanjian selama 10 tahun mulai 27 Oktober 2017 sampai dengan 27 Oktober 2027. Selanjutnya NKK tersebut diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan.

Khusus untuk pemanfaatan jasa wisata alam "Gunung Karang Seribu Goa", pendampingan dilakukan jauh sebelum wisata alam tersebut terkenal. Pendampingan dilakukan oleh Yayasan Viarawangi Edelweiss, sebuah yayasan yang berpusat di kota Majalengka. Dasar pemikirannya sangat sederhana, Fani sang ketua Yayasan menginginkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan Gunung Karang bisa meningkat. Dimulailah identifikasi potensi apa yang bisa dikembangkan pada kawasan Gunung Karang tersebut sambil melakukan

pendekatan kepada masyarakat untuk mau diberdayakan untuk mengelola wisata alam. Fani mengibaratkan mengelola wisata alam itu seperti menguatkan akar sebuah pohon. Agar pengelolaan wisata alam berlangsung baik maka perlu pendekatan kepada masyarakat untuk menguatkan tekad mereka untuk mau berpartisipasi dalam mengembangkan wisata alam.

Untuk lebih mengenalkan Gunung Karang Seribu Goa ke pentas dunia dihelatlah beberapa acara. Tak kurang dari tiga acara besar sudah diselenggarakan di lokasi wisata alam tersebut. Yang pertama adalah “Gunung Karang Mendunia” pada 23-24 September 2017, kedua “Gunung Karang Music and Camp” pertengahan Oktober 2017 dan yang terakhir adalah “Hajat Budaya Karuhun Sunda”. Untuk menambah gaung acara tersebut dilakukan juga promosi melalui media sosial baik facebook, instagram maupun youtube.

Tugas Ahdi dan pendamping lainnya belumlah usai. Tidak berhenti sebatas terbitnya selebar SK Kulin KK. Tugas berat lainnya sudah menanti, bagaimana membina LMDH agar lebih produktif dan kesejahteraan anggotanya meningkat. Apalagi label PKSM melekat pada dirinya, pendampingan LMDH wajib dilaksanakan tentunya dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk berbagi peran dengan Penyuluh Kehutanan PNS yang bertugas di wilayah tersebut. Jika seluruh elemen bersatu bisa dipastikan tujuan mulia perhutanan sosial yakni mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan dapat tercapai. Pasti bisa.

**“Mengayuh perahu di Laut Flores,
Menangkap ikan dengan jarring
Perhutanan sosial akan sukses, Jika
penyuluh menjadi pendamping”**

-Endang DH-



PEMBANGUNAN HUTAN DESA SEBAGAI SALAH SATU PILAR TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN HUTAN YANG LESTARI

(Studi Kasus : Hutan Desa Muara Merang Sumatera Selatan)

Oleh : Firmansyah

*Penyuluh Ahli Muda, Pusat Penyuluhan

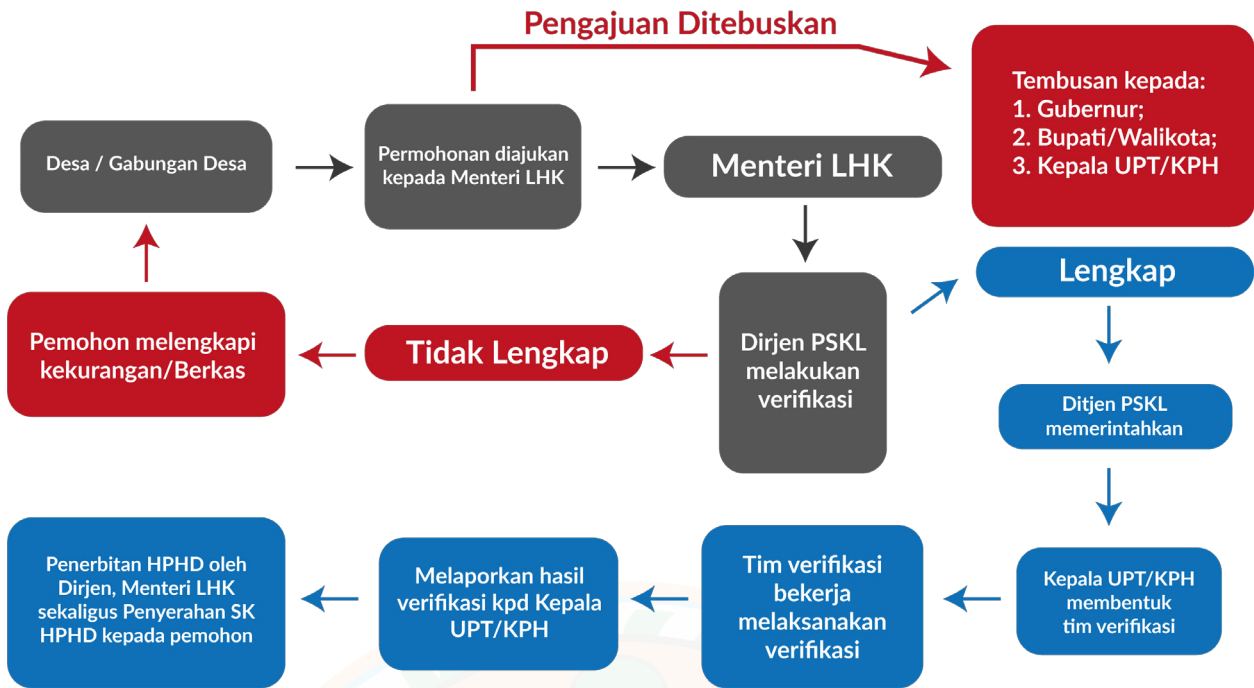
Saat ini laju degradasi hutan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir masih cukup tinggi yakni 1,08 juta ha/th. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yakni berjumlah sekitar 48,8 juta jiwa dan 10,2 juta jiwa diantaranya tergolong miskin. Data Kementerian LHK dan BPS Tahun 2018 menunjukkan terdapat 31.957 desa berinteraksi dengan hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan.

Adanya deforestasi dan degradasi yang terjadi menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang masih cukup tinggi pada masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Kondisi demikian membuat berbagai pihak termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencoba mendorong berbagai program. Salah satu program yang dianggap paling efektif saat ini untuk mengurangi laju deforestasi hutan yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama pembangunan kehutanan melalui Program Perhutanan Sosial (PS).

Perhutanan Sosial diselenggarakan melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan. Terkait hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian LHK kini telah membuka akses kepada masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan. Lebih lanjut, fasilitasi dari pemerintah daerah dan lembaga-lembaga fasilitator juga menjadi penting pada proses awal untuk pengajuan usulan model pengelolaan hutan oleh kelompok masyarakat tersebut. Untuk itu diperlukan komitmen dan peran aktif dari semua pihak terkait, demi keberhasilan dan tercapainya tujuan dari program Perhutanan Sosial (PS) ini yaitu mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Apa Itu Hutan Desa ?

Berdasarkan PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 bahwa Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Menurut PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 Pasal 6 ayat 1 bahwa HD dilaksanakan pada hutan lindung yang di kelola oleh Perum Perhutani, dan/atau wilayah tertentu dalam



Bagan Alir Permohonan HPDP Kepada Menteri

sumber: Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Tahun 2017

KPH serta hutan lindung dan/atau hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan. Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) diberikan kepada satu atau beberapa Lembaga Desa yang dibentuk oleh Desa (Contoh: Koperasi Desa atau Badan Usaha Milik Desa) dan diketahui oleh satu atau beberapa kepala desa yang bersangkutan. Pemberian HPHD tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan. HPHD bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, serta dilarang memindah-tangankan atau mengagunkan.

Berdasarkan PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 Pasal 9 bahwa permohonan HPHD yang diajukan oleh desa diajukan kepada Menteri LHK dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, kepala UPT dan kepala KPH. Permohonan tersebut dapat difasilitasi oleh Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Tentunya proses untuk mendapatkan HPHD ini akan melalui verifikasi dan evaluasi monitoring yang cukup ketat dari Kementerian LHK serta Pemerintah Daerah setempat. Secara singkat dan sederhana tahapan atau mekanisme proses permohonan HPHD seperti pada Bagan di atas.

Tantangan, Permasalahan, dan Solusi Pembangunan Hutan Desa

Hutan Desa Muara Merang yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa pada tanggal 21 Januari 2010 di dalam hutan produksi. Setelah penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilanjutkan dengan proses permohonan izin pengelolaan kepada Gubernur, dan pada bulan November 2010 izin pengelolaan tersebut telah terbit dengan beberapa revisi terkait Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD).



Pemukiman warga yang terlibat program hutan desa di Dusun Pancuran, Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba, Sumsel.

Foto: Taufik WijayaSosial (PKPS) Tahun 2017

Lebih lanjut, seiring waktu dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa di Muara Merang sering menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi, diantaranya adalah:

- **Lemahnya kapasitas SDM lembaga pengelola hutan desa (LPHD);**

HD dikelola oleh desa melalui lembaga pengelola hutan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Permasalahan yang dialami oleh lembaga pengelola hutan desa Muara Merang yaitu, kekurangpahaman tata kerja dan tata kelola HD, belum terbangun kebersamaan dan kesepahaman antar pengurus, dan belum terbangunnya pola komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan lembaga pengelola.

- **Penguasaan lahan oleh pihak-pihak yang tinggal diluar desa tanpa koordinasi dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD);**

Sejak ditetapkannya areal kerja hutan desa Muara Merang, hingga saat ini masyarakat luar desa terus berdatangan di wilayah ini untuk menguasai lahan. Pola penguasaan dilakukan dengan cara meng-klaim lahan dan membeli. Pengklaiman lahan dilakukan dengan cara membuka dan mengelola lahan tanpa berkoordinasi dengan lembaga pengelola hutan desa serta dengan cara membeli lahan dari oknum-oknum di dalam desa.

- **Sistem pengamanan dan pengawasan HD berjalan kurang efektif;**

Sebenarnya kelembagaan hutan desa melalui Pemerintah Desa Muara Merang sudah membentuk SATGAS pengamanan hutan desa, tapi keanggotaan SATGAS tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dikarenakan kuatnya tekanan dari para pelaku perambahan dan pencurian kayu. Serta, buruknya dukungan pihak berwenang dalam pemberantasan kegiatan ilegal di kawasan HD. Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa kegiatan ilegal di kawasan hutan desa, melibatkan oknum-oknum di instansi terkait dan penegak hukum.

- **Kegiatan ilegal di dalam kawasan HD;**

Di areal kerja HD masih banyak kegiatan-kegiatan ilegal, seperti : jual-beli lahan, pembukaan lahan puluhan hektar untuk perkebunan sawit, pembalakan liar dan usaha sawmil.

- **Belum terbangun persatuan dan kekompakan masyarakat lokal;**

Komunitas masyarakat yang tinggal di areal kerja hutan desa merupakan masyarakat pendatang yang sangat heterogen, terdiri dari berbagai daerah dan suku sehingga sulit bersatu untuk mencapai tujuan bersama.

Dari berbagai kendala tersebut perlu dilakukan upaya solusi sebagai berikut:

- Penguatan kelembagaan pengelola Hutan Desa (HD);
- Secara partisipatif, lembaga pengelola HD membuat peraturan pengelolaan dengan jelas;
- Penertiban secara tegas terhadap kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di areal kerja HD dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum;
- Membangun keterlibatan/partisipasi masyarakat lokal dalam mengelola HD;
- Pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel (terbuka dan bertanggung jawab);
- Melakukan kegiatan pendampingan masyarakat lokal secara intensif.

KESIMPULAN

Hutan Desa merupakan salah satu terobosan program pemerintah melalui Kementerian LHK yang bertujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Melalui program pembangunan HD ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Untuk tujuan jangka panjangnya, melalui pembangunan HD diharapkan rasa memiliki masyarakat (sense of belonging) terhadap hutan akan meningkat sehingga kelestarian hutan di Indonesia tetap terjaga. Oleh karena itu, butuh peran semua pihak mulai dari tingkat tapak hingga tingkat pusat untuk mendukung keberhasilan program HD.



“Kebaikan dan kebenaran adalah investasi yang tidak pernah gagal”

-Murtado-

“CIBIRAN YANG BERBUAH KESUKSESAN”

Oleh : Ernita Mery Theresia

*Penyuluh Ahli Muda, Pusat Penyuluhan

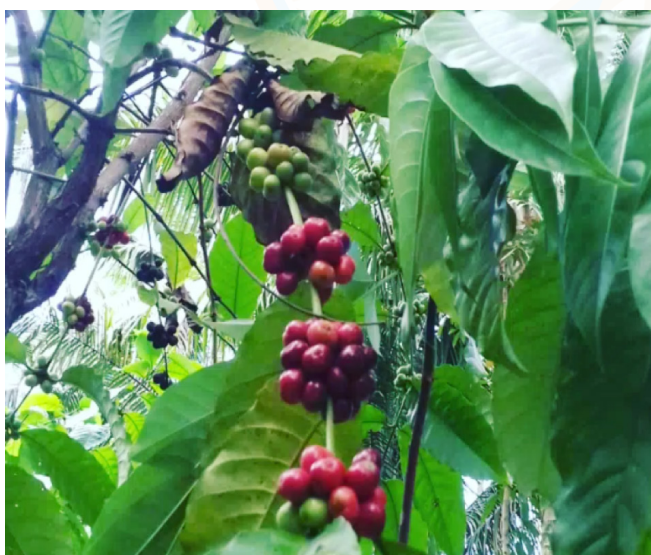


Yuri Dulloh (40 thn) pemuda asal Desa Pucangan, Kecamatan Ambal, Kebumen, berinovasi menanam kopi di daerah pesisir. Banyak yang beranggapan tanaman kopi tidak bisa tumbuh dengan baik di daerah yang mempunyai temperatur tinggi tersebut. Tak sedikit pula yang mencibir bahkan menganggapnya “gila”, namun cibiran-cibiran itu tidak sedikitpun mematah semangatnya. Yuri memulai dengan menanam 20 batang kopi di antara pohon albasia di belakang rumahnya. Ia juga mengajak warga sekitar untuk menanam kopi di lahan non produktif yang jumlahnya cukup banyak. Ia menawarkan sistem bagi hasil agar bisa menarik minat warga setempat. Selain itu Yuri juga gencar menyebarkan gerakan penghijauan dengan cara membagikan bibit-bibit kopi untuk ditanam ke seluruh penjuru Kebumen, bahkan hingga ke Kabupaten Kulon Progo. Dalam 2 tahun usahannya membuahkan hasil, bibit kopi yang ia semai di lahan-lahan non produktif tumbuh menjadi pohon kopi yang subur. Keberhasilan itu, menjadi daya tarik bagi warga untuk menanam kopi. Kini, areal tanaman meluas hingga pada kawasan hutan negara milik Perhutani. Yuri lantas ditunjuk sebagai tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Desa (PKSMD).



Pekarangan belakang rumah yang disulap menjadi kebun kopi

Tidak hanya menanam, warga juga diajak mengkreasi biji kopi dengan alat sederhana, namun dengan cita rasa dan kualitas yang tinggi. Yuri pun belajar mengolah biji kopi dengan pertimbangan agar petani bisa menjual biji kopi mentah dengan harga yang lebih tinggi. Jika sudah diolah, kopi pasti bisa dihargai lebih mahal. Apalagi tren saat ini, menyeruput kopi menjelma sebagai lifestyle atau gaya hidup masyarakat Indonesia bahkan dunia. Mulai dari kedai kopi pinggir jalan hingga coffee shop premium yang ada di mall-mall, seakan berlomba menawarkan rasa otentik dari aneka ragam kopi.



Buah kopi arabica dari pesisir, hasil perkebunan Yuri Dulloh

Kini dengan alat yang sederhana siapa saja bisa membuat kopi espresso sendiri dari biji kopi Kebumen yang punya cita rasa yang nikmat. Tidak harus datang ke cafe dan juga tidak perlu membeli mesin pembuat espresso yang mahal, cukup dengan Rp.60.000,- hingga Rp.100.000,- tergantung jenis kopi yang dipesan. Alat ini sebenarnya sangat simpel terdiri dari satu ruas bambu yang diameternya tidak terpaut jauh dari mulut gelas belimbing, dipangkas hingga sepanjang setengah jengkal. Di bagian buku atau penyekat bambu, diberi lubang kecil-kecil, nyaris rapat hingga mirip saringan. Agar lebih menarik, kulit bambu dibubut hingga halus agar bisa diberi coretan atau ornamen gambar dan tulisan. Bentuknya pun didesain mirip gelas agar tampak elegan.

Cara menggunakannya relatif mudah, bumbung tersebut diisi kopi, sesuai selera kemudian diletakkan di atas gelas, setelah itu diisi air mendidih. Tinggal menunggu air yang melewati serbuk kopi turun ke gelas. Prosesnya memang agak lama. Untuk mendapatkan seperempat gelas belimbing butuh waktu antara 5-10 menit. Mungkin ini kelemahan jika dibanding menggunakan mesin espresso. Selain itu, kopi yang disaring dari bumbung ini tidak menghasilkan cream atau buih keemasan khas espresso. Dia mengaku, memilih bumbung karena di daerah tempat tinggalnya di Kebumen banyak tumbuh bambu. Awalnya, dia cukup ragu-ragu karena khawatir akan mengubah cita rasa kopi. Tapi, setelah dicoba, aroma bambu tidak mengganggu, justru memperkuat aroma kopi. Alat tradisional ini ramah lingkungan, secara alami menghilangkan sakarosa sehingga kopinya rendah kalori. Kopi bubuk tersebut diberi merek "Yuam Roasted Coffee".

Selain itu, Yuri juga memberdayakan petani kopi dengan mengajarkan teknik petik, teknik memanen, dan teknik sambung kopi. Kini, alat inovasinya sudah dilirik banyak barista dari Magelang, Jogjakarta, Bandung, dan beberapa daerah lain bahkan sampai ke luar negeri (India, Jerman, Tiongkok, dan Singapura).



Bambu yang dimodifikasi menyerupai gelas sebagai penyaring kopi berkelas espresso

Tak berhenti di situ, Yuri Dulloh terus berinovasi mencari cara baru mengembangkan tanaman kopi dan produk lain dari kopi. Ia mencoba memanfaatkan bukan hanya biji kopi, melainkan juga daun kopi dan kulit kopi. Daun kopi diolah menjadi teh, sedangkan kulit biji kopi untuk pupuk cair dan padat. Semua pengetahuan yang diperoleh dari usaha coba-coba itu tidak dikuasai sendiri, tetapi ia bagikan kepada para petani kopi di wilayahnya. Berbagai inovasi yang dilakukannya inilah yang menghantarkannya menjadi pemenang utama Lomba Wana Lestari Tahun 2018 dengan Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Semangat, kegigihan dan jiwa entrepreneur perlu mendapat apresiasi serta dukungan pemerintah setempat agar dapat memperkenalkan kopi Kebumen ke pasar nasional maupun internasional.



Juara 1 kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat pada Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2018

“Ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak menyerah itulah kekuatan kita”

-Ernita M. Thersia-



MEMAMPUKAN MASYARAKAT DESA BUKIT LAYANG MENGURUS HUTAN MELALUI POLA HUTAN TANAMAN RAKYAT

Pendampingan Kegiatan KTH HTR Panca Indah Lestari di Dusun Cungfo, Desa Bukitlayang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka

Oleh : Ade Irma Sembiring

*Penyuluh Kehutanan Muda KPHP Sigambir Kotawaringin

Latar Belakang dibentuknya Kelompok Tani Hutan

Hutan memiliki beragam sumber daya alam hayati yang sejak dahulu dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila kita melihat kembali akses pemanfaatan sumber daya hutan dari tahun 1981-1999 Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang memiliki ruang untuk boleh memanfaatkan Sumber Daya Hutan yang ada. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat terkhusus yang berada di sekitar kawasan hutan menjadi terpinggirkan, sehingga menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, padahal kondisi sebenarnya di lapangan masyarakat sekitar hutan memiliki ketergantungan yang besar pada sumber daya hutan. Karena itu sejak tahun 2007 pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memiliki akses kelola terhadap pemanfaatan sumber daya hutan melalui program Perhutanan Sosial. Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial bahwa salah satu pola perhutanan sosial bagi masyarakat yang



Sekretariat dan papan nama KTH Panca Indah Lestari

sudah terlanjur melakukan usaha di kawasan hutan yaitu Hutan Tanaman Rakyat. Desa Bukit Layang, merupakan salah satu desa di Kabupaten Bangka yang mana pada wilayah administratif desa terdapat kawasan Hutan. Sebagian besar masyarakat di desa tersebut

menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Pembukaan lahan untuk bercocok tanam di kawasan Hutan Produksi Sungailiat-Air Panca telah dilakukan dari tahun 1995. Pada awal tahun 2015, penyuluh kehutanan melakukan sosialisasi tentang program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) masyarakat yang sudah terlanjur berkebun di kawasan hutan. Dari masyarakat yang mengikuti sosialisasi, ada sebagian masyarakat yang bersepakat untuk membentuk kelompok guna mendapatkan izin kelola atas kawasan hutan yang sudah mereka kelola. Berdasarkan kondisi tersebut pada bulan Juni 2015 dengan difasilitasi penyuluh kehutanan, terbentuklah Kelompok Tani Hutan (KTH) Panca Indah Lestari yang beranggotakan 15 (lima belas) orang masyarakat sekitar Desa Bukit Layang dengan skema Hutan Tanaman Rakyat dan pada April 2017 lalu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2040/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017, KTH Panca Indah Lestari sudah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat seluas 11,05 Ha.

Pendampingan Kegiatan KTH Panca Indah Lestari

Kegiatan pendampingan KTH Panca Indah Lestari telah dilaksanakan sebelum terbitnya izin kelola. Sejak dikukuhkannya secara yuridis, kelompok ini telah banyak mengambil bagian dalam kegiatan penghijauan lingkungan salah satu diantaranya penanaman bibit tanaman mahoni dan gaharu pada wilayah kelola. Disamping kegiatan teknis di lapangan, KTH Panca Indah Lestari juga terus berbenah dalam mengelola kelembagaan kelompok. Sebagai salah satu kelompok yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelas, KTH Panca Indah Lestari sudah mengalami peningkatan kelas kelompok dari kelas pemula menjadi kelas madya. Tidak hanya antusias dari kelompok tani hutan yang tinggi, kegiatan KTH Panca Indah Lestari tidak akan berjalan sampai sekarang ini tanpa pendampingan dari penyuluh kehutanan, instansi terkait dan juga Pemerintah Desa Bukit Layang. Sinergitas yang terjalin antar pihak sangat mendukung jalannya kegiatan di kelompok ini secara berkelanjutan. KTH Panca Indah Lestari juga

aktif dalam kegiatan kelola kawasan, mulai dari perencanaan wilayah kelola berupa pembuatan peta swakelola dan pemasangan pal batas areal kerja, maupun kegiatan fisik di lapangan yakni melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika ada perambahan atau pun aktivitas illegal di wilayah kelola kerja kelompok dan penanaman pohon di wilayah rawan longsor. Selain itu, dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan di Desa Bukit Layang, pengurus kelompok pada khususnya selalu menyampaikan himbuan kepada masyarakat setempat untuk tetap menjaga kelestarian hutan di kawasan tersebut.

Pengembangan Jenis Usaha Baru

KTH Panca Indah Lestari memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap akses pengelolaan hutan di Desa Bukit Layang. KTH Panca Indah Lestari memiliki beberapa pengembangan usaha tani bidang kehutanan seperti agroforestry. Usaha tanaman karet,



Kegiatan Peningkatan Kelas KTH

gaharu dan mahoni dengan tanaman pertanian (lada dan ubi kayu). Mulai bulan November tahun 2017, KTH Panca Indah Lestari



**Kegiatan penanaman pohon di kawasan rawan longsor (A)
dan Pemetaan partisipatif wilayah kelola (B)**

mengembangkan kegiatan usahanya berupa pupuk kompos yang sedang dirintis untuk dikembangkan sebagai upaya tindak lanjut dari fasilitasi peningkatan kelas kelompok dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kelompok. Harapan kelompok tidak muluk-muluk dengan adanya usaha baru ini, paling tidak pupuk yang dibutuhkan untuk kebutuhan mereka pribadi sudah terpenuhi dan ketika ada aktivitas yang dilakukan di Sekertariat Kelompok, secara tidak langsung juga dapat mengawasi terjadinya aktivitas ilegal di wilayah kelola kelompok.

Meskipun usaha pembuatan pupuk kompos ini masih berjalan beberapa bulan, tetapi KTH Panca Indah Lestari sudah bisa menghasilkan 1-1,3 ton/bulan dan sebagian dari produk pupuk kompos sudah dipasarkan sampai di tingkat kecamatan, dan sedang proses membangun jejaring kerjasama dengan BUMDesa Bukit Layang. Penambahan jenis usaha ini juga tidak terlepas dari fasilitasi peningkatan kelas kelompok dari Pusat Penyuluhan Kehutanan tahun 2017 lalu. Mudah-mudahan aktivitas KTH Panca Indah Lestari dalam menjaga dan mengurus kelestarian hutan, dapat menjadi motivasi dan wujud nyata bagi masyarakat sekitar hutan lainnya terkhusus Desa Bukit Layang tentang pelaksanaan program perhutanan sosial, karena masyarakat akan sejahtera jika hutan tetap lestari.



Kegiatan usaha pembuatan pupuk kompos



HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) SIKAYAN BALUMUIK : MENYATUKAN “MIMPI” ANGGOTA MENJADI “FAKTA”

Oleh: *Meriyenti, S.Hut., MSi. & **Ir. Rita Marsi

* Penyuluh kehutanan Muda, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

** Penyuluh Ahli Madya, Pusat Penyuluhan

Pendahuluan

Keberadaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sikayan Balumuik di Kota Padang, Pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sering dipertanyakan. Terletak di wilayah administrasi Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kotamadya Padang, sekilas yang terbayang adalah posisi sebuah HKm di tengah-tengah perkembangan masyarakat Kota Padang. Namun bagi yang memahami topografi Provinsi Sumatera Barat secara umum dan khususnya Kotamadya Padang, paham bahwa sebagian dari Kotamadya Padang adalah daerah hulu atau catchment area bagi Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman serta Kabupaten Solok, tergabung dengan perbukitan Bukit Barisan. Sebagiannya lagi adalah daerah hilir yang merupakan Pesisir Pantai Padang dan tergabung dengan Pesisir Pantai Barat Sumatera.

HKM Sikayan Balumuik adalah salah satu Pemegang Izin Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat. Izin diberikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Sikayan Balumuik (masyarakat RT. IV dan V Kelurahan Limau Manis Selatan) atas kawasan lindung di Blok Sikayan Balumuik Koto Baru seluas 300 hektar

di Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Arau, pada ketinggian 700-1.200 meter dari permukaan laut. Kawasan hutan lindung yang menjadi areal kerja, berbatasan langsung dengan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan I yang mejadi wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Arau Hilir. Keberadaan dan fungsinya menjadi sangat penting serta menarik bukan hanya karena potensi yang ada di dalam kawasan dan masyarakat yang sudah berada di dalam kawasan tetapi juga karena berbatasan langsung dengan Perusahaan Semen Padang dan Universitas Andalas (Unand) Padang.

Hutan Kemasyarakatan di Kotamadya Padang

Tahun 2015, instansi kehutanan Kotamadya Padang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Q-bar mulai melakukan sosialisasi Program Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat di wilayah Kotamadya Padang untuk target 11.083 hektar kawasan lindung. Pada tahun ini, sosialisasi dilakukan di 7 (tujuh) lokasi, yaitu Kecamatan Kuranji (Kelurahan Kuranji), Kecamatan Koto Tangah (Kelurahan Air Dingin dan Kelurahan Lubuk Minturun), Kecamatan Pauh (Kelurahan

Lambung Bukit dan Kelurahan Limau Manis Selatan), dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Kelurahan Teluk Kabung Selatan dan Kelurahan Bungus Timur). Tahun 2016, proposal usulan untuk izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) untuk 2 (dua) kelurahan diajukan atas nama KTH Sikayan Balumuik dari Kelurahan Limau Manis Selatan dan KTH Padang Janiah dari Kelurahan Lambung Bukit kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tahun 2017, IUPHKm untuk dua usulan yang diajukan disetujui Menteri dengan rincian sebagai berikut:

1. IUPHKm untuk KTH Padang Janiah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 2051/menlhk-PSKL/PKPS/ PSL.0/4/2017 di Blok Batu Jirek Padang Janih Batu Busuk selama 35 (tiga puluh lima) tahun untuk luas 250 hektar (Tanggal 11 April 2017).
2. IUPHKm untuk KTH Sikayan Balumuik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 3880/menlhk-PSKL/PKPS/ PSL.0/7/2017 di Blok Sikayan Balumuik Koto Baru selama 35 (tiga puluh lima) tahun untuk luas 300 hektar (Tanggal 14 Juli 2017).

Potensi

Potensi pendukung yang dimiliki HKm Sikayan Balumuik secara garis besar adalah sumber daya manusia, lahan, dan stakeholder terkait. Sumber daya manusia (anggota dan pengurus) yang dimiliki berada dalam jumlah yang cukup (97 orang), secara umum masih dalam usia produktif dan memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas. Secara umum sudah memahami organisasi, bukan hanya masyarakat yang berorientasi subsisten (sudah market oriented) dan tingkat kemandirian menengah ke atas. Hanya saja wawasan dan pola pandang anggota dan pengurus tentang pengelolaan lahan, budidaya atau teknologi sektor kehutanan masih kurang karena selama ini dominan pada pola budidaya pertanian. Potensi lahan, vegetasi, letak dan topografi yang dimiliki HKm Sikayan Balumuik sangat potensial untuk mengkonservasi tanah, air, udara serta

keragaman hayati (plasma nutfah). Lahan dengan luas 300 hektar, merupakan salah satu bagian catchment area sumber air dan serapan debu untuk daerah sekitarnya (sebagai contoh, lokasi lahan berbatasan langsung dengan PT. Semen Padang mengharuskan Hutan Lindung Blok Sikayan Balumuik Koto Baru yang menjadi areal kerja harus tetap bisa berfungsi sebagai sumber air dan penyerap debu serta asap yang dihasilkan oleh PT. Semen Padang) serta fungsi konservasi tanah yang sangat penting mengingat kondisi topografi Provinsi Sumatera Barat dan Khususnya Kota Padang 50 % curam.



Daerah Hulu Kota Padang



Areal Kth Hkm Sikayan Balumuik dan Sekitarnya

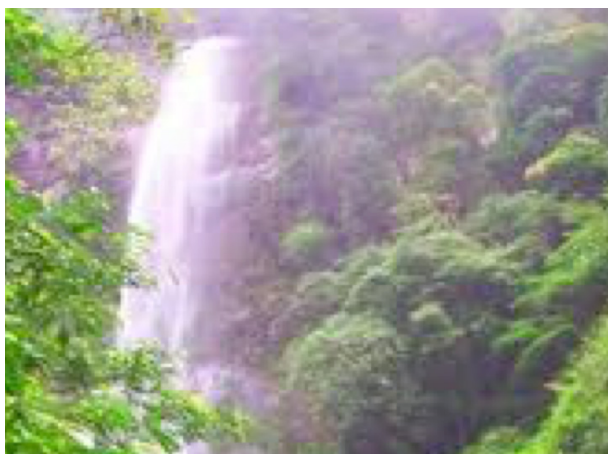


Jalan Sitinjau Lauik yang Ekstrim dan Gugusan Bukit Barisan Sebagai Penahan Pergerakan Tanah (Sumber Foto : Meri)

Potensi lain adalah bentangan alam yang sangat indah, potensial untuk ekowisata. HKm Sikayan Balumuik memiliki 3 (tiga) dari 4 (empat) air terjun yang potensial dikembangkan sebagai obyek wisata, yaitu Sikayan Balumuik, Sikayan Banyak Garing dan Sikayan Bukik Lantik. Sikayan Balumuik, termasuk air terjun tertinggi di Sumatera Barat (sekitar 700 meter). Nama Sikayan Balumuik dalam Bahasa Indonesia adalah “Air Terjun Berlumut”, menggambarkan kondisi sekitar air terjun yang ditumbuhi lumut karena senantiasa lembab dan mengandung titik-titik air seperti gerimis yang berasal dari jatuhan air terjun, sangat indah dan alami. Di bagian atas air terjun adalah kawasan konservasi KPHK Arau Hilir, terdapat telaga biru dan habitat kambing hutan. Sikayan Balumuik masih alami, pengelolaan yang dilakukan oleh Pengurus dan Anggota HKm, baru pada tahap pembenahan jalur tempuh menuju air terjun.

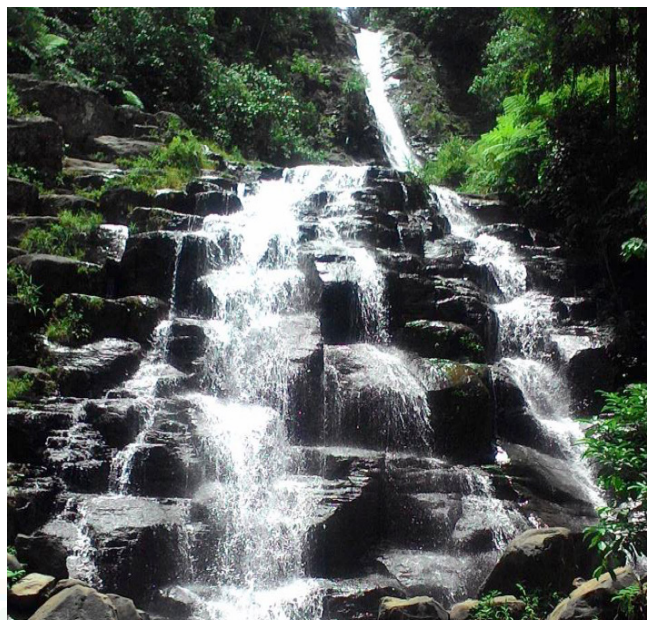


Air terjun yang sangat tinggi, Sikayan Balumuik (Sumber Foto: Meri)



Air terjun yang sangat tinggi, Sikayan Balumuik (Sumber Foto: Meri)

Sikayan Banyak Garing (Air Terjun Banyak Ikan Garing), memiliki keindahan karena letak air terjun bertingkat-tingkat serta lebih mudah diakses dibandingkan Sikayan Balumuik. Saat ini, Sikayan Banyak Garing sudah dikelola oleh pemuda setempat dan mulai didatangi pengunjung sekitar 70 orang per hari. Sikayan Bukik Lantik, memiliki keindahan alam dengan air terjun yang sangat panjang dan air yang jernih. Potensial untuk tempat pemandian. Namun belum dikelola dengan baik karena posisi air terjun agak sulit dijangkau.



Air terjun bertingkat Sikayan Banyak Garing (Sumber Foto: Meri)

Potensi konservasi keanekaragaman hayati, sebagai sumber plasmanutraf flora dan fauna. Secara umum, areal kerja yang dimiliki oleh HKM Sikayan Balumuik sangat kaya akan jenis-jenis kayu bagus dan komersil (boneo, bayur dan suren) dan non kayu komersil (rotan dan tanaman obat) serta tumbuhan langka. Salah satunya, Bukit Pinang dengan luasan sekitar 6 hektar yang juga digunakan oleh Universitas Andalas Padang (Unand) Padang sebagai hutan pendidikan. Lokasi ini kaya dengan tumbuhan dan satwa langka, terdapat populasi tumbuhan langka seperti raflesia (*Rafflesia gadutniensis*). Selain itu terdapat 7 (tujuh) jenis tanaman obat langka yang diprediksi bisa mengobati penyakit HIV/AIDS (informasi berdasarkan hasil penelitian Unand, namun uraian rinci jenis-jenis tanaman masih sangat terbatas). Salah satunya adalah jenis tumbuhan bintangur). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus dan anggota untuk melakukan identifikasi jenis-jenis floranya dengan tujuan untuk penangkaran dan pembudidayaan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Untuk jenis fauna, areal kerja HKM Sikayan Balumuik juga merupakan habitat beberapa satwa langka seperti Harimau Sumatera, tapir, kijang dan kambing hutan serta berbagai jenis burung langka lainnya. Saat ini, HKM Sikayan Balumuik bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat, Direktorat



Air terjun panjang dan potensial pemandian, Sikayan Bukik Lantik (Sumber Foto: Meri)

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang mengadakan kegiatan identifikasi satwa dan tumbuhan langka di Kawasan Konservasi yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung Blok Sikayan Balumuik Koto Baru.

Steakholder terkait, digolongkan sebagai potensi karena adanya jalinan kerjasama antara HKM Sikayan Balumuik dengan stakeholder-stakeholder yang terkait, mulai dari Pemerintahan Kelurahan, Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), perusahaan (PT. Semen Padang), perguruan tinggi (Universitas Andalas Padang), instansi kehutanan pusat

(UPT. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat) dan instansi kehutanan daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat) serta lembaga swadaya masyarakat (Perkumpulan Q-bar) dan swasta CV. Wahana Sejahter. Sejauh ini, kerjasama dan sokongan dari stakeholder-stakeholder yang ada terbukti berdampak positif bagi kemajuan HKM Sikayan Balumuik. Kedepannya jejaring kerjasama akan lebih dikembangkan dengan semua pihak terkait.

Jenis Usaha

Tahun 1990-an, Kelurahan Limau Manis Selatan yang biasanya dikenal dengan sebutan Daerah Gadut, adalah sentra meubel dan rotan. Sepanjang jalan raya ditemukan tempat-tempat pertukangan perabot rumah tangga. Hal ini juga yang menyebabkan kawasan hutan sekitar itu mengalami illegal logging yang sangat masif. Tahun 2000-an, tempat-tempat pertukangan perabotan di situ mulai berkurang, seiring dengan berkurangnya stok kayu di kawasan hutan. Dengan demikian, sumber mata pencarian masyarakat mulai berubah ke sektor pertanian. Tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat lebih cenderung pada tanaman keras dan tahunan seperti duren, manggis, kopi dan nilam, disebabkan oleh kondisi topografi yang berbukit. Saat ini kelurahan tersebut telah menjadi sentra duren dan manggis di Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan sumber mata pencarian masyarakat ini, membutuhkan lahan untuk budidaya. Disebabkan kondisi kawasan hutan yang sudah rusak (terbuka) karena illegal logging memudahkan masyarakat sekitarnya masuk, mengolah lahan, bermukim serta mendirikan sarana prasarana lainnya di dalam kawasan hutan.

Fakta yang sama juga ditemukan pada Kawasan Hutan Blok Sikayan Balumuik Koto Baru yang menjadi areal kerja KTH HKM Sikayan Balumuik. Secara keseluruhan anggota memiliki lahan garapan di dalam kawasan yang seluas 300 hektar. Sebagian besar aktif memanfaatkan lahan untuk budidaya tanaman duren, manggis, kopi, mahoni, nilam dan serai wangi serta jeruk nipis. Sehingga kondisi kawasan yang berhutan hanya 25 %, sisanya telah berubah menjadi lahan agroforestri.

Tahun 2018, HKM Sikayan Balumuik mendapat dukungan kegiatan berupa pembuatan kebun bibit rakyat (KBR) dari UPTD. Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Produksi bibit yang dilakukan, direncanakan untuk mereboisasi lahan kerja untuk mengembalikan fungsi lahan secara perlahan-lahan. Meskipun dengan jenis-jenis kayu penghasil buah-buahan yang dominan (duren, manggis, matoa, mahoni dan kayu andalas).



Hutan Lindung Blok Sikayan Balumuik Koto Baru yang telah berubah menjadi lahan budidaya masyarakat

HKm Sikayan Balumuik juga mengembangkan agroforestri kopi, nilam dan serai wangi di bawah tegakan kayu-kayuan yang baru ditanam. Penambahan jenis kopi murni swadaya anggota. Bantuan bibit nilam dari instansi pertanian Kotamadya Padang. Untuk agroforestri serai wangi, merupakan pengembangan dari petak contoh agroforestri serai wangi 1 (satu) hektar yang didukung oleh kegiatan kelola usaha Ktegiatan Fasilitas Peningkatan Kelas KTH dari Pemula ke Madya dari Pusat Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018. Pengembangan Agroforestri ini juga bekerjasama dengan CV. Wahana Sejahtera. Luas agroforestri serai wangi yang dimiliki HKm Sikayan Balumuik Tahun 2018 menjadi 11 (sebelas) hektar. Kegiatan pengembangan produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) minyak atsiri dimaksudkan untuk mendukung Kelurahan Limau Manis Selatan sebagai sentra minyak atsiri di Provinsi Sumatera Barat, ditandai dengan adanya UPTD. Minyak Atsiri Kotamadya Padang di Kelurahan Limau Manis Selatan. Pengolahan pascapanen kopi juga telah mendapat bantuan alat berupa mesin pengolahan pascapanen kopi hingga menjadi bubuk kopi dari PT. Semen Indonesia (Semen Padang).

Permasalahan

Permasalahan yang ditemukan pada KTH HKm Sikayan Balumuik diuraikan pada 3 (tiga) aspek pengelolaan KTH berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan, yaitu:

- permasalahan kelembagaan dan sumber daya anggota serta pengurus. Dibutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana kelembagaan KTH HKm Sikayan Balumuik, seperti sekretariat HKm, kelengkapan sarana prasarannya dan tertib penyelenggaraannya. Dibutuhkan peningkatan kapasitas anggota dan pengurus dalam penyelenggaraan tertib administrasi organisasinya.

Hal ini akan berpengaruh terhadap kesiapan dan kekompakan HKm Sikayan Balumuik dalam mengelola lahan kerjanya;

- Permasalahan kelola kawasan, dibutuhkan peningkatan kapasitas anggota dan pengurus terhadap batas kawasan lahan kelolanya serta rehabilitasi hutan dan lahan. Hal ini disebabkan lahan kerja berbatasan langsung dengan kawasan konservasi KPHK Arau Hilir, dan bahkan sebagian anggota telah berbudidaya di dalam kawasan KPHK Arau Hilir. Selain itu, pemahaman ini dibutuhkan dalam rangka mengembalikan fungsi lahan kerja sebagai hutan, mengingat kondisi saat ini areal kerja 75% sudah menjadi lahan budidaya perkebunan; dan
- Permasalahan kelola usaha, peningkatan kapasitas anggota dan pengurus dibutuhkan dalam hal peningkatan wawasan dan penguasaan terhadap teknologi kehutanan. Hal ini dibutuhkan dalam rangka, menjadikan areal kerja tetap lestari dalam fungsinya sebagai hutan, namun disisi lain produktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kekuatiran, areal kerja hanya akan dikelola menjadi lahan budidaya pertanian/perkebunan semata semakin kecil dan pengelolaan potensi lahan untuk jasa lingkungan/ekowisata dapat dikelola.

Pendampingan

Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Perhutanan Sosial, Penyuluh Kehutanan berperan dalam mendampingi kelompok perhutanan sosial mulai dari sebelum izin dan pasca izin. Sebelum izin meliputi pembentukan atau penyiapan KTH, penyiapan usulan dan pengajuan usulan. Pasca izin meliputi: penyusunan rencana kerja terhadap areal kerja yang izinnya sudah dimiliki, pengelolaan dan pemanfaatan areal kerja serta pengembangan usaha. Dengan demikian, fasilitasi pendampingan bagi KTH atau kelompok perhutanan sosial tidak hanya berhenti sampai dikeluarkannya izin pengelolaan, namun yang tidak kalah

pentingnya setelah izin keluar. Selain itu dalam peraturan di atas dan juga dalam SK izin yang dikeluarkan salah satu hak dari KTH atau kelompok perhutanan sosial adalah mendapatkan fasilitasi pendampingan dari lembaga pemerintah (instansi terkait atau perguruan tinggi) maupun bukan pemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Penyuluh Kehutanan sebagai tenaga teknis fungsional yang memiliki tugas pokok dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk instansi teknis kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, menjadi tenaga pendamping utama dalam pemberdayaan kelompok perhutanan sosial di Sumatera Barat. Demikian juga halnya Penyuluh Kehutanan yang mendampingi KTH HKm Sikayan Balumuik yang memiliki wilayah kerja binaan Kota Padang.

Kehadiran Penyuluh Kehutanan Pendamping menjadi penting untuk mendukung keberhasilan program perhutanan sosial di HKm Sikayan Balumuik. Kegiatan pendampingan yang dilakukan meliputi 3 (tiga) aspek pengelolaan, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Kelola kelembagaan, Pendamping dari awal aktif melakukan pertemuan dalam rangka pembenahan dan penertiban administrasi serta kelembagaan, menetapkan, melengkapi dan memfungsikan sekretariat KTH. Pendampingan pada kelola kawasan, hal yang dilakukan mulai dari sosialisasi tentang penyusunan rencana kerja, tata batas, penyusunan dan mensyahkan rencana kerja usaha (RKU) IUPHKm dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) HKM Sikayan Balumuik. Dengan kelola ini, pengurus dan anggota telah memiliki pemahaman dan gambaran yang dituangkan dalam RKU dan RKT-nya tentang batas areal kerja yang dimiliki serta blok-blok pemanfaatannya.

Pendampingan pada kelola usaha berupa pengembangan agroforestri kopi, nilam dan serai wangi. Pola ini dipilih dengan pertimbangan kearifan lokal (teknologi yang sudah dimiliki masyarakat) dan potensi. Masyarakat Kelurahan Limau Manis dari sejarahnya sudah membudidayakan kopi dan nilam serta mengolah pasca panen. Hal ini juga



Sekretariat KTH HKm Sikayan Balumuik menjadi lahan budidaya masyarakat

dibudidayakan di dalam kawasan hutan. Kondisi pasar menyebabkan masyarakat meninggalkan produk-produk yang sudah mereka miliki. Untuk agroforestri serai wangi, teknik budidaya masih baru dikenal masyarakat namun untuk pengolahan pasca panen bukan hal baru karena hampir sama dengan nilam. Kemudian, pengembangan minyak atsiri didorong di HKm Sikayan Balumuik untuk mendukung UPTD. Minyak Atsiri yang lokasinya ada di Kelurahan Limau Manis Selatan yang sudah memiliki sarana dan prasarana pengolahan minyak atsiri. Diharapkan dengan adanya arah kelola usaha seperti ini, memudahkan masyarakat untuk bermitra dalam mengembangkan produksinya dari hulu hingga ke hilir.



Peningkatan Kapasitas SDM dalam Kelola Kawasan KTH HKm Sikayan Balumuik



Gotong royong, kearifan lokal HKm Sikayan Balumuik yang menjadi andalan, membangun jalan menuju areal kerja

Rencana Kedepan

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, secara umum rencana pengembangan KTH HKm Sikayan Balumuik kedepan (2018-2022), difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Kegiatan Tahun 2018 dan 2019, adalah:

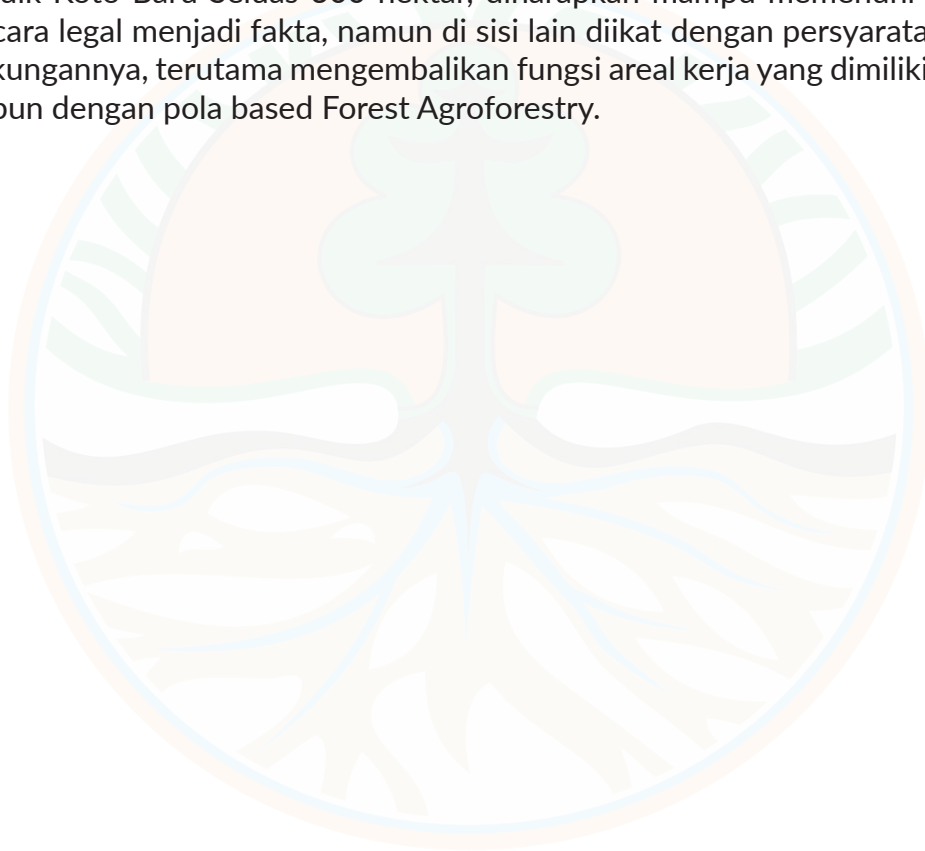
- Untuk kelola kelembagaan, mulai dbenahi, penyelenggaraan tertib administrasi dan sekretariat KTH. Kegiatan ini, lebih terbantu dengan adanya dukungan Kegiatan Peningkatan Kelas KTH dari Pemula ke Madya Tahun 2018 sumber dana APBN (Pusat Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Tahun ini juga direncanakan untuk membangun pondok pertemuan yang representatif di dalam areal kerja. Rencana ini didukung oleh PT. Semen Padang (PT. Semen Indonesia).
- Kelola kawasan, untuk Tahun 2018, telah disyahkan RKU IUPHKm dan RKT HKm Sikayan Balumuik. Guna mendukung implementasi bagi blok-blok pemanfaatan yang ada dalam RKU, Tahun 2018 mendapat dukungan kegiatan pengadaan kebun bibit rakyat. Bibit-bibit yang diproduksi direncanakan untuk menanami blok-blok rehabilitasi guna mengembalikan fungsi areal kerja sesuai status kawasan lindung.
- Kelola usaha, Tahun 2018, kelola usaha yang sudah dikembangkan adalah jasa lingkungan air bersih ke PT. Semen Indonesia, agroforestri kopi, nilam dan serai wangi. Usaha ini diselenggarakan oleh kelompok-kelompok usaha produktif yang ada dalam KTH HKm Sikayan Balumuik. Tahun 2019, direncanakan untuk pengelolaan pasca panen dari masing-masing produk.
- Tahun 2018 dan 2019, kelola usaha yang difokuskan lagi adalah pengembangan ekowisata Sikayan Balumuik dan Sikayan Banyak Garing. Untuk Sikayan Balumuik, hal yang sudah dilakukan adalah pembukaan jalur tracking menuju lokasi, selanjutnya akan dibangun sarana prasarana pendukung serta penanaman sekitarnya dengan tanaman kayu penghasil buah. Sikayan Balumuik untuk kedepannya dikembangkan untuk wisata minat khusus dengan pendaftaran online. Untuk Sikayan Banyak Garing, saat ini sudah mulai dikelola oleh kelompok pemuda setempat dan banyak dikunjungi wisatawan lokal. KTH HKm Sikayan Balumuik berencana kerjasama dengan pemuda setempat untuk mengelola lokasi tersebut. Karena lokasi berada dalam areal kerja, pemuda setempat mengelola sarana prasarana sekitarnya yang sudah berada di luar areal kerja. Semoga dengan pengembangan usaha dan kerjasama yang terjalin dari berbagai pihak ini, HKm Sikayan dapat mewujudkan mimpi-mimpi anggotanya, bisa makmur dan sejahtera.

Kesimpulan

Kelompok Tani Hutan (KTH) Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sikayan Balumuik, keberadaan kelompok perhutanan sosial yang harus guna menyokong keberlangsungan perkembangan Kota Padang sebagai sentra Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Berada di hulu Kota Padang yang harus menjaga suplai air, oksigen serta konservasi tanah dan plasma nutfah bagi daerah sekitarnya.

Anggota dan Pengurus KTH HKm Sikayan Balumuik di satu sisi harus tetap bisa meraih “mimpi-mimpi” yang mereka punya, guna kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga. “Mimpi-mimpi” ini selama ini diwujudkan oleh sebagian besar anggota dengan mengakses Hutan Lindung Blok Sikayan Balumuik Koto Baru yang berbatasan langsung dengan pemukiman. Diakses dengan menebang kayu secara illegal atau berbudidaya di dalam atau bahkan bermukim di dalam juga secara illegal.

Izin IUPHKm yang diperoleh oleh KTH HKm Sikayan Balumuik sejak tahun 2017 atas Blok Sikayan Balumuik Koto Baru Seluas 300 hektar, diharapkan mampu memenuhi “mimpi-mimpi” masyarakat secara legal menjadi fakta, namun di sisi lain diikat dengan persyaratan melestarikan hutan dan lingkungannya, terutama mengembalikan fungsi areal kerja yang dimiliki menjadi hutan kembali meskipun dengan pola based Forest Agroforestry.



**“Saat kau mengeluh tentang beratnya pekerjaan,
ingatlah banyak orang di luar sana yang menginginkan pekerjaanmu”**

-Nden Rissa H-



ALTERNATIF SOLUSI PENGUNAAN PUPUK KIMIA DAN PEMBAKARAN LIMBAH PERTANIAN MELALUI PENGOMPOSAN DENGAN METODE AERATED STATIC PILE DI TINGKAT KELOMPOK TANI

Oleh: Gugie Nugraha

*Penyuluh Kehutanan Pertama, BDLHK Kadipaten

ABSTRAK

Permasalahan kesuburan tanah yang semakin menurun perlu segera ditangani dengan tepat dan cepat. Masalah ini disebabkan oleh kebiasaan penggunaan pupuk kimia tanpa diikuti dengan penggunaan pupuk organik (pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk hijau) yang memadai. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh faktor kandungan bahan organik tanah (C-organik). Kandungan ideal bahan organik tanah adalah >2 persen. Salah satu upaya meningkatkan kandungan bahan organik tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah adalah dengan peningkatan penggunaan pupuk organik. Pupuk organik yang paling mudah dan murah proses pembuatannya adalah pembuatan pupuk kompos skala besar tanpa perlakuan membolak-balik. Produktifitas pembuatan kompos tiap kelompok petani diperkirakan bisa mencapai 6-10 metrik ton. Hasil pembuatan kompos ini mencukupi untuk didistribusikan di antara anggota kelompok tani untuk kemudian digunakan pada lahan-lahan pertanian mereka. Hal ini diharapkan dapat mengubah kebiasaan para petani yang bergantung pada pupuk kimia berangsur-angsur berubah memilih menggunakan pupuk organik sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil panen dari lahan mereka.

Kata kunci:

kompos, c-organik, kelompok tani, windrow, limbah organik, aerated static pile

PENDAHULUAN

Kesadaran mengembalikan dan meningkatkan kesuburan tanah yang masih kurang disertai ketergantungan terhadap pupuk kimia masih menjadi masalah yang perlu menjadi prioritas perbaikan. Perlu upaya gerakan massal atau gerakan nasional dalam hal ini, namun dalam pelaksanaannya butuh proses yang memakan waktu dan perlu diuji

terlebih dahulu dengan membuat projek-projek unggulan perintis dengan petani-petani model dari setiap sentra-sentra penghasil komoditi pertanian untuk kemudian disebarluaskan kepada petani-petani lainnya di masing-masing sentra tersebut. Upaya ini memerlukan pola-pola pertanian terpadu yaitu dengan peran serta dari peternak sebagai pemasok bahan

baku yang dihasilkan dari kandang untuk dijadikan pupuk kompos. Upaya ini merupakan salah satu cara termurah yang mungkin dilakukan oleh petani-petani di Indonesia karena prosesnya cocok dengan gaya hidup para petani yaitu rendah modal dan mudah dalam pengerjaannya. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesuburan tanah secara signifikan karena penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. Kandungan bahan organik tanah (C-organik) merupakan salah satu indikator kesuburan tanah.

Tanah yang mengalami kemerosotan kandungan C-organik menandakan tanah tersebut mengalami penurunan kualitas kesuburan tanah atau degradasi kesuburan. Bahan organik penting sebagai sumber energi jasad renik yang berperan dalam penyediaan hara tanaman. Bahan organik menentukan kapasitas tukar kation tanah, walaupun sifat ini tergantung sifat pH (pH dependent). Tanah miskin bahan organik dan didominasi mineral liat 1:1, mempunyai kapasitas tukar kation rendah, sehingga efisiensi pemupukan akan berkurang karena sebagian besar hara mudah hilang dari lingkungan perakaran. Bahan organik juga berperan dalam memperbaiki struktur tanah sehingga tanah mudah diolah dan dilumpurkan. Mengingat pentingnya peranan bahan organik terhadap kesuburan fisik, kimia dan biologi tanah, maka pemberian atau daur ulang bahan organik merupakan bagian penting dari pelestarian kesuburan tanah (Setyorini et al, 2010)

Produktifitas lahan sawah dapat menurun sebagai akibat dari: (1) pengurangan dan defisit hara karena yang terbawa panen lebih banyak dari hara yang diberikan melalui pemupukan atau penambahan dari air irigasi; (2) kelebihan pemberian hara tertentu dan kekurangan hara lainnya karena pemupukan yang tidak berimbang, dan (3) penurunan kadar bahan organik tanah. Degradasi tersebut tidak saja mengancam kuantitas (produktifitas) hasil padi, tetapi juga kualitasnya (Agus dan Setyorini, 2009).

Hasil penelitian Badan Litbang Pertanian (2006) menunjukkan bahwa sekitar 65 persen dari 7.9 juta ha lahan sawah di Indonesia memiliki kandungan bahan organik rendah sampai sangat rendah (C-organik <2 persen). Untuk mencapai tingkat produksi yang sama, tanah tersebut memerlukan input yang lebih tinggi dibanding dengan tanah-tanah yang kandungan bahan organiknya >3 persen. Sedangkan dari luasan lahan sawah tersebut, sekitar 17 persen mempunyai kadar total P tanah yang rendah dan sekitar 12 persen bekaradar total K rendah.

Pengertian dan Peran Kompos

Berdasarkan SNI 19-7030-2004 (2004) kompos merupakan bentuk akhir dari bahan-bahan organik sampah domestik setelah mengalami dekomposisi, dan dekomposisi adalah perubahan komposisi bahan organik sampah domestik akibat penguraian oleh mikroorganisma pada suhu tertentu menjadi senyawa organik yang lebih sederhana.

Pengomposan adalah proses alami pembusukan atau penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi terkendali. Sistem Aerated Static Pile (ASP) (Gambar 1 dan 2) atau tumpukan statis teraerasi adalah jenis pengomposan dimana udara disalurkan melalui 10 tumpukan statis menggunakan blower listrik untuk memastikan tingkat oksigen yang cukup untuk mempertahankan aktivitas mikroba sehingga dapat menghilangkan kebutuhan terhadap perlakuan membolak-balik. Tentu, udara tambahan mengalir ke dan melalui tumpukan karena efek konveksi cerobong asap dibuat saat gas panas yang diperoleh dari aktivitas mikroba naik ke atas dari tumpukan. Panas yang tercipta di dalam tumpukan juga membantu mempercepat dekomposisi yang lebih disukai mikroorganisme termofilik dan mesofilik (Diaz et al, 1993).

Lima faktor penting dalam proses pembuatan kompos adalah: (1) C/N rasio bahan baku (20:1 s.d 25:1) (2) porositas tumpukan (3) kadar air dalam tumpukan 45-55% (4) mikroorganisme dalam jumlah yang mencukupi dan (5) jumlah oksigen yang mencukupi. Proses aktif hanya membutuhkan waktu 30 hari



Gambar 1. Bentuk jadi pembuatan kompos sistem ASP dengan 10 pile di Provinsi Chiang Mai, Thailand

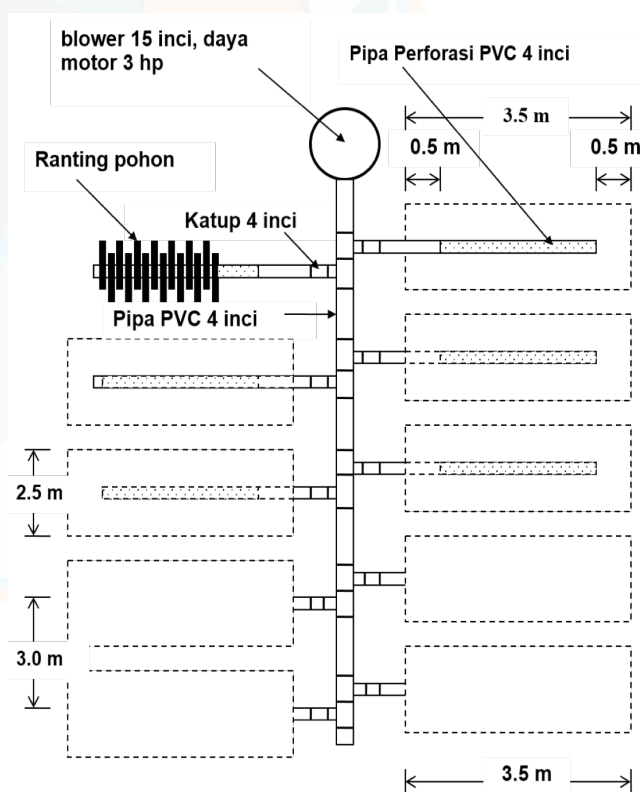


Gambar 2. Salah satu kelompok tani di Chiang Mai yang sudah berhasil menerapkan cara pembuatan kompos dengan sistem ASP

dan setelah periode aktif tumpukan dipecah dan direkonstruksi menjadi tumpukan lain (tanpa perlakuan) selama 2-3 minggu untuk pengeringan dan stabilitas mikroba (periode stabilisasi).

Dalam penelitian Sawangpanyangkura et al. (2004), tiga metode pengomposan dengan tumpukan skala besar telah dipelajari. Tiap tumpukan terdiri dari 6 m³ sampah daun dan 3 m³ kotoran sapi, dan ditumpuk di tanah terbuka dengan bentuk yang menyerupai prisma dengan dimensi 3.5x2.5x1.0 m (PxLxT). Kandungan air dikontrol dengan tingkat kebasahan 45-55%. Udara dialirkan dua kali sehari, masing-masing 15 menit, melalui pipa perforasi PVC 4 inci dengan blower berdaya 3 hp pada laju aliran udara 0.118, 0.147, dan 0.155 m³/detik untuk setiap tumpukan. Suhu rata-rata di dalam tumpukan pada lima hari pertama berada di kisaran 60-75° Celcius. Membutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk menyelesaikan pengomposan ketiga tumpukan tersebut. Aerasi tambahan dari konveksi cerobong menyebabkan tidak perlunya laju aliran udara yang spesifik. Hanya 3 persen bahan yang tidak benar-benar mengalami pembusukan. Biaya listrik rata-rata adalah USD 3 per metrik ton bahan baku.

membolak-balik, biaya rendah dan minimal dalam penggunaan energi. Tak kurang dari 10 tumpukan atau 10 metrik ton kompos bisa diproduksi setiap bulan.



Format pembuatan Kompos Sistem Aerated Static Pile (ASP)

Dari transfer teknologi, sistem ASP ternyata menjadi sistem yang potensial dalam memproduksi kompos dalam skala komersial oleh kelompok tani karena prosedurnya yang sederhana, tidak perlu perlakuan

PEMBAHASAN

Proses Dalam Pembuatan Kompos Sistem ASP

Prosedur dalam pengomposan ASP adalah sebagai berikut:

- Mencampur limbah pertanian dengan kotoran hewan (sapi, domba, kambing, kelinci, atau ayam) secara menyeluruh dengan rasio volume 3:1 sambil dilakkan penambahan air.
- Meletakkan ranting pohon pada pipa PVC berlubang 4 inci yang terhubung ke motor blower 15 inci dengan daya 3 hp. Ranting pohon ini membantu distribusi udara di dalam tumpukan.
- Menempatkan bahan baku dalam bentuk yang menyerupai prisma dengan dimensi 3.5 x 2.5 x 1.5 meter (PxLxT).
- Mengalirkan udara pada masing-masing tumpukan dua kali sehari, masing-masing 15 menit. Kelembaban dipertahankan pada tingkat 45-55% selama 30 hari. Setelah itu volume tumpukan akan menyusut sebesar 40% karena aktivitas mikroba.
- Memindahkan kompos jadi untuk selanjutnya dilakukan proses curing time (membiarkan tanpa perlakuan) dalam ruangan selama 2-3 minggu untuk stabilisasi bakteri. Kompos kering kemudian bisa digiling di mesin penghancur untuk mendapatkan ukuran yang homogen.

Yang menonjol dari sistem ASP adalah bahwa jumlah tumpukan kompos dapat ditingkatkan menjadi tidak kurang dari 10 dan masing-masing dialiri udara satu demi satu. Hal ini menyebabkan tidak kurang dari 10 metrik ton kompos diproduksi setiap bulan dan kompos tersebut memenuhi Standar Kompos Thailand. Biaya investasi sistem ini adalah USD 1.160 termasuk (1) blower 15 inci (daya motor 3 hp), seharga USD 580 dan (2) pipa PVC, kabel listrik, dan lainnya, seharga USD 580. Hasil bersihnya tidak kurang dari USD 970 per bulan.

Ketebalan/ketinggian 1.5 m dari tumpukan membantu mengumpulkan panas yang disebabkan oleh reaksi eksotermik yang terkait dengan metabolisme pernafasan mikroba di dalam tumpukan, yang menginduksi aerasi/aliran udara pasif akibat efek Konveksi Cerobong. Selain itu, tumpukan berbentuk prisma segitiga membantu mengurangi zona mati resirkulasi udara di dalam tumpukan. Panas yang tercipta di dalam tumpukan dari aktivitas mikroba juga membantu mempercepat dekomposisi oleh mikroorganisme termofilik dan mesofilik.

Pembuatan Kompos Sistem ASP Di Thailand

Di Thailand, teknologi ini telah digunakan oleh lebih dari 480 kelompok tani di kerajaan ini. Sawangpanyangkura (2005) melaporkan bahwa rasio campuran limbah pertanian dan kotoran sapi dapat disesuaikan dengan volume 3:1 sedangkan tinggi tumpukan bisa 1.5 meter tanpa mempengaruhi kualitas kompos jadi. Komposisi nutrisi kompos yang dihasilkan berada pada kisaran 2.0-3.5, 0.5-1.5, dan 0.5-3.5 masing-masing untuk N, P₂O₅, dan K₂O. Apalagi, telah ditemukan bahwa prosesnya sesuai dengan gaya hidup para petani. Karena tidak ada biaya tenaga kerja yang dibutuhkan, kompos dapat diproduksi hanya dengan USD 32 per metrik ton sedangkan harga jual pasar di Thailand adalah USD 130 per metrik ton. Sebagian besar kompos yang dihasilkan didistribusikan di antara anggota kelompok tani dengan biaya investasi dan telah berdampak sangat signifikan dalam pengurangan penggunaan bahan kimia. Setiap jenis limbah pertanian dapat dimanfaatkan ulang daripada pembakaran yang dapat mencemari udara suatu negara.

Karena sudah menjadi kebiasaan rutin, sebagian besar kelompok tani umumnya melakukan pengomposan setiap bulan. Mereka kebanyakan membuat kompos 6-10 tumpukan dan hasilnya masing-masing 6-10 metrik ton. Limbah pertanian yang biasa digunakan sebagai bahan baku adalah limbah kulit dan tongkol jagung, jerami padi, daun kering, limbah bawang putih, sayuran afkir, serbuk gergaji dari budidaya jamur dan eceng gondok, sedangkan pupuk kandang yang digunakan

Tabel 1 : Standar kualitas kompos (Indonesia)

No	Parameter	Satuan	Minimum	Maksimum
1	Kadar air	%	-	50
2	Temperatur	°C		Suhu air tanah
3	Warna			Kehitaman
4	Bau			Berbau tanah
5	Ukuran partikel	Mm	0.55	25
6	Kemampuan ikat air	%	58	-
7	Ph		6.80	7.49
8	Bahan asing	%	*	1.5
Unsur makro				
9	Bahan organik	%	27	58
10	Nitrogen	%	0.40	-
11	Karbon	%	9.80	32
12	Fosfor (P2O5)	%	0.10	-
13	C/N-rasio		10	20
14	Kalium (K2O)	%	0.20	*

Keterangan: * Nilainya lebih besar dari minimum dan lebih kecil dari maksimum

Sumber: Standar Nasional Indonesia 2004. Spesifikasi kompos dari sampah organik domestik.

adalah kotoran kuda, gajah, ayam, dan sapi. Dengan perkiraan satu kelompok petani dapat menghasilkan kompos hanya 50 persen dari kapasitasnya, maka hasilnya akan menjadi 60 metrik ton kompos per tahun. Dengan demikian, pendapatan yang mendukung dari daur ulang limbah pertanian akan menjadi USD 5.800 per tahun.

KESIMPULAN

Kebutuhan sektor pertanian terhadap kesuburan tanah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa faktor penyebab menurunnya tingkat kesuburan tanah harus dikurangi atau dihambat dan faktor penyebab meningkatnya kesuburan tanah harus terus dikembangkan dengan optimal. Aktifitas pembakaran sisa panen dan penggunaan pupuk sudah seharusnya dapat dikurangi dan kegiatan pembuatan pupuk organik serta penggunaannya harus semakin ditingkatkan sehingga menjadi kebiasaan baru yaitu tingginya kecenderungan petani terhadap penggunaan pupuk organik daripada pupuk kimia.

Pembakaran lahan yang dilakukan terus menerus setiap tahunnya akan melepaskan unsur hara tanah ke udara sehingga tanah menjadi miskin atau mengalami degradasi

lahan. Lahan yang mengalami degradasi ini akan menyebabkan kebutuhan terhadap pupuk kimia yang bersifat instan/cepat diserap (fast release) semakin meningkat setiap waktunya. Peningkatan kebutuhan pupuk kimia ini akan berdampak pada lingkungan yang semakin tercemar serta menurunnya produktifitas dan kualitas hasil panen. Penghematan atau efisiensi pemupukan tidak hanya menjadi keuntungan petani tetapi juga akan menghemat devisa negara.

Sistem Aerated Static Pile (ASP) adalah proses pembuatan kompos alternatif dalam mendaur ulang limbah pertanian dan juga teknologi tepat guna untuk masyarakat lokal di Thailand. Sistem ini dapat memungkinkan lebih banyak lagi kegunaan kompos di daerah yang mengarah pada pengurangan biaya dan penggunaan zat kimia. Hal ini dapat menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih kuat yang merupakan basis utama fokus pembangunan yang berkelanjutan serta pelestarian lingkungan. Selain itu, limbah makanan rumah tangga yang terpisah juga dapat dengan mudah dibuat kompos dan merupakan alat termurah dalam program Pengelolaan Sampah Kota Terpadu di masyarakat.



Mau Jadi Pengusaha Sukses? Yuuuuk Belajar di Wanawiyata Widyakarya!

Oleh : Siwi Tri Utami *Penyuluh Ahli Muda, Pusat Penyuluhan

Jika Anda ingin menjadi pengusaha sukses di bidang kehutanan jangan ragu- ragu untuk belajar di Wanawiyata Widyakarya. Kementerian LHK, Cq Pusat Penyuluhan sejak tahun 2015 memfasilitasi pengembangan wanawiyata di 76 lokasi di seluruh Indonesia. Wanawiyata Widyakarya ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana pembelajaran yang

Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya. Kelompok yang ditetapkan sebagai Wanawiyata Widyakarya adalah KTH yang mempunyai usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang berhasil, telah menjadi percontohan/tempat pembelajaran/praktek/studi banding bagi masyarakat, memiliki SDM sebagai fasilitator dan narasumber, juga memiliki sarana pertemuan serta pemondokan di rumah penduduk.

Wanawiyata widyakarya atau yang dikenal juga dengan LP2UKS (Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kehutanan atau lingkungan hidup dan meningkatkan

kapasitas kelompok masyarakat dalam mengelola kegiatan pelatihan dan magang. Dengan demikian berkembang pula kegiatan usaha masyarakat di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Metode

Proses belajar di wanawiyata widyakarya menggunakan metode magang, sehingga kegiatan praktek mempunyai porsi yang lebih besar dibandingkan dengan teori. Harapannya dengan praktek secara langsung akan terjadi peningkatan keterampilan peserta magang, sehingga setelah selesai magang mereka dapat menerapkan ketrampilan yang telah diperoleh untuk KTHnya. Dalam pelaksanaan magang, pemilihan peserta juga menjadi hal yang penting. Peserta magang sebaiknya adalah KTH yang telah menjalankan usaha di bidang yang sama dengan pemagangan yang akan dilaksanakan. Jumlah peserta dibatasi maksimal 15 orang agar magang berjalan efektif dan efisien.



Peserta magang praktek pembibitan

Mau Belajar Apa? Anda Tinggal Memilih

1. Wanawiyata Widyakarya Margo Rahayu

KUP Margo Rahayu terletak di Desa Grenggeng, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Paket pelatihan di Wanawiyata Widyakarya Margo Rahayu yaitu :

Paket 1 : pelatihan/magang budidaya pandan di bawah tegakan hutan rakyat

Paket 2 : pelatihan dasar pengenalan pandan dan penganyaman pandan. Paket 2 dapat mulai diikuti oleh siswa Sekolah Dasar.

Paket 3 : Pembuatan macam-macam produk jadi kerajinan pandan

Paket 4 : pembuatan desain gambar yaitu, seni dekorasi dengan cara melapisi permukaan media menggunakan kertas khusus decoupage dan kertas tisu bermotif.

Paket 5 : pelatihan edukasi metamorfosis kupu dan pemanfaatan satwa liar dengan penangkaran kupu-kupu

Paket 6 : pelatihan pembibitan, sambung, persilangan lada

Dengan berkembangnya tanaman pandan, sekarang kerajinan anyaman pandan menjadi tumpuan hidup sehari-hari masyarakat Desa Grenggeng. Pandan Grenggeng sudah memiliki pasar di antaranya di Tasikmalaya, Yogyakarta, Bali dan Solo.

2. Wanawiyata Widyakarya Ruwas II

Wanawiyata Widyakarya Ruwas II terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran provinsi Jawa Barat dengan komoditas utama cuka kayu/asap cair. KTH Ruwas II tertarik mengembangkan cuka kayu karena ada manfaat lain dari sisa-sisa tebangan maupun daun-daunan selain sebagai pakan ternak maupun kayu bakar. Cuka kayu juga merupakan salah satu alternatif pemanfaatan limbah dari hasil pembukaan lahan tanpa bakar yang dapat mengurangi pembakaran hutan dan lahan. Selain pembuatan cuka kayu, paket magang yang tersedia di Wanawiyata Widyakarya Ruwas II adalah pembuatan briket arang, tungku hemat energi, briket arang, pembuatan arang kompos, lebah madu, gula semut dan pembibitan.



Alat pembuat cuka kayu

Pada tahun 2016, Pusat Penyuluhan memberikan apresiasi terhadap hasil karya KTH Ruwas II. Apresiasi tersebut berupa pemagangan komoditas cuka kayu di KTH Ruwas II bagi KTH yang mendapatkan fasilitasi Percontohan kebakaran hutan dan lahan serta perwakilan DAOPS di 6 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Jumlah peserta magang sebanyak 15 orang. Beberapa peserta menduplikasi hasil dari pemagangan dengan membuat alat dan memproduksi cuka kayu di DAOPS dan KTHnya.



Pemagangan di wanawiyata widyakarya Ruwas II

3. Wanawiyata Widyakarya Sembodo

KTH Sembodo adalah subkelompok dari pemegang ijin usaha pengelolaan di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mandiri. Subkelompok ini mengelola wisata alam sebagai bagian HKm tersebut yang dikenal dengan wisata alam Kalibiru. Ditetapkan tahun 2015, kini wanawiyata widyakarya Sembodo menjadi rujukan bagi kelompok atau perorangan yang ingin belajar untuk mengembangkan wisata alam. Wanawiyata widyakarya sembodo berlokasi di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY.

Wisata Alam Kalibiru telah terbukti memberikan dampak ekonomi, sosial dan ekologi bagi KTH Sembodo, dan masyarakat sekitarnya. Keberhasilan KTH Sembodo dalam mengelola Wisata Alam Kalibiru merupakan prestasi yang perlu dicontoh oleh KTH lainnya yang memiliki potensi atau yang sudah mengelola wisata alam. Pada tahun 2016 Pusat Penyuluhan memberikan fasilitasi pemagangan Wisata Alam di KTH Sembodo, bagi 16 orang dari KTH di Jawa dan Lampung. Salah satu dampak dari magang wisata alam ini adalah berkembangnya Karang Jahe Beach (KJB) di Rembang. Dengan menerapkan teknik-teknik yang didapat saat magang, kini KJB menjadi obyek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi.



Promosi KJB di media sosial



Spot foto di Wisata Alam Kalibiru

4. Wanawiyata Widyakarya Margo Mulyo

Wanawiyata Widyakarya Margo Mulyo berlokasi di Desa Burno, Lumajang, Jawa Timur. Materi pemagangan yang tersedia yaitu :

- Pola dan tata tanam agroforestry
Peserta magang dapat belajar tentang pola dan tata tanam yg tepat sesuai kemampuan lahan dan pemilihan jenis tanaman yang cocok, meliputi : Agro silviculture, Agro silvopasture, Wanafarma, Farm Forestry.
- Pengelolaan lahan bawah tegakan dengan tanaman kapulogo, kaliandra, tanaman pisang, jagung, talas, singkong dan pengolahan hasil menjadi aneka kripik.
- Beternak sapi perah dan kambing etawa dan pengolahan hasil seperti susu, keju, yoghurt, kefir, kue stick dari susu kambing, aneka permen dan sabun kecantikan.
- Budidayalebah(Aphiscerana)dan pengolahan hasil : madu dan sabun kecantikan
- Eco farming (Bertani Selaras Alam)
Peserta magang dapat belajar tentang teknik bercocok tanam yang secara ekonomi menguntungkan dan ramah lingkungan serta pembuatan pupuk organik dengan bahan

dasar kotoran kambing dengan Formula Tricoderma, yaitu mikroorganisme yang berfungsi sebagai pupuk biologis tanah dan biofungisida.

- Teknologi Bio Gas dengan bahan kotoran sapi
- Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
- Praktek membuat dengan motif alam sekitar
- Kerajinan tangan dengan bahan herbarium : pigura, tempat tissue, album foto
- Pembibitan
- Ekowisata
- Penangkaran anggrek

Wanawiyata Margo Mulyo tidak hanya menjadi tempat magang bagi masyarakat tetapi juga dari instansi pemerintah dan perguruan tinggi yaitu UNEJ Fakultas Pertanian, Dinas Kehutanan Brebes, Mojokerto, BPTH Provinsi Jawa Barat, kabupaten Banjar Kalimantan



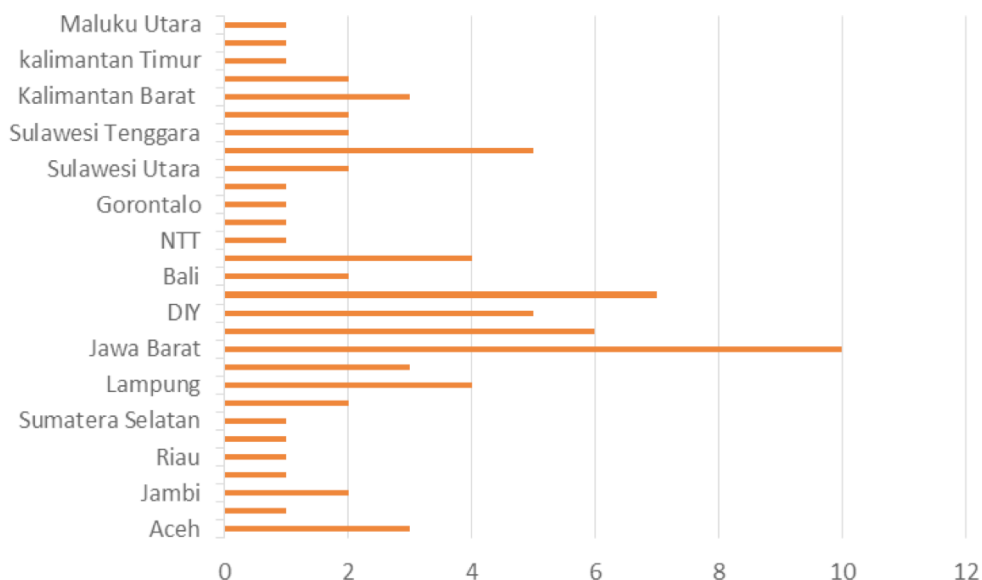
Membatik, salah satu materi magang di Wanawiyata Widyakarya Margo Mulyo

Selatan, KPH Lampung dan Magang SMK Pertanian Bondowoso.

Sebaran Wanawiyata Widyakarya di Indonesia

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa di Indonesia wanawiyata widyakarya sudah hampir terdapat disemua propinsi. Lokasi Wanawiyata Widyakarya diseluruh indonesia beserta komoditasnya secara lengkap dapat diunduh di pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id

Dengan melihat keberhasilan wanawiyata widyakarya dalam menjalankan usaha bidang kehutanan, jangan ragu belajar di wanawiyata widyakarya.





KIPRAH KELOMPOK TANI HUTAN KLANCENG BAROKAH KTH PEMENANG LOMBA WANA LESTARI TAHUN 2018

Oleh : Akhmad Riyadi

*penyuluh kehutanan madya, Pusat Penyuluhan

Kelompok Tani Hutan (KTH) berada di Desa Kapilpoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dibentuk pada tahun 2015 dengan SK Kades Kalipoh Nomor 050/15/III/2015. Terakhir KTH di register Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen No. 33/05/01/KTH.002/2016. Kelompok Tani Hutan Klanceng Barokah dibentuk atas dasar inisiatif masyarakat dengan tujuan mewujudkan Desa Kalipoh yang lestari dan sejahtera. Modal awal untuk kegiatan KTH Klanceng Barokah ini dilakukan secara swadaya kelompok. Adanya beberapa permasalahan kehutanan yang ada di daerah Kalipoh seperti perambahan hutan, penebangan illegal, Kebakaran hutan, erosi, lahan kritis dan kekeringan menambah dorongan masyarakat untuk bersama membentuk suatu kelompok. Harapannya dengan membentuk kelompok memiliki kebersamaan dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk menjadikan desa lingkungan yang asri dan lestari serta masyarakat sejahtera.

KTH Klanceng Barokah diketuai oleh Muhammad Fatihul Umam biasa dipanggil dengan "UMAM" adalah sosok pemuda yang memiliki dedikasi tinggi untuk membangun

kampungnya mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Motivasi dan semangat selalu ditumbuhkan kepada para anggota kelompok dan masyarakat. Tak heran jika anggota KTH Klanceng Barokah ini sebagian besar anggotanya terdiri dari para pemuda desa Kalipoh. Selain itu, anggota KTH Klanceng Barokah juga diminati oleh kaum perempuan dan dalam kelompok telah jumlah kaum perempuan mencapai 26% atau sebanyak 13 orang. Awal terbentuknya KTH Klanceng Barokah memiliki anggota sebanyak 15 orang. Berkat kegigihan dan perjuangan Umam dalam mendorong dan meyakinkan kepada masyarakat, saat ini jumlah anggota mencapai 50 orang. Dalam menjalankan kegiatannya KTH Klanceng Barokah didampingi seorang Penyuluh yaitu Loso Riyanto STP dan Instansi Pembina BPH Wilayah VII Kebumen dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.

Kegiatan KTH Klanceng Barokah

Dalam mendukung pembangunan kehutanan, KTH Klanceng Barokah melakukan beberapa kegiatan bersama masyarakat, antara lain :



Pengkayaan jenis tanaman hutan rakyat sekaligus sebagai sumber pakan lebah klanceng

● **Rehabilitasi Lahan**

dengan melakukan pengkayaan jenis tanaman pada hutan rakyat dengan jenis tanaman seperti albasia, akasia, jati. Luas hutan rakyat yang dikelola oleh KTH Klanceng Barokah seluas 18,35 ha. tanaman perkebunan (cengkeh dan kelapa) sebanyak 2.424 batang, serta tanaman bawah tegakan seluas 4,2 ha tanaman kopi dan sebanyak 1.211 batang tanaman kapulaga dan salak; Penanaman bibit jenis tanaman kayu-kayuan pada lahan kritis. KTH Klanceng Barokah juga bekerjasama dengan LMDH Mitra Wana Bakti Barokah dengan membuat pembibitan Akasia sebanyak 5000 batang; Rehabilitasi alur sungai dengan bangunan gully plug. Kegiatan pembuatan bangunan sipil teknis berupa gully plug menjadi pilihan utama untuk mengatasi sedimentasi alur sungai; Penghijauan lahan pekarangan dengan bibit buah-buahan; Penanaman pohon pelindung mata air.

● **Pengamanan hutan**

peran KTH Klanceng Barokah dalam kegiatan ini antara lain berperan aktif dalam proses penyusunan dan sosialisasi Perdes No. 6 Tahun 2017 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Kalipoh. Perdes ini antara lain mengatur ketentuan untuk melakukan penanaman pohon komersial yang disertai pohon konservasi serta larangan perburuan hewan untuk menjaga keseimbangan alam; Patroli pencegahan kebakaran hutan dan ilegal

logging. KTH Klanceng Barokah menjalin kemitraandenganLMDH Mitra Wana Bakti Barokah dalam mengamankan tegakan hutan akasia di kawasan hutan Perum Perhutani dari kegiatan penebangan liar (illegal logging) dan kebakaran hutan; Pencegahan perambahan hutan dengan budidaya klenceng di pekarangan. Kegiatan budidaya lebah madu klanceng yang dikembangkan oleh KTH Klanceng Barokah memberikan peluang kepada warga desa untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif tanpa bergantung pada ketersediaan lahan; Guna menekan terjadinya tindak pelanggaran terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup KTH bekerja sama dengan Pemerintah Desa Kalipoh melakukan pemasangan papan himbauan/larangan.



Kegiatan pemantauan koloni lebah klanceng berkala secara dibawah tegakan sekaligus merupakan pengamanan kawasan hutan

● **Konservasi**

kegiatan yang dilakukan antara lain : penanaman penanaman tanaman langka seperti aren (*Arenga pinnata*), gayam (*Inocarpus fagifer*) sebagai perlindungan mata air yang berada di wilayahnya yaitu mata air Jayawecana di Dusun Kalikumbang, Mata Air Gumawang di Karangcengis, dan Mata Air Kalisat di Ranceban; Penangkaran tanaman sumber pakan lebah madu klanceng. Jenis-jenis yang dimaksud antara lain: aren (*Arenga pinnata*), kluwih (*Artocarpus camansi*), gayam (*Inocarpus*



Bibit tanaman sumber pakan lebah madu klanceng



Penanaman Aren untuk Pelestarian Mata Air

fagifer), benda (*Artocarpus elasticus*), dan pucung (*Pangium edule*); Pengembangan wisata edukasi klanceng yang dikemas dalam bentuk Kampung Wisata Klanceng; Pelestarian spesies klanceng di Kawasan Karet Gombong Selatan melalui upaya budidaya dan pemanfaatan berkelanjutan koloni klanceng di habitat alaminya; Pengelolaan limbah/sampah, pembuatan pupuk, dan re-use barang bekas. Kegiatan ini sekaligus dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Program Kampung Iklim.

● Pengembangan Usaha

Usaha KTH Klanceng Barokah bermula adalah budidaya lebah klanceng yang menghasilkan produk madu klanceng yang menjadi unggulan. Budidaya lebah madu klanceng dilakukan dengan menempatkan setup dan koloni lebah tidak hanya di lahan milik para anggota dan masyarakat, namun juga dilakukan pada kawasan hutan Perum Perhutani yang ditempatkan di bawah tegakan. Selain itu, penempatan setup dan koloni lebah secara alami dilakukan dengan menempatkan koloni lebah dinding batu cadas sebagai habitat alami. Hal ini menambah keunikan dan sekaligus menambah daya tarik dan kekayaan obyek wisata kampung klanceng yang dikembangkan oleh KTH Klanceng Barokah.

Salah satu usaha yang menarik dan memiliki prospek cukup bagus adalah pengembangan budidaya lebah klanceng yang dikemas sebagai wisata pendidikan yang

diintegrasikan dengan kegiatan wanatani. Selain itu, dikembangkan jenis usaha baru seperti komoditas kopi dan kakao; kegiatan pengkayaan tanaman hortikultura buah-buahan dan tanaman perkebunan; gula kelapa dan gula semut organik.





**“Kampung Klanceng”
dibangun oleh KTH Klanceng Barokah yang merupakan
wisata edukasi bagi masyarakat**

● Dampak Kegiatan

1. Peningkatan Pendapatan KTH

Pendapatan KTH semakin meningkat dari penjualan madu klanceng dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan jumlah koloni lebah madu klanceng.

Tahun 2016 : Produksi Madu 40,45 ltr
= **Rp16.180.000,-**

Tahun 2017 : Produksi Madu 426,95 ltr
= **Rp170.780.000,-**

Tahun 2018 (semester 1): produksi madu 177,2 ltr = **Rp70.880.000,-**

Harga madul per liter sebesar **Rp.400.000**

2. Perkembangan Kelompok Binaan

Keberhasilan KTH ini sudah menginspirasi masyarakat di Desa Pasir untuk membentuk KTH dengan usaha yang serupa yaitu usaha madu klanceng. KTH yang dimaksud adalah Kelompok Tani Hutan Klanceng Kencana yang dibentuk pada tahun 2017 dan saat ini berkat binaan dari KTH Klanceng Barokah sudah mampu menghasilkan produk madu klanceng yang dipasarkan secara mandiri.

3. Perkembangan Kegiatan dan Usaha Sejenis di Luar Kelompok

Usaha ekonomi produktif KTH Klanceng Barokah yang juga dikembangkan oleh kelompok binaan adalah usaha budidaya lebah madu klanceng, penangkaran tanaman pakan lebah klanceng dibawah tegakan dan usaha wisata edukasi lebah klanceng.

4. Berkembangnya nilai sosial masyarakat

Berkembangnya usaha KTH Klanceng Barokah mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan kecintaan terhadap lingkungan; peningkatan budaya gotong royong diantara anggota dan masyarakat. Manfaat lain yang menarik adalah mampu menciptakan lapangan kerja bagi para pemuda desa Kalipoh untuk membangun desa dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

● Prestasi KTH Klanceng barokah

Keberhasilan KTH Klanceng barokah tidak terlepas dari binaan penyuluh pendamping yang terus menerus dan juga dilakukan oleh Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VII , Jawa Tengah. Untuk meningkatkan kapasitas, pengurus dan anggota juga telah diikutsertakan dalam berbagai pelatihan seperti pelatihan perbaikan kualitas lingkungan dan budidaya lebah klanceng. Dalam peningkatan produksi dan pemasaran produk menjalin mitra antara lain dengan BUMDes dan CV Yuan Roasted Coffe.

Upaya dan kerja keras anggota KTH Klanceng Barokah di berbagai kegiatan dalam bidang pembangunan kehutanan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di desa Kalipoh baik langsung maupun tidak langsung dari aspek lingkungan dan sosial ekonomi mengantarkan sebagai juara lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2018. Muhamad Fatihul umam dan kelompoknya merasa bahwa menjadi juara bukanlah tujuan utama. Upaya untuk mengembangkan kelompok secara terus menerus untuk berinovasi dan berkreasi menjadi penting. Sampai saat ini KTH Klanceng Barokah terus berupaya meningkatkan kapasitas pengurus anggotanya baik dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan maupaun kelola usaha. Hal tersebut justru memacu KTH Klanceng Barokah untuk menjadi lebih baik dan berharap bisa menjadi contoh efektif bagi msyarakat untuk menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan usahanya.



“UMAM” Ketua KTH Klanceng Barokah yang penuh dedikasi mengembangkan usaha kelompok

Mengenal lebih Dekat Madu yang Bermutu

Oleh : *Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum. &
**Firmansyah, S.Hut,M.Si.

* Fungsional PEH Madya, Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan

** Penyuluh Ahli Muda, Pusat Penyuluhan



Pendahuluan

Di antara kita pasti sudah mengonsumsi madu yang dikenal mempunyai manfaat dan khasiat untuk pangan dan kesehatan. Namun konsumsi madu masyarakat Indonesia masih rendah, hanya sekitar 40-60 gram per kapita per tahun, jauh dibandingkan negara lain yang rata-rata mencapai satu kilogram per kapita per tahun. Sementara itu pangsa pasar konsumsi madu dalam negeri sebagian juga masih disokong impor yang mencapai 1.500-2.500 ton per tahun.

Untuk menumbuhkan tingkat konsumsi madu masyarakat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelenggarakan gerakan minum madu bersama dengan melibatkan 5.500 orang pada saat Festival Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan Pameran Usaha Kehutanan di Yogyakarta pada 28-29 September 2018.

Untuk meningkatkan komoditas madu sebagai salah satu unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), maka upaya perlebahan ditingkatkan antara lain dengan melibatkan pengelola dan masyarakat sekitar kawasan hutan atau KPH, masyarakat sekitar hutan

dengan program perhutanan sosial misalnya melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) maupun kelompok usaha lainnya. Para petani madu baik hasil dari lebah budidaya (*Apis mellifera*, *Apis cerana*, *Apis* spp., atau *Trigona* spp.) maupun lebah liar (*Apis dorsata*) diharapkan dapat akan terus menghasilkan madu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Namun di sisi lain, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu memproduksi madu dengan menambahkan bahan non madu, sehingga madu tidak terjamin keaslian dan mutunya. Untuk itu masyarakat harus berhati-hati memilih madu yang asli dan bermutu. Sampai saat ini telah banyak informasi atau cara yang belum tentu akurat untuk membuktikan keaslian madu. Namun secara ilmiah, hanya dengan uji laboratoriumlah cara membuktikan keaslian madu antara lain dengan uji enzim diastase yang menjadi salah satu indikator madu asli yang valid bahkan dapat juga mengetahui kualitas madu.

Upaya perlebahan di tingkat petani madu (hasil lebah budidaya maupun lebah liar) perlu terus ditingkatkan kapasitasnya baik pengetahuan maupun ketrampilan dalam



Pohon sialang madu hutan (Sumber foto : Firmansyah PKA Pusat Penyuluhan)

hal pengelolaan madu yang meliputi teknik budidaya, proses panen madu, pengolahan madu pasca panen sehingga dapat dihasilkan madu yang asli dan bermutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 3545:2013 Madu. Adapun pengelolaan madu dari lebah budidaya dan lebah hutan sesuai SNI 7899:2013 Pengelolaan madu sebagai bahan baku. Kedua SNI tersebut saat ini sedang proses revisi oleh Komite Teknis Perumusan SNI Hasil Hutan Bukan Kayu (KT. 65-02 HHBK) pada Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, dengan menggabungkan SNI 3545:2013 dan SNI 7899:2013 agar cakupan standar menyeluruh mulai dari pengelolaan pasca panen sampai dengan penentuan persyaratan kualitas dan diharapkan dapat mengakomodasi lebih luas keragaman mutu berbagai madu yang ada di Indonesia, serta dapat mengakomodasi lebih luas berbagai kepentingan semua pihak terkait.

Sesuai RSNI3 Madu, madu di Indonesia sangat beragam. Keragaman madu tersebut dipengaruhi oleh perbedaan asal daerah, musim, jenis lebah, jenis tanaman sumber nektar, cara hidup lebah (budidaya atau liar), cara pemanenan serta cara penanganan pasca panen. Mengingat keragaman tersebut maka standar madu dikembangkan menjadi tiga kategori yaitu madu hutan, madu budidaya dan madu lebah tanpa sengat atau kelulut (*Trigona* spp.) dengan definisi sebagai berikut:



proses pasca panen madu hutan (Sumber foto : Firmansyah PKA Pusat Penyuluhan)

- A. Madu Hutan** : cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah liar *Apis dorsata* dan atau lebah liar *Apis* spp. dari sari bunga tanaman hutan (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman hutan (ekstra floral)



Penempatan stup madu budidaya (Sumber foto : Firmansyah PKA Pusat Penyuluhan)

B. Madu Budidaya : cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah budidaya *Apis mellifera* atau *Apis cerana* dari sari bunga tanaman (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra floral).

C. Madu Lebah Tanpa Sengat (*Trigona spp.*): cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat (*Trigona spp.*) baik liar maupun budidaya dari sari bunga tanaman (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra floral).



Mengingat referensi berupa buku, pedoman, best practice, hasil penelitian, tulisan ilmiah mengenai teknik budidaya untuk lebah madu budidaya maupun teknik pengambilan madu liar (madu hutan) yang lestari dan berkelanjutan sudah banyak dipublikasi, maka pada tulisan ini kami lebih mengajak untuk mengenal lebih dekat mengenai pengelolaan pasca panen madu dan persyaratan madu yang bermutu sesuai SNI. Selanjutnya kami merujuk pada RSNI3 Madu yang telah dilakukan konsensus dan sudah dipublikasi pada tahap jajak pendapat nasional untuk selanjutnya proses penetapan menjadi SNI.

Pengelolaan pasca panen

Untuk menghasilkan madu yang bermutu, maka pengelolaan pasca panen menjadi hal yang penting diperhatikan oleh petani madu. Sesuai SNI 788:2013 Pengelolaan madu sebagai bahan baku dan RSNI3 Madu,



madu hutan kelulut dan madu hutan liar (Sumber foto : Firmansyah PKA Pusat Penyuluhan)

beberapa cara pengelolaan pasca panen madu hutan, madu budidaya dan madu lebah tanpa sengat sebagai berikut:

A. Peras :

Cara ini digunakan untuk madu lebah tanpa sengat. Madu dikeluarkan dari pot/sarang dengan cara diperas hingga madu keluar.

Alat : ember plastik standar makanan (food grade), jerigen plastik standar makanan (food grade) bertutup, corong plastik berdiameter 20 cm, kain saring (100 mesh) beserta tali karet, pisau stainless steel, sarung tangan plastik sekali pakai.

Prosedur :

- Lepaskan pot/sarang madu dari stup menggunakan pisau stainless steel.
- Pisahkan pot/sarang bee pollen dari pot/sarang madu menggunakan pisau stainless steel.
- Tampung pot/sarang madu (terbebas dari polen dan larva) di dalam ember plastik standar makanan (food grade).
- Peras pot/sarang madu menggunakan tangan (dengan memakai sarung tangan plastik sekali pakai) dan tampung pada ember yang telah dipasang kain saring dan diikat tali karet agar tertutup rapat.
- Tampung madu pada jerigen plastik standar makanan (food grade) melalui corong plastik, selanjutnya tutup rapat jerigen.

B. Sedot :

Cara ini digunakan untuk madu lebah tanpa sengat. Madu dikeluarkan dari pot/sarang dengan cara disedot hingga madu tertampung.

Alat: pinset, alat penyedot madu, corong plastik berdiameter 20 cm, jerigen plastik standar makanan (food grade).



Persiapan panen sedot madu lebah tanpa sengat/ kelulut (Sumber foto : Balai Penyuluhan Kampar)

Prosedur :

- Lubangi pot/sarang madu menggunakan pinset.
- Sedot madu di dalam pot madu menggunakan alat penyedot madu.
- Masukkan madu yang tertampung di dalam alat penyedot madu ke dalam jerigen standar makanan (food grade) melalui corong plastik. Selanjutnya tutup rapat jerigen.



Pengasapan sebelum panen madu hutan (Sumber foto : liputan6.com)

C. Tiris :

Cara ini digunakan untuk madu hutan. Madu dikeluarkan dari sarang dengan cara membiarkan madu menetes dari sarang.

Alat : wadah standar makanan (food grade); ember plastik standar makanan (food grade); jerigen/drum plastik standar makanan (food grade) bertutup; saringan plastik stainless steel standar makanan (food grade) berukuran 100 mesh; pisau stainless steel; korek api.

Prosedur :

- Lakukan pengasapan pada sarang lebah tanpa menggunakan bahan kimia sintetik.
- Potong sarang lebah pada bagian madu dan biarkan sisa sarang lebah yang berisi anakan dan polen.
- Turunkan irisan sarang lebah bagian madu menggunakan wadah standar makanan.
- Bersihkan sarang lebah berisi madu (terbebas dari polen dan larva) dari lilin yang menutupi sel madu dengan cara diiris menggunakan pisau stainless steel, kemudian tampung dalam ember plastik standar makanan (food grade) dan tiriskan hingga madu habis.
- Saring madu dengan menggunakan saringan plastik dan atau stainless steel standar makanan (food grade), kemudian masukkan ke dalam jerigen/drum plastik standar makanan (food grade).

D. Ekstraksi :

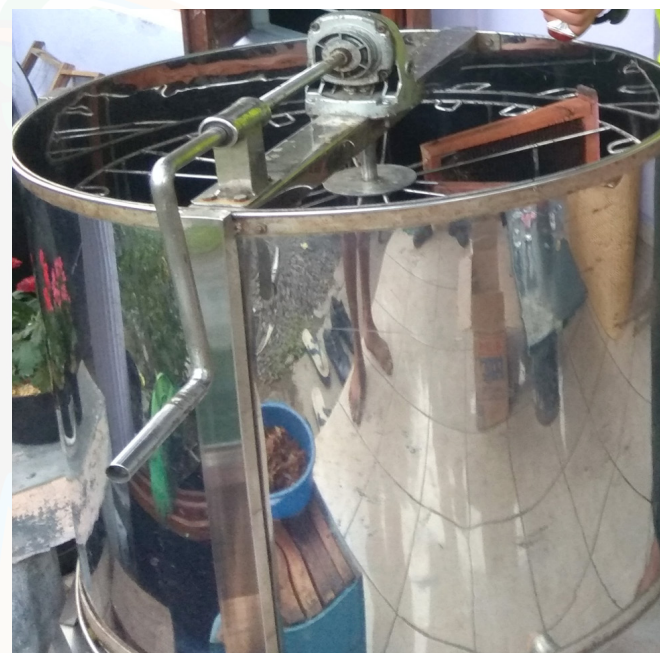
Cara ini digunakan untuk madu budidaya. Madu dikeluarkan dari sarang dengan teknik sentrifugal.

Alat : ekstraktor, drum plastik standar makanan (food grade), kain penyaring (100 mesh), pisau stainless steel, sikat lebah.

Prosedur :

- Bersihkan bingkai sarang lebah dengan menggunakan sikat lebah.
- Sayat sarang berisi madu untuk menghilangkan lilin. penutup madu menggunakan pisau stainless steel, kemudian masukkan ke dalam ekstraktor.

- Putar alat pemutar pada ekstraktor untuk mengeluarkan madu dari sarang.
- Keluarkan madu dari ekstraktor melalui kran dan tampung dalam ember plastik standar makanan (food grade).
- Saring madu menggunakan kain penyaring.
- Masukkan madu yang telah disaring ke dalam drum plastik standar makanan (food grade).



Ekstraktor

(Sumber foto : Firmansyah PKA Pusat Penyuluhan)

Selama proses penanganan pasca panen, penyimpanan dan pengangkutan, madu dihindarkan dari paparan cahaya matahari langsung, panas melebihi 28°C serta udara terbuka. Khusus untuk madu trigona tidak boleh menggunakan peralatan berbahan logam. Dalam menghasilkan madu harus memenuhi juga cara produksi madu yang higienis sesuai dengan prinsip umum hygiene pangan.

No	Jenis uji	Satuan	Madu hutan
A	Uji organoleptik		
1	Bau		Khas madu
2	Rasa		Khas madu
B	Uji laboratoris		
1	Aktivitas enzim diastase	DN	min 3 [*])
2	Hidroksimetilfurfural (HMF)	mg/kg	maks 50
3	Kadar air	% b/b	maks 22
4	Gula pereduksi (dihitung sebagai glukosa)	% b/b	min 65
5	Sukrosa	% b/b	maks 5
6	Keasaman	ml NaOH/kg	maks 50
7	Padatan tak larut dalam air	% b/b	maks 0,5
8	Abu	% b/b	maks 0,5
9	Cemaran logam		
	9.1 Timbal (Pb)	mg/kg	maks 2,0
	9.2 Cadmium (Cd)	mg/kg	maks 0,2
	9.3 Merkuri (Hg)	mg/kg	maks 0,03
10	Cemaran arsen (As)	mg/kg	maks 1,0
11	Kloramfenikol	mg/kg	tidak terdeteksi
12	Cemaran mikroba		
	12.1 Angka lempeng total (ACT)	koloni/g	< 5 x 10 ³
	12.2 Angka paling mungkin (APM) koliform	APM/g	< 3
	12.3 Kapang dan khamir	koloni/g	< 1 x 10 ¹
CATATAN *)Persyaratan ini berdasarkan pengujian setelah madu dipanen			

◀ **Tabel 1**
Persyaratan mutu madu
(sesuai SNI 3545-2013
Madu)

Persyaratan Mutu Madu

Madu yang asli dan bermutu harus memenuhi persyaratan mutu madu sesuai SNI 3545:2013 Madu yang meliputi uji organoleptik dan uji laboratoris sebagaimana Tabel 1.

Pada revisi SNI Madu, disepakati untuk mengubah beberapa persyaratan mutu madu dan disesuaikan dengan jenis madu (madu hutan, madu budidaya dan madu lebah tanpa sengat) dengan berbagai pertimbangan antara lain:

- kadar enzim diastase menjadi parameter mutu sekaligus salah satu indikator madu asli yang valid. Kadar enzim diastase madu lebah tanpa sengat dan madu hutan ditetapkan lebih rendah dibanding madu budidaya sesuai karakter madu tersebut. Madu lebah tanpa sengat mengandung sejumlah enzim dan atau protein lain yang berpotensi dijadikan persyaratan mutu. Di masa depan, enzim lain tersebut dapat dimasukkan sebagai persyaratan mutu.
- Keasaman madu lebah tanpa sengat ditetapkan jauh lebih tinggi dibanding madu lainnya. Berdasarkan data, dijumpai keasaman madu lebah tanpa sengat yang ekstrim tinggi. Namun untuk kepentingan perlindungan konsumen,

persyaratan keasaman madu lebah tanpa sengat ditetapkan dibawah angka ekstrim.

- Cemaran mikroba tidak menjadi persyaratan karena tidak perlu dilakukan uji cemaran mikroba sebagaimana ketentuan Badan POM.

- Hidroksimetilfurfural (HMF) yang merupakan indikator kerusakan gula dalam madu.

Namun beberapa parameter persyaratan mutu yang tetap atau tidak direvisi antara lain :

- Parameter kadar air ditetapkan dengan mempertimbangkan kadar air madu yang baru dipanen dan perlindungan konsumen (keaslian dan mutu madu). Penetapan kadar air tersebut diharapkan tidak memberatkan produsen, namun tetap memberikan perlindungan yang baik kepada konsumen.
- Kloramfenikol harus tidak terdeteksi untuk menjamin tidak adanya kontaminasi antibiotik pada madu.

No	Jenis uji	Satuan	Persyaratan		
			Madu hutan	Madu budidaya	Madu lebah tanpa sengat
A	Uji organoleptik				
1	Bau		Khas madu	Khas madu	Khas madu
2	Rasa		Khas madu	Khas madu	Khas madu
B	Uji laboratoris				
1	Aktivitas enzim diastase	DN	min 1*)	min 3*)	min 1*)
2	Hidroksimetilfurfural (HMF)	mg/kg	maks 40	maks 40	maks 40
3	Kadar air	% b/b	maks 22	maks 22	maks 27,5
4	Gula pereduksi (dihitung sebagai glukosa)	% b/b	min 65	min 65	min 55
5	Sukrosa	% b/b	maks 5	maks 5	maks 5
6	Keasaman	ml NaOH/kg	maks 50	maks 50	maks 200
7	Padatan tak larut dalam air	% b/b	maks 0,5	maks 0,5	maks 0,7
8	Abu	% b/b	maks 0,5	maks 0,5	maks 0,5
9	Cemaran logam				
	9.1 Timbal (Pb)	mg/kg	maks 1,0	maks 1,0	maks 1,0
	9.2 Cadmium (Cd)	mg/kg	maks 0,2	maks 0,2	maks 0,2
	9.3 Merkuri (Hg)	mg/kg	maks 0,03	maks 0,03	maks 0,03
10	Cemaran arsen (As)	mg/kg	maks 1,0	maks 1,0	maks 1,0
11	Kloramfenikol	Mg/kg	tidak terdeteksi	tidak terdeteksi	tidak terdeteksi

CATATAN *) Persyaratan ini berdasarkan pengujian setelah madu dipanen

Tabel 2 - Persyaratan mutu madu (sesuai RSNi3 Madu)

Berikut revisi persyaratan mutu madu sebagaimana Tabel 2. Pengemasan dan penandaan merupakan aspek yang juga perlu mendapat perhatian petani madu untuk tetap menjaga kualitas madu. Madu dikemas dalam wadah standar makanan (food grade) yang tertutup rapat tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Penandaan pada kemasan madu perlu memperhatikan informasi yang harus dicantumkan pada kemasan.

Penutup

Untuk menjamin mutu madu yang dikonsumsi masyarakat, beberapa persyaratan mutu madu yang sangat penting dan menjadi prioritas untuk diterapkan antara lain : kadar air, kloramfenikol, aktivitas enzim diastase dan Hidroksimetilfurfural (HMF). Untuk itu madu yang dihasilkan harus dilakukan pengujian madu di laboratorium pengujian oleh Lembaga Laboratorium yang telah mendapat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan dapat dilanjutkan dengan sertifikasi mutu madu tipe ke3 oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang sudah diakreditasi KAN atau minimal sertifikasi tipe ke-1 yang dapat dilakukan

secara internal oleh Asosiasi Produsen Madu dengan dukungan hasil pengujian laboratorium terakreditasi KAN.

Marilah kita baik penyuluh, petani madu maupun konsumen madu untuk mulai mempopulerkan pentingnya madu yang asli dan bermutu untuk dapat terjaminnya asupan nutrisi madu dan berkhasiat bagi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan dan mensosialisasikan budaya minum madu yang asli dan bermutu kepada masyarakat. Terakhir kami tuliskan sebuah pantun pendek,

**“Jalan-Jalan Ke Raja Ampat,
Jangan Lupa Membeli Kerajinan Bambu
Kalau Saudara Ingin Sehat
Jangan Lupa Minum Madu”.**

Salam Penyuluh Kehutanan



ZAIN ARAFAT

“KTH MAJU ADALAH KEBANGGANKU”

Oleh : Endang Dwi Hastuti

*Penyuluh Ahli Madya, Pusat Penyuluhan

Lahir pada Tahun 1969, Penyuluh kehutanan asal Kalimantan Selatan ini berprestasi sebagai Juara I Tingkat Nasional Lomba Wana Lestari Tahun 2018. Meski demikian menjadi juara bukanlah tujuan utama. Sebagai penyuluh kehutanan Zain senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai kemampuan yang dimilikinya. Bekerja dengan sabar dan ikhlas serta selalu berupaya melakukan yang terbaik adalah kunci utama keberhasilannya. Sesuatu yang membanggakan baginya adalah ketika kelompok tani hutan (KTH) yang dibinanya “maju”.

Pengabdianya menjadi penyuluh kehutanan telah berjalan selama 20 tahun. Saat ini Zain adalah Koordinator Penyuluh Kehutanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, KPH Hulu Sungai. Wilayah kerjanya meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Batung, Loksado dan Telaga Langsat. Total luas hutan di tiga kecamatan tersebut adalah : Hutan Lindung 23.924,13 Ha, Hutan Produksi 12.017,15 Ha, serta Cagar Alam 240,44 Ha. Wilayah kerja tersebut berpotensi terhadap permasalahan illegal logging, perambahan hutan, perdagangan flora fauna, lahan kritis dan kebakaran hutan, sehingga asas kelestarian merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penyuluhan.

Tak kenal lelah dan senantiasa ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan kelestarian hutan, penyuluh kehutanan ini setiap hari menempuh medan yang cukup

berat menuju ke desa binaannya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor trail. Zain selalu aktif melakukan kunjungan ke KTH maupun masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang ada dipegunungan Meratus sebagai wilayah kerjanya.



Wilayah kerja yang terjal dan berbukit



Produksi tusuk sate

KTH Kuat, Masyarakat Sejahtera

Zain membina 9 KTH. Menurut Zain tugas penyuluh adalah mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hal pengetahuan, ketrampilan serta usahanya melalui pendampingan. Disamping itu penyuluh juga berperan sebagai perantara untuk menyampaikan kebijakan pemerintah agar dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pembinaan terhadap KTH di wilayah binaan diarahkan untuk menguatkan kelembagaan kelompok agar menjadi KTH yang mandiri dan berkelanjutan melalui pendampingan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. KTH binaannya mempunyai berbagai usaha kehutanan dari hulu sampai hilir. Kegiatan pembibitan sampai pemanfaatan hasil hutan kayu maupun bukan kayu (HHBK). Hasil usaha kelompok telah dirasakan manfaatnya dalam peningkatan pendapatan kelompok maupun anggotanya. Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi Zain sebagai penyuluh pendampingnya.

Produksi Tusuk Sate

Kegiatan usaha ini dilakukan oleh KTH Lestari Pariangan. Rata-rata produksi tusuk sate 16 kg/hari, dengan harga jual **Rp. 15.000**

Biaya produksi dan pemeliharaan sebesar **Rp. 2000/kg.**

biaya bahan baku 6 btg
6 x Rp. 6000 = Rp. 36.000

maka pendapatan kelompok per hari dari usaha ini adalah

Rp. 240.000 – Rp. 32.000 – Rp.36.000
= Rp. 172.000 / 2 orang atau Rp.86.000

Banyak Pembeli datang langsung datang ke sekretariat KTH Lestari Pariangan untuk membeli tusuk sate.

Budidaya Kelulut

Budidaya Kelulut atau Trigona merupakan kegiatan usaha yang sangat menarik bagi kelompok karena lebah mudah diperoleh dan proses produksinya tidak sulit. Disamping itu madu kelulut dapat menembus pasar dengan harga yang menarik. Beberapa kelompok telah berhasil dalam budidaya kelulut, yaitu KTH Lestari Pariangan, KTH Simpai Alam dan KTH Bersama. KTH Simpai Alam membudidayakan kelulut sebanyak 100 log dengan rata-rata produksi **75 ml/log/bulan, atau 7,5 liter.**

Harga jual **Rp. 300.000 / liter**

maka pendapatan kelompok dari usaha ini adalah **Rp. 2.250.000 / bulan.**

Sedangkan KTH Bersama, memiliki stup sebanyak 250 yang tersebar pada masing – masing anggota dengan total harga jual sebesar **Rp. 75.000.000,-**



Madu Kelulut siap di pasarkan



Pohon Induk Gaharu

Pengembangan Hutan Rakyat Sengon

Sengon merupakan salah satu tanaman kehutanan yang mudah tumbuh dan kayunya merupakan salah satu unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa KTH binaan Zain telah mengembangkan Hutan Rakyat Sengon. Saat ini telah dibangun seluas 60 Ha tanaman sengon. Harga jual kayu sengon cukup menarik. Sebagai contoh, kayu sengon hasil dari hutan rakyat KTH Lestari Pariangan dipasarkan kepada industri pengolahan kayu dengan harga Rp. 500.000 s/d Rp. 700.000/ m³.



Pengembangan Hutan Rakyat Gaharu

Hutan Rakyat Gaharu dikembangkan oleh KTH Simpai Alam seluas 40 Ha dengan diameter berkisar antara 15 sd 20 cm. Pada tahun 2015 sudah dilakukan inokulasi pada 400 tanaman Gaharu bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi Bogor. Hasilnya menunjukkan sudah terbentuk gaharu namun belum mencapai kelas atau grade yang maksimal.

Gaharu yang pernah dihasilkan adalah grade AB dengan harga jual Rp. 4.000.000/kg. Selain itu kelompok juga melestarikan Pohon Induk Gaharu. Saat ini kelompok memiliki 9 pohon induk gaharu, salah satu diantaranya telah ditawarkan seharga Rp. 150.000.000 namun kelompok tetap mempertahankannya sebagai pohon induk. Selain pengembangan hutan rakyat gaharu, KTH Simpai Alam juga

Kerajinan Bambu

mengembangkan usaha persemaian bibit jengkol, gaharu dan sengon, pembuatan pupuk organik serta dekomposer (Mikro Organisme Lokal/MOL) dan budidaya Kelulut. Usaha lainnya adalah produksi kursi bambu. Namun saat ini produksi kursi bambu masih dibuat berdasarkan pesanan saja.



Pupuk organik merek Bio Top



Alat penurun kadar air madu

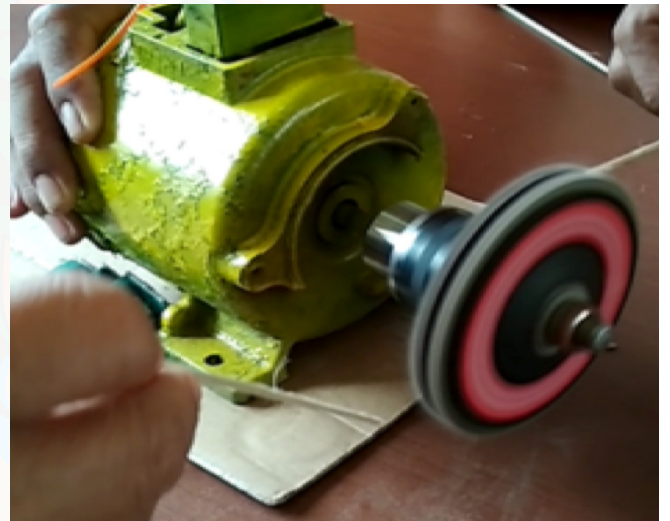
Pembuatan Pupuk Organik

Pupuk organik produksi KTH Simpai Alam dipasarkan dengan merk dagang Bio Top dengan kapasitas produksi sebesar 5 – 7 Ton per bulan. Pemasaran produk ini sudah sampai kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Tengah, harga jual sebesar Rp. 2.500 / kg.

Sosok Aktif dan Inovatif

Sebagai pendamping, Zain adalah sosok yang aktif. Selain membina KTH, Zain juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti penanaman bersama masyarakat dan menjadi narasumber pada berbagai pelatihan. Penyuluh ini juga aktif dalam membangun jejaring kerja dengan instansi lain dalam upaya pengembangan dan sosialisasi kegiatan pembangunan kehutanan.

Zain juga sosok yang inovatif. Ia menciptakan peralatan yang mendukung kegiatan usaha kelompok, seperti : Alat peruncing tusuk sate, Alat penurun kadar air madu, Alat penyedot madu trigona, Pembuatan pupuk organik serta budidaya kelulut dengan toping.



Alat Peruncing Tusuk Sate



Alat penyedot madu kelulut sederhana

Dampak Kegiatan

Kerja keras Zain dalam membina masyarakat telah memberikan dampak baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Secara umum lahan kritis berupa padang alang-alang sudah sangat berkurang. Sepuluh tahun lalu di wilayah Kecamatan Padang Batung, Loksado dan Telaga Langsar masih banyak padang alang-alang yang luas hamparannya lebih dari 25 Ha. Saat ini pada wilayah tersebut sudah jarang ditemukan padang alang-alang dengan hamparan lebih dari 5 Ha.

Dampak lainnya adalah telah berkembangnya kegiatan pembangunan kehutanan yang dilakukan masyarakat secara perorangan maupun kelompok baik di dalam maupun wilayah kerjanya. Saat ini masyarakat telah banyak yang membudidayakan kelulut dan memanfaatkan lahan pekarangan mereka dengan menanam tanaman MPTS. Selain itu telah berkembang pula diversifikasi produk pengolahan bambu, yang semula hanya dijual dalam bentuk batangan bambu, sekarang sudah berkembang dalam bentuk lain seperti tusuk sate dan meubel bambu. Minat masyarakat secara perorangan maupun kelompok dalam mengembangkan tanaman kehutanan meningkat. Sengon, gaharu, dan lain - lain banyak ditanam masyarakat sehingga suplai bahan baku pertukangan dari kayu sengon terus tersedia.

Perekonomian anggota KTH yang mengolah pupuk kompos, budidaya gaharu, pembibitan, pengolahan tusuk sate dan lain - lain juga telah meningkat. Dari sisi sosial, Peladangan berpindah sudah banyak ditinggalkan masyarakat menjadi petani menetap. Dalam lima tahun terakhir masyarakat lebih berminat mengembangkan komoditi kehutanan dengan mengembangkan pohon berkayu seperti sengon dan jabon, tanaman MPTS dan HHBK khususnya bambu dan madu.

Prestasi

Bagi Zain, menjadi juara bukanlah merupakan tujuan utama. Namun kerja keras penyuluh kehutanan ini telah berbuah prestasi dibidang kehutanan maupun di luar bidang kehutanan. Juara Nasional I Lomba Wana Lestari untuk kategori penyuluh kehutanan diperolehnya pada tahun 2018. Pada tahun 2012 Zain meraih Juara II Nasional Asah Terampil ORARI dan sebagai Juara Tingkat Provinsi pada tahun 2014. Disamping itu, kelompok binaannya yaitu KTH SIMPAI ALAM merupakan Juara Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Tahun 2016. Semoga prestasi yang telah diperolehnya dapat lebih memotivasi diri maupun kelompoknya untuk terus maju dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya dan melestarikan sumberdaya hutan.

“Kegagalan dan kesuksesan seseorang tergantung dia sendiri dalam menyingkapinya, hanya semangat dan pantang menyerah kuncinya”

-Eli Sugianto-

Telah Bergabung di FORESTAMART

Kluster

Bibit dan Benih	Fashion	Hasil Hutan Bukan Kayu - HHBK
Jasa Lingkungan	Kerajinan	Kesehatan

FORESTAMART.COM : KENAPA TIDAK?

Oleh: Eli Sugianto

*Penyuluh Kehutanan Muda, Pusat Penyuluhan

Potensi industri e-commerce di Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari data analisis Ernst & Young, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Tak hanya sekedar untuk mencari informasi dan chatting, masyarakat di kota-kota besar kini menjadikan internet terlebih lagi e-commerce sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa e-commerce di Indonesia akan terus berkembang. Berbicara mengenai industri ini memang tidak semata membicarakan jual beli barang dan jasa via internet, tetapi ada industri lain yang terhubung di dalamnya seperti penyediaan jasa layanan antar atau logistik, provider telekomunikasi, produsen perangkat pintar, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat industri e-commerce harus dikawal agar mampu mendorong laju perekonomian nasional.

Usaha Produktif Kelompok Tani

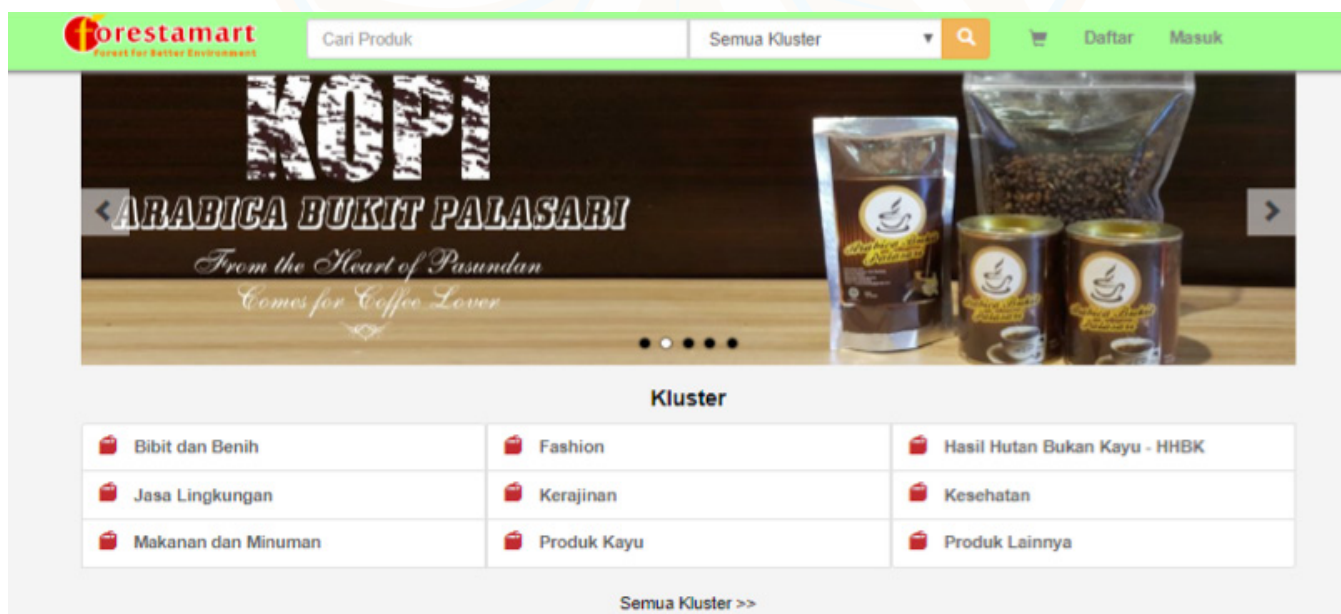
Produk hasil usaha kelompok tani sangat beragam terutama hasil hutan bukan kayu, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pemasaran hasil produk tersebut. Produksi bertambah tanpa diimbangi dengan pemasaran produk menyebabkan usaha kelompok tani tidak dapat berkembang bahkan bisa gulung tikar. Saat perkembangan teknologi semakin maju dan semuanya bisa dilakukan dengan jari tangan, kenapa kita tidak memanfaatkan teknologi tersebut untuk memasarkan produk secara online. Pemasaran produk secara online jangkauannya sangat luas dan dapat diakses oleh pembeli kapan saja. Saat ini banyak market place yang menawarkan untuk membuka toko online secara gratis, misalnya: Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Elevenia, JD.id dll. Adapun salah satu market place yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan adalah forestmart.com



Contoh market place tokopedia.com

Apa sih forestmart.com?

forestmart.com adalah aplikasi pemasaran online yang diluncurkan oleh Pusat Penyuluhan pada tahun 2016. Aplikasi ini bertujuan untuk memfasilitasi kelompok tani hutan dalam mempromosikan dan memasarkan produksi secara online untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hasil produksi kelompok tani sebenarnya tidak kalah saing dengan produk yang sudah ada dipasaran, hanya saja belum semua produk tersebut dikenal oleh masyarakat secara umum, padahal produknya berkualitas. Promosi dan pemasaran produk inilah yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota kelompok tani hutan. Kerja keras penyuluh kehutanan dalam melakukan pendampingan ke kelompok sudah membuahkan hasil dengan munculnya produk-produk bermutu hasil produksi kelompok tani hutan. Adapun produk-produk yang sudah dijual di forestmart.com antara lain: kopi, gula aren semut, madu trigona, bibit tanaman, teh daun gaharu, olahan jamur tiram, dll. Tidak dipungkiri lagi seiring dengan gaya hidup masyarakat masa kini yang serba instan dan didukung perkembangan teknologi informasi, alangkah baiknya segera memanfaatkan peluang ini sebagai media pemasaran produk kelompok tani secara online. Ayo kita mulai kalau bisa di jual online kenapa tidak?



Website forestmart.com

Bagaimana memasarkan produk melalui forestamart.com

KTH yang akan membuka **forestamart.com** syaratnya sangat mudah dan simpel, minimal ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Akses internet yang memadai
2. Ketersediaan agen kurir disekitar tempat tinggal, misal : Pos Indonesia, J&T, Wahana, JNE, TIKI
3. Smartphone/laptop/komputer
4. Foto dan deskripsi produk yang akan dijual

Apakah syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi? Bila sudah silahkan dilanjutkan untuk mulai jualan online di **forestamart.com**

Gimana sih proses jualan di forestamart.com?

Tahapan yang harus dilalui apabila kelompok tani hutan sebagai penjual antara lain:

1. Buka website forestamart (<http://forestamart.com>)
2. Mengisi formulir pendaftaran (nama, alamat rumah, alamat email, no HP, tanggal lahir, jenis kelamin dan password), selanjutnya klik daftar akun.
3. Setelah akun Anda terdaftar dan menjadi penjual/membuka toko online. Silahkan membuat nama toko, alamat pengiriman, memilih kurir pengiriman dan memasukan nomor rekening Anda.

4. Selanjutnya unggah produk yang akan dijual dengan mengisi:

- Nama produk yang mudah dicari oleh pembeli.
- Mengunggah foto produk (maximal 5 foto dari berbagai sisi agar menarik).
- Mengisi berat produk (gram).
- Mengelompokkan jenis produk (misal : makanan dan minuman, peralatan dapur dll).
- Membuat etalase produk dan memasukan produk tersebut ke dalam etalase (misal: etalase peralatan dapur).
- Membuat deskripsi produk dengan jelas.
- Klik simpan produk.

Apabila semua semua tahapan telah dilalui selanjutnya selamat berjualan di forestamart.com semoga dengan adanya aplikasi ini dapat membantu promosi dan pemasaran produk kelompok tani sehingga tercipta hutan lestari masyarakat sejahtera.





BERDAYA BERKAT USAHA KTH

Oleh : Murtado

*Penyuluh Kehutanan Madya, Pusat Penyuluhan

Koperasi Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan upaya untuk menumbuhkembangkan usaha yang dijalankan oleh KTH yang bertujuan mensejahterakan anggota dan masyarakat di sekitar hutan. Dengan adanya pembentukan dan pengembangan kelembagaan ekonomi dalam bentuk Koperasi KTH yang baik, diharapkan akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses informasi, modal, teknologi dan pemasaran maupun kemitraan. Melalui Koperasi KTH, diharapkan akan tumbuh dan berkembang KTH yang memiliki daya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Koperasi selalu mengedepankan prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Koperasi juga selalu mengedepankan sifat keterbukaan, dan demokratis serta koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pembentukan Koperasi KTH merupakan salah satu kepedulian pemerintah dalam hal ini melalui Pusat Penyuluhan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan usaha KTH. Pembentukan koperasi KTH

dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat anggota koperasi. Selain itu juga memudahkan untuk melakukan fasilitasi dan/atau pembinaan guna mendukung pengembangan usaha KTH. Untuk mengetahui hasil kegiatan fasilitasi pembentukan koperasi KTH yang sudah dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi. Untuk memberikan gambaran kesuksesan usaha kelompok tani hutan, berikut disampaikan beberapa usaha Koperasi KTH.

1. Koperasi KTH Margo Rahayu.

Koperasi KTH "Margo Rahayu" beralamat di RT 05 RW 06 Setanakunci, Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Ketua Koperasi KTH Margo Rahayu adalah Ibu MUZAYANAH beranggotakan 56 orang, berbadan hukum dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor :518.08/157/BH/XIV.12/X/2015. Jenis usaha yang dikembangkan berupa simpan pinjam dan pembuatan kerajinan anyaman pandan setengah jadi (complong) serta kerajinan pandan menjadi produk jadi. Sejak Tahun 60-an Desa Grenggeng menjadi penghasil kerajinan anyaman pandan, berupa produk



Pengurus Koperasi KTH “Margo Rahayu” Desa Grenggeng.

setengah jadi anyaman pandan (complong). Hingga saat ini kerajinan anyaman pandan merupakan tumpuan hidup sehari-hari masyarakat Desa Grenggeng.

Bahan baku pembuatan anyaman daun pandan mudah di dapat karena semua anggota Koperasi KTH “Margo Rahayu” menanam Pandan dengan Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan. Penanaman pandan di bawah tegakan tanaman jati, sengon, acassia mangium. Jarak tanam 1 x 1 Meter dan hanya di tanam sekali dapat di panen berkali kali.

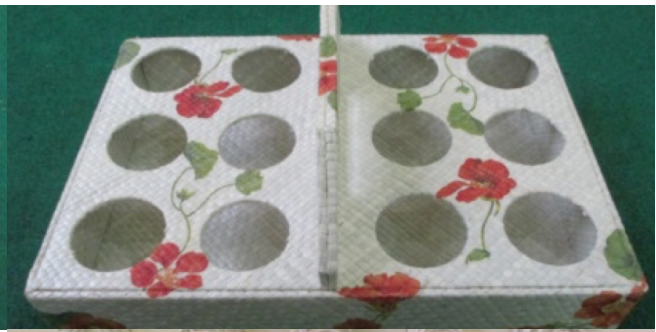


Jumlah produksi anyaman pandan rata-rata per bulan 100 buah. Jika para pihak yang berkepentingan baik perorangan, kelompok maupun institusi membutuhkan produk dalam jumlah banyak koperasi KTH mampu memproduksi sesuai pesanan (>150 buah)



Tanaman Pandan dan Hasil Panen Daun Pandan.

Permodalan Koperasi KTH “Margo Rahayu” berasal dari iuran anggota sesuai semboyan koperasi “Dari kita, Oleh kita, Untuk kita”. Pengumpulan modal melalui iuran pokok sebesar Rp 25.000,- sebagai syarat masuk menjadi anggota koperasi dan iuran wajib Rp 5.000,- setiap bulan per anggota. Kondisi Kas Koperasi KTH “Margo Rahayu” sampai dengan laporan Triwulan II (April, Mei, Juni) Tahun 2018 berjumlah Rp19.724.000,=



Dampak kegiatan Koperasi KTH “Margo Rahayu” antara lain:

- Anggota dan warga sekitar meningkat semangatnya karena koperasi membeli produk comblong lebih tinggi harganya dibanding pengepul.
- Meningkatkan daya kreativitas anggota dalam membuat motif suatu produk.
- Keberadaan Koperasi KTH “Margo Rahayu” dapat membuka lapangan kerja baru, karena sudah memiliki bengkel pembuatan Tas.
- Koperasi KTH “Margo Rahayu” sudah sebagai tempat Studi banding dari kelompok lainnya (Kab. Pematang, Kab. Kulonprogo).
- Koperasi KTH “Margo Rahayu” menjadi kunjungan Pelajar mulai SD, SMP, SMA dan mahasiswa dalam rangka penelitian.
- Koperasi KTH Margo Rahayu mendapat dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kebumen. Bentuk dukungan berupa pelatihan tata kelola Ekspor, Pelatihan Manajemen Koperasi, Pelatihan Desain Produk Jadi (Tas, box tisu, tempat aqua, dompet dll).



**Aneka produk anyaman pandan
(Tas, Sandal, Tempat Tisu)**

Dukungan dari Kepala Desa dan BPD Desa Grenggeng antara lain: Pada Tahun 2017 membantu Alat Tulis Kantor (ATK) untuk administrasi Koperasi KTH “Margo Rahayu”. Tahun 2018 bantuan berupa Rak Pameran produk-produk jadi anyaman pandan dan Kursi Tunggu untuk tamu. Tahun 2019 Koperasi KTH “Margo Rahayu” mengusulkan Sumur Bor untuk



Bengkel pembuatan Tas dan Pelatihan pembuatan anyaman pandan

keperluan anggota terutama musim kemarau, dana tersebut bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD). Hal ini berkat kegigihan Ketua Koperasi KTH "Margo Rahayu" (Ibu Muzayanah) yang selalu aktif dalam mengusulkan kegiatan Koperasi pada acara MUSRENBANGDES setiap tahunnya.

Bank BRI, Bank Jateng, Bank Mandiri serta kemitraan dengan PT. Telkom Indonesia bidang permodalan dapat dilanjutkan.

Pemasaran produk jadi sudah dilakukan melalui pameran maupun online. Pemasaran produk jadi berupa tas, sandal, tempat tisu, dll masih lingkup Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Sedangkan pemasaran melalui online (Facebook, Instagram, WA) sudah masuk ke Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan Kab. Sleman Prov. DIY.



Permasalahan yang dihadapi Koperasi KTH Margo Rahayu antara lain: masih adanya kredit macet (angsuran dari anggota tidak lancar), anggota kadang tidak mengikuti motif atau warna yang diminta konsumen, dan sering ada pesanan yang mendadak sehingga perlu komitmen semua anggota koperasi agar mampu menyiapkan produk tepat waktu.



Harapan anggota Koperasi KTH ke depan agar BUMDES yang ada di Desa Grenggeng dan desa sekitarnya mampu menampung dan memasarkan hasil-hasil Produknya. Demikian juga dukungan lembaga keuangan antara lain

Aneka Produk Tas dari Koperasi KTH "Margo Rahayu"



Pengurus Koperasi KTH “Wana Lestari”

2. Koperasi KTH “Wana Lestari”

Koperasi KTH “Wana Lestari” beralamat di Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Legalitas Koperasi KTH “Wana Lestari” melalui Akta Notaris Sugiyanto, SH Nomor: 25 Tanggal 26 November 2016 di Pati dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Deputi Bidang Kelembagaan Nomor: 002903/BH/M.KUKM.2/XII/2016, Tanggal 18 Desember 2016. Ketua Koperasi KTH “Wana Lestari” adalah Ngarjono, sekretaris Juwedi, bendahara Waharto, pengawas koperasi Ketua: Tasrip, dengan jumlah anggota 33 orang, dan Penyuluh Kehutanan pendamping Koperasi KTH Sri Hastuti, SP (HP: 0813. 9134. 0269).

Jumlah anggota Koperasi KTH “Wana Lestari” saat ini telah mencapai 33 orang dimana pada awal mula dibentuk beranggotakan 25 orang. Meningkatnya jumlah anggota yang masuk menjadi anggota koperasi karena mereka telah melihat kinerja pengurus, baik dalam kegiatan usaha tani, mencari dan menyebarkan informasi kepada anggota, penyaluran saprodi serta pengembangan modalnya. Usaha Koperasi KTH “Wana Lestari” antara lain:

- Pembuatan pupuk bokashi yang merupakan usaha awal Koperasi KTH “Wana Lestari”, kegiatan ini sangat membantu keuangan koperasi. Pada awal pembuatannya

produksi yang mampu dibuat dan diserap oleh masyarakat ataupun petani 5 ton/bulan. Dengan adanya program Desa Organik dan meningkatnya kebutuhan masyarakat sehingga kebutuhan pupuk Bokashi mencapai 10 Ton /bulan. Jumlah ini akan meningkat pada saat menjelang musim pemupukan tiba, bisa mencapai 15 ton/bulan. Pembuatan Pupuk Bokashi dilakukan di Rumah Kompos yang dimiliki oleh koperasi. Dari usaha pembuatan pupuk ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 7 orang

- Sewa alat prosesing kopi mulai dari Pulper, Huller, Rosting, dan Grender. Alat tersebut mengolah kopi mulai mengupas biji sampai menjadi bubuk kopi. Harga alat-alat tersebut sekitar Rp 25.000.000,- dengan cara patungan anggota koperasi. Alat ini disewakan ke anggota dan masyarakat sekitar baik yang datang ke rumah produksi koperasi atau panggilan ke rumah, alat tersebut di operasikan oleh 2 orang.
- Penjualan kopi bubuk merk “PANGONAN” dengan beberapa jenis Varian antara lain: Kopi Sehat Fullwashed (Medium dan medium to Dark); Kopi Sehat Natural (Medium dan Medium To dark); Kopi non organik fullwashed dan non organik natural.
- Simpan pinjam untuk membantu kebutuhan keuangan bagi anggotanya. Karena keterbatasan modal saat ini koperasi belum bisa melakukan peminjaman uang diluar



Alat jasa penyewaan processing kopi dan molen.

anggota. Dana yang disimpan pinjamkan ke anggota merupakan dana dari simpanan pokok Rp100.000,-/anggota dan simpanan wajib Rp 5.000,-/anggota/bulan.

- Jasa sewa alat molen yaitu alat untuk membuat adonan cor bangunan. Walaupun Koperasi KTH “Wana Lestari” merupakan koperasi KTH akan tetapi koperasi juga melakukan usaha diluar bidang kehutanan, karena persewaan alat ini prospeknya sangat menjanjikan. Dari hasil iuran anggotanya koperasi bisa membeli alat molen 2 unit. Dalam pengoperasiannya disewakan ke masyarakat sekitar ataupun masyarakat desa tetangga.



Dampak dengan adanya kegiatan Koperasi KTH “Wana Lestari” yaitu penyerapan tenaga kerja berjumlah 14 orang untuk pembuatan pupuk bokashi, jasa processing kopi, jasa sewa alat molen. Jumlah tenaga kerja tersebut belum termasuk pengurus, tenaga musiman dan tenaga pemasaran kopi.

Aset yang dimiliki oleh Koperasi KTH “Wana Lestari” antara lain: alat prosesing pupuk bokashi, alat prosesing kopi, alat molen, rumah kompos, sapi 6 ekor, kambing 50 ekor, traktor, dan dana untuk simpan pinjam Rp 5.000.000,- Melalui pemberdayaan Koperasi KTH dalam menumbuhkan usaha dapat meningkatkan produksi dan pendapatan anggota.



Produksi Kopi Merk “Pangonan” dan Budidaya Kambing.



SEKOLAH LAPANG, TERBUKTI BERMANFAAT NYATA BAGI MASYARAKAT

Oleh: Nden Rissa Hadikusumah, S.Si

*Penyuluh Ahli Muda, Pusat Penyuluhan

Apa itu sekolah lapang? Kebanyakan orang berpendapat bahwa Sekolah lapang itu hanya memindahkan kegiatan belajar mengajar ke lapangan. Apa itu benar? mari kita mencari tahu .

Metode sekolah lapang (SL) merupakan metode penyuluhan yang bisa dikatakan baru di bidang kehutanan. Sekolah Lapang yang dikenal juga dengan ciri khusus “Sekolah tanpa dinding” memiliki pengertian terbuka dan tidak kaku. Pembelajaran dilakukan secara partisipatif, dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menetapkan materi pembelajaran khusus yang berkaitan dengan permasalahan nyata yang dihadapinya di lapangan. Proses pembelajaran Sekolah Lapang didasarkan pada Pendidikan Orang Dewasa (POD) yang dikemas dalam metode pembelajaran yang praktis, sistematis dan menarik (tidak kaku). Sekolah Lapang dirancang sedemikian rupa sehingga kesempatan belajar petani terbuka selebar-lebarnya agar para petani berinteraksi dengan realita mereka secara langsung, serta menemukan sendiri ilmu dan prinsip yang terkandung di dalamnya.

Prinsip-Prinsip sekolah lapang yang tidak dimiliki metode penyuluhan lain yaitu:

- Proses belajar pada siklus belajar lewat “pengalaman”;
- Kurikulum belajar terpadu dengan kebutuhan dan sesuai dengan kompetensi masyarakat;
- Sarana belajar utama adalah realitas alam dan terkait aktivitas masyarakat;
- Waktu belajar sesuai dengan satu periode pengelolaan usaha secara berkala;
- Metode belajar praktis dengan satu periode dan terjangkau masyarakat setempat;
- Menggunakan metode belajar Pendidikan Orang Dewasa (andragogi), tidak ada “guru”, yang ada “fasilitator” sebagai pendamping yang membantu melancarkan proses belajar;
- Pembahasan topik-topik tematik yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.



Siklus Belajar Lewat Pengalaman (Experience Learning Cycle)

Secara garis besar, siklus belajar dalam metode sekolah lapang yaitu:

- **Mengalami/Melakukan :**
Peserta sekolah lapang mencoba mengamati kegiatan pengolahan lahan yang merupakan aktivitas mereka sehari-harinya
- **Mengungkapkan :**
Peserta sekolah lapang menggambarkan ekosistem yang ada.
- **Menganalisa :**
Peserta berdiskusi bersama tentang topik yang dibahas dan mencoba menganalisisnya.
- **Menyimpulkan :**
Peserta memutuskan tindakan yang perlu dilakukan dari hasil pembahasan.
- **Menerapkan :**
Peserta melakukan dan menerapkan ilmu yang diperoleh di lahan belajar dan lahan sendiri.

Tahapan sekolah lapang sebagai berikut:

- **Persiapan :**
Pada tahap persiapan ini dilakukan (a) Pemilihan lokasi sesuai dengan tema kegiatan; (b) Sosialisasi/Pertemuan; (c) Pelatihan Pemandu SL; (d) Penetapan Peserta.
- **Perencanaan:**
Dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan berkaitan dengan tema Sekolah Lapang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, peserta didampingi pemandu menetapkan bersama materi dan kurikulum sekolah lapang.
- **Pelaksanaan sekolah lapang :**
Pelaksanaan kegiatan sekolah lapang umumnya dilaksanakan selama 10 – 14 kali pertemuan, disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta. SL menggunakan berbagai metode pembelajaran sesuai dalam kebutuhan peserta meliputi: (1) Pertemuan Kelompok; (2) Studi Banding dan Magang; (3) Hari Temu Lapangan (Field Day). Pada pertemuan kelompok dilakukan kegiatan (a) Pengamatan dan Pengambilan Data Di Lapangan; (b) Diskusi Analisa Kondisi dan Pengambilan Keputusan; (c) Presentasi Hasil Diskusi dan Perumusan; (d) Dinamika Kelompok; (e) Pembahasan topik-topik tematik; dan (f) Praktek
- **Pengembangan sekolah lapang :**
Program sekolah lapang biasanya terbatas, untuk keberlanjutan dan pengembangannya menjadi kelembagaan yang mandiri dan dinamis perlu: (1) Penguatan Kelembagaan Desa; dan (2) Penguatan Jejaring Kerja/ Kemitraan.
- **Monitoring dan Evaluasi :**
Perlu ditetapkan instrumen untuk mengukur keberhasilan kegiatan sekolah lapang.

Saat ini, sekolah lapang menjadi salah satu metode penyuluhan yang dikembangkan Pusat Penyuluhan dan telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Contoh nyata diantaranya sekolah lapang pengelolaan lebah madu kerjasama antara BP2SDM KLHK dengan Food and Agriculture Organization (FAO) serta sekolah lapang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kerjasama BP2SDM KLHK dengan Norwegia melalui Kemitraan.

Sekolah Lapang Pengelolaan Lebah Madu

Sekolah lapang lebah madu Trigona dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2018 di Dusun Pattiro, Desa Labuaja, Cenrana, Maros lingkup Resort Camba SPTN Wilayah II Camba Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Sulawesi Selatan. Peserta sebanyak 20 orang berasal dari 4 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mewakili kelompoknya yaitu Kelompok Tani Bulu Tenete, Kelompok Tani Pattiro Bulu, Kelompok Tani Bukit Harapan, dan Kelompok Tani Tunas Muda. Fasilitator dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung serta dibantu oleh TLKM UNHAS Makassar, BDK Makassar, KPH Rongkong Luwu Utara, dan UMK Sahabat Lebah Luwu Utara.

Sekolah lapang dibagi menjadi 2 bagian pembelajaran yaitu :

- Materi terdiri dari metode sekolah lapang, budidaya lebah madu, penanganan pasca panen dan pembuatan produk lebah madu, penguatan kelembagaan kelompok, dan analisis usaha dan pemasaran. Pembelajaran inti (pokok) selama 5 kali pertemuan. Pembelajaran diterapkan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan budidaya lebah madu trigona kepada 20 orang peserta wakil dari 4 KTH yang nantinya disebut kader Sekolah Lapang. Pembelajaran yang diberikan meliputi pengetahuan dan keterampilan secara nyata dan lebih banyak kegiatan praktek yang dilakukan sendiri oleh peserta. Dilakukan pretest dan posttest kepada peserta yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta.

- Pendalaman materi secara mandiri yang dilakukan secara parsitipatif oleh kader sekolah lapang dan anggota KTH dan atau gabungan KTH yang berminat di masing-masing KTH (KTH Bulu Tanete, KTH Pattiro Bulu, KTH Bukit Harapan, dan KTH Tunas Muda) tentang praktek keterampilan secara nyata dan mendalam dari materi yang diterima.



Pre test pada awal Sekolah Lapang (dokumentasi TN Bantimurung Bulusaraung)



Penyampaian materi oleh fasilitator (dokumentasi TN Bantimurung Bulusaraung)



Pendalaman materi pemindahan koloni (dokumentasi TN Bantimurung Bulusaraung)



**Pendalaman materi pembuatan stup lebah madu
(dokumentasi TN Bantimurung Bulusaraung)**

Sekolah Lapang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Sekolah Lapang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan selama 6 bulan dari Desember 2017 sampai dengan Mei 2018. Peserta berasal dari KTH yang telah difasilitasi Unit Percontohan oleh Pusat Penyuluhan tahun 2016 yaitu KTH Mencolok II Jambi, KTH Usaha Parit Latong Kalimantan Barat, dan KTH Jaya Lestari Kalimantan Tengah. Narasumber dari Daops, Manggala Agni, Dinas Kehutanan Provinsi, KPH. Adapun materi sekolah lapang tentang pembukaan lahan tanpa bakar, deteksi dini kebakaran hutan dan lahan, Budidaya/penanaman, pembuatan kompos, pembuatan cuka kayu, dan keterampilan pengembangan usaha produktif.

Metode sekolah lapang dibag menjadi 2 bagian yaitu:

- Pertemuan besar yaitu penyampaian teori dan praktek dari narasumber, dan
- Pendalaman materi secara mandiri dengan membagi anggota KTH dalam beberapa sub kelompok.

Hasil sekolah lapang yang paling penting yaitu perubahan perilaku anggota KTH. anggota KTH menjadi percaya diri berbicara di forum, mampu menyampaikan pendapat, keterlibatan wanita dan kaum muda meningkat, adanya kerjasama tim dan pembagian tugas yang jelas, serta tidak bergantung pada ketua KTH akibat



**Pendalaman materi pemindahan koloni
(dokumentasi TN Bantimurung Bulusaraung)**



**Studi banding di UMK Sahabat
Lebah Luwu Utara
(dokumentasi TN Bantimurung Bulusaraung)**



**Pembuatan pupuk kompos
(dokumentasi KTH Usaha Parit Latong,
Kalimantan Barat)**

pembagian sub kelompok. Masyarakat mampu mengidentifikasi potensi wilayahnya dan belajar untuk mengembangkan lahan yang mereka miliki. Perubahan perilaku masyarakat tersebut merupakan tujuan dan harapan dari ilmu penyuluhan melalui metode sekolah lapang ini. Selain itu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah dirintisnya usaha produktif diantaranya lebah madu, kompos, cuka kayu, bibit sambung pucuk, dan makanan olahan ubi kayu.

Secara keseluruhan, hasil metode sekolah lapang ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan dukungan berbagai pihak. Sekolah lapang menimbulkan kesadaran baru pada masyarakat bahwa menuntut ilmu tidak hanya didapat dengan belajar teori di dalam ruangan. Semakin banyak praktek di lapangan, masyarakat akan lebih mudah ingat dan paham terhadap apa yang diajarkan. Meningkatnya pengetahuan, kepedulian, dan keterampilan masyarakat serta mampu menyebarluaskan dan mempraktekan hasil belajar sekolah lapang dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang lebih penting.



Cuka kayu hasil pengembangan usaha (dokumentasi KTH Usaha Parit Latong, Kalimantan Barat)



Simulasi pemadaman dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Dokumentasi KTH Mencolok II Jambi)



Pembuatan cuka kayu (Dokumentasi KTH Mencolok II Jambi)



Pembuatan sekam bakar (dokumentasi KTH Jaya Lestari, Kalimantan Tengah)



Pembuatan rorak (dokumentasi KTH Jaya Lestari, Kalimantan Tengah)



PELUANG INVESTASI BUDIDAYA JAMUR TIRAM

Oleh : R. Didin Sudiardini

*Widyaiswara Balai Diklat LHK Kadipaten



Budidaya jamur tiram sangat cocok untuk daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Usaha budidaya jamur tiram sering mengalami kegagalan karena teknik dan cara budidaya yang kurang benar. Meskipun gampang, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti lingkungan, kebersihan, serta konsistensi selama perawatan. Jika faktor-faktor tersebut tidak bisa dipenuhi dengan baik maka hasilnya kurang optimal bahkan besar kemungkinan berpotensi mendatangkan kegagalan. Investasi yang dibutuhkan untuk memulai usaha budidaya jamur tiram cukup murah dan bisa dilakukan bertahap.

Terdapat tiga tahapan dalam budidaya jamur tiram., yaitu (1) membuat media tanam dan menginokulasikan bibit jamur ke dalam media tanam tersebut sehingga media ditumbuhi miselium berwarna putih seperti kapas; (2) menumbuhkan miselium tersebut menjadi badan buah. Media tanam/tumbuh dapat menggunakan serbuk kayu (serbuk gergaji). Kelebihan penggunaan serbuk kayu ini antara lain mudah diperoleh dalam bentuk limbah sehingga harganya relatif murah, serta mudah dicampur dengan bahan - bahan lain seperti bekatul, kapur, gift, pupuk, air sebagai

pelengkap nutrisi, agar mudah dibentuk dan dikondisikan. sehingga pertumbuhan jamur lebih cepat — menghasilkan keuntungan dan juga memberikan tiram peluang untuk berinvestasi dalam usaha budidaya jamur tiram; (3) Pemasaran jamur. Pemasaran menjadi penting ketika jamur sudah dilakukan pemanenan. Pebisnis jamur sebaiknya harus sudah memahami dan mengerti pasar jamur , sehingga tidak mengalami kebingungan ketika jamur sudah dipanen.

Dalam hal pemasaran hasil panen jenis usaha secara umum, ada beberapa yang harus diperhatikan dan disiapkan salah satunya adalah penghitungan Benefit Cost Ratio (BCR). Penghitungan ini dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan kerugian dari kalkulasi modal dan hasil usaha tersebut. Melalui perhitungan hasil usaha tersebut, maka peluang usaha jamur tiram banyak dilirik oleh masyarakat yang ingin membuka usaha tersebut. Bisnis budidaya jamur tiram ini di samping mudah dilakukan, juga mudah di pasarkan, karena jamur tiram ini banyak dinikmati orang karena rasanya yang enak. Kelayakan bisnis budidaya jamur tiram ini layak di perhitungkan dalam hal analisa investasi, biaya operasional, pendapatan atau

penerimaan, dan penghitungan keuntungan dalam setiap periode budidaya jamur tiram.

Usaha budidaya jamur tiram telah dikembangkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Jaya di Desa Sindanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Pengembangan usaha budidaya jamur tersebut telah memenuhi tiga persyaratan tersebut di atas. Jumlah rumah /kumbung yang dikelola sebanyak 12 Unit, kapasitas baglog sebanyak 12.000, produksi jamur tiram segar per hari sebanyak 180 kg jamur tiram.

Teknik dan Cara Budidaya Jamur Tiram Putih

Dalam budidaya jamur tiram putih hal pertama yang diperhatikan adalah persiapan matang dalam melakukan penanaman. Persiapan matang dapat membuat pertumbuhan jamur tiram lebih baik sehingga miselium yang dihasilkan lebih banyak, juga membantu menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan jamur tiram dalam menunjang keberhasilan budidaya. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum penanaman diantaranya membuat media tanam rumah kumbung baglog, rak baglog, serta menyediakan peralatan budidaya. Bahan yang dibutuhkan sebagai media dalam budidaya jamur tiram adalah serbuk gergaji kayu sengon yang dicampur dengan media lain yakni; kapur, bekatul, gif, pupuk, sedangkan sarana dan peralatan pendukung dalam budidaya adalah rumah kumbung baglog, rak baglog.

Usaha budidaya jamur tiram seringkali mengalami kegagalan karena teknik dan cara budidaya yang kurang benar. Teknik budidaya jamur tiram mulai dari persiapan hingga pasca panen sangat perlu diperhatikan agar pelaku usaha budidaya benar-benar memahami sehingga lebih menguasai dalam budidaya jamur tiram. Teknik dan cara budidaya jamur tiram sebagai berikut:

A. Pengomposan

Pengomposan serbuk gaji dilakukan sebelum digunakan sebagai media, agar dapat terurai



menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga tersedia serta mudah diserap oleh jamur tiram. Proses pengomposan serbuk gergaji kayu dapat dilakukan dengan cara menutup serbuk gergaji kayu menggunakan plastik atau terpal selama kurang lebih 1 sampai 2 hari. Jika terjadi kenaikan suhu sekitar 50°C berarti pengomposan telah berlangsung baik.



B. Cara Membuat Media Tanam

Komposisi takaran bahan yang digunakan untuk membuat media tanam jamur tiram, yaitu serbuk kayu gergaji 100 kg, Bekatul atau dedak halus 10-15 kg, Kalsium karbonat/ kapur (CaCO_3) 0,5 kg, Gips (CaSO_4) 0,5 kg, Pupuk TSP 0,5 kg, Bibit 25 kantong, Air 50-60% .

Kapur merupakan bahan baku sebagai sumber kalsium (Ca) dan berguna untuk mengatur tingkat kemasaman (pH) media. Kapur yang digunakan yaitu kapur pertanian (CaCO_3). Kandungan kalsium

dan karbonnya sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan jamur dan sebagai penyumbang nutrisi pada saat jamur dikonsumsi.

Pada media jamur penggunaan bekatul dimaksudkan sebagai sumber karbohidrat, karbon (C) dan nitrogen (N). Selain itu vitamin B1 dan B2 juga terkandung didalamnya. Bekatul yang digunakan dapat berasal dari berbagai jenis padi dan yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan harus yang masih baru dan belum bau / tengik.

Gips atau CaSO_4 digunakan sebagai sumber kalsium (Ca) dan berguna untuk memperkokoh media baglog. Dalam keadaan kokoh media tidak akan cepat rusak. Pupuk yang biasa diberikan yaitu urea dan SP-36. Pemberian pupuk dimaksudkan sebagai nutrisi pertumbuhan jamur dan dapat mempercepat pemanenan.



Selain itu ukuran rata-rata jamur yang dihasilkan lebih besar. Penanaman bibit dilakukan dengan cara sterilisasi bahan dan sterilisasi baglog. Sebelum dicampur dengan bahan media lain, serbuk kayu dan dedak/ bekatul harus disterilisasi terlebih dahulu dengan cara di oven selama 6-8 jam pada suhu 100°C . Hal ini bertujuan untuk mengurangi mikroorganisme penyebab kontaminasi dan juga untuk mengurangi kadar air pada serbuk gergaji. Kemudian kedua bahan tersebut dicampur dan diberi air sekitar 50-60% hingga adonan menjadi kalis dan bisa dikepal. Air yang digunakan harus air yang benar-benar bersih agar terhindar dari resiko terkontaminasi organisme lain dalam media.

C. Proses Pembungkusan

Tahap Pembungkusan dengan menggunakan plastik polipropilen (PP) sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, cara pembungkusannya yaitu;

- Masukan media ke dalam plastik kemudian dipukul / ditumbuk sampai padat dengan botol atau menggunakan filler (alat pemadat)
- Bahan - bahan media tanam yang telah dikomposkan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kantong plastik pada kedua ujung pangkalnya dilipat kedalam, sehingga setelah diisi dan dipadatkan kantong plastik dapat berdiri seperti botol.
- Kantong plastik diisi kurang lebih 3/4 bagian, kemudian yang 1/4 bagiannya dilipat kedalam.
- Letakan kantong plastik yang telah diisi (polybag) dengan posisi terbalik yaitu bagian yang dilipat kedalam ditempatkan di bawah.





Memasukkan adonan media kedalam plastik dan ditekan sampai benar-benar padat, kemudian bagian atas kantong dipasang cincin paralon dan selanjutnya kantong plastik ditutup dengan menyumbat kapas dan diikat dengan karet. Untuk sterilisasi baglog dilakukan dengan cara mengukusnya dalam drum.

Satu drum dapat menampung 60 baglog. Proses ini memanfaatkan panas uap air pada suhu 95-110°C selama 8-10jam. Ketika suhu pengukusan mencapai 100°C, pertahankan selama 5jam. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 100°C adalah 3jam, tergantung dari kestabilan tungku. Wadah pengukus dibuka dan didiamkan selama 5jam agar suhu media tanam dalam baglog kembali normal.

D. Peralatan

Peralatan dan perlengkapan yang perlu disiapkan adalah Kantong plastik tahan panas (ukuran 03 atau 04, 15 x 25 cm atau 17 x 30 cm), Karet pengikat, Potongan kertas Koran, Potongan pipa pralon (diameter 1" dan lebar 1 cm), Alat pengaduk bibit (Spatula, semacam sekop atau cangkul), Alat sterilisasi : drum perebus dengan tutup dan sarangan, sumber panas (kompor minyak/ briket batu bara). Kumbung dan rak-rak untuk menyimpan baglog dari kotoran.

Kumbung atau rumah jamur adalah tempat untuk merawat baglog dan menumbuhkan jamur. Kumbung biasanya

berupa sebuah bangunan, yang diisi rak-rak untuk meletakkan baglog. Kumbung tersebut harus memiliki kemampuan untuk menjaga suhu dan kelembaban. Kumbung biasanya dibuat dari bambu atau kayu. Dinding kumbung bisa dibuat dari gedek atau papan. Atapnya dari genteng atau sirap. Jangan menggunakan atap asbes atau seng, karena atap tersebut akan mendatangkan panas. Sedangkan bagian lantainya sebaiknya tidak diplester agar air yang digunakan untuk menyiram jamur bisa meresap.



Di dalam kumbung dilengkapi dengan rak berupa kisi-kisi yang dibuat bertingkat. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun baglog. Rangka rak bisa dibuat dari bambu atau kayu. Rak diletakkan berjajar. Antara rak satu dengan yang lain dipisahkan oleh lorong untuk perawatan. Ukuran ketinggian ruang antar rak sebaiknya tidak kurang dari 40 cm, rak bisa dibuat 2-3 tingkat. Lebar rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak sebesar ini bisa memuat 70-80 baglog. Keperluan rak disesuaikan dengan jumlah baglog yang akan dibudidayakan.



Strategi Pemasaran Jamur Tiram

Permintaan pasar jamur tiram kian meningkat, permintaan yang tinggi tersebut membuat usaha budidaya jamur tiram ini memiliki prospek yang bagus. Untuk membuat usaha dan bisnis berkembang, pemasaran merupakan hal yang perlu diperhatikan, sebab pemasaran tersebut menjadi kunci utama dalam kesuksesan sebuah usaha, tak terkecuali dengan usaha jamur tiram. Sebagus apapun kualitas hasil panen yang didapatkan jika tidak didukung dengan pemasaran yang tepat maka hal ini menyebabkan konsumen tidak mengetahui produk yang dihasilkan.

Dalam semua jenis usaha yang akan kita jalankan tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan salah satunya adalah dengan penghitungan Benefit Cost Ratio (BCR perhitungan untuk mencari keuntungan dan kerugian dari kalkulasi modal dan hasil usaha tersebut) maka peluang investasi usaha jamur tiram banyak dilirik oleh masyarakat yang ingin membuka usaha tersebut. Bisnis budidaya jamur tiram ini di samping mudah dilakukan peluang bisnis ini juga mudah di pasarkan, karena jamur tiram ini banyak dinikmati orang karena rasanya yang enak.

Untuk memperoleh peluang investasi dalam budidaya jamur tiram berhasil, maka diperlukan Analisa usaha budidaya jamur tiram untuk skala usaha rumah tangga dengan kapasitas kurang lebih 6.000 baglog. Untuk jangka waktu 4 tahun, setiap periode budidaya jamur tiram membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Sebagai contoh dan bahan pertimbangan yang akan membuka usaha budidaya jamur tiram, akan diuraikan dari modal investasi, biaya operasional dan pendapatan yang di peroleh ;

Biaya modal investasi.

Biaya pembuatan kumbung jamur berkapasitas 6.000 buah baglog
: Rp. 7.500.000

Biaya untuk sewa lahan selama 5 tahun
: Rp. 8.000.000

Barometer : Rp. 200.000

Tangki air sprayer : Rp 450.000

Termometer : Rp. 150.000,

Total biaya investasi : Rp. 18.300.000

Biaya operasionalnya

baglog 6.000 buah x Rp 2.000
:Rp.12.000.000

Plastik Kemasan : RP. 60.000

Biaya transportasi : Rp. 500.000

Tenaga kerja : Rp. 1.000.000,

Biaya Pemasaran : Rp. 50.000

Total biaya operasional : Rp. 13.610.000

Estimilasi pendapatan

Jika setiap harga jamur tiram segar kisaran harga Rp. 7.000/kg, dengan jumlah produksi yang di hasilkan sebanyak 3.500kg.

Pendapatan :

Produksi yang dihasilkan (kg) x harga (Rp./kg)
3.500kg x Rp. 7.000/kg = Rp. 24.500.000

Laba kotor selama 1 periode :

biaya operasional - pendapatan
Rp. 24.500.000 - Rp. 13.600.000 =
Rp. 10.900.000.

Bunga bank selama 6 bulan : Bunga bank x
(biaya operasional + biaya investasi).
6% X (Rp. 13.600.000 + Rp. 18.300.000)
6% X Rp. 31.900.000 = Rp. 2.001.500

Laba bersih :

Laba kotor selama 1 periode - Bunga bank
selama 6 bulan.
Rp. 10.900.000 - Rp. 2.001.500 =
Rp. 8.898.500.

Melihat rincian analisa usaha jamur tiram diatas, maka peluang investasi usaha jamur tiram merupakan prospek bisnis yang menguntungkan. Keuntungan akan menjadi lebih besar di peroleh apabila bertambah pengetahuan dan pengalaman sehingga hasil panen lebih maksimal.



PENDAMPINGAN BERTEMAN

Kunci Sukses Perhutanan Sosial...

Oleh : *Yumi dan **Syarif Hidayat,
*Penyuluh pada Pusat Penyuluhan
**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Syarif Hidayat, S.Hut (Penyuluh Kehutanan PNS) dan Agus Salim (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat-PKSM) adalah “aktor” di balik keberhasilan pendampingan BERTEMAN yang telah meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Nateh melalui usaha wisata alam arung jeram. Wisata arung jeram adalah salah satu usaha yang dikembangkan LPHD Nateh, khususnya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Ekowisata.

Sejak dicanangkan pada tahun 2016, akselerasi Perhutanan Sosial (PS) terus diupayakan untuk pencapaian target 12,7 juta hektar pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, dalam hal ini Pusat Penyuluhan turut mengambil bagian dalam hal penyiapan SDM, baik untuk Penyuluh Kehutanan/tenaga pendamping maupun Kelompok Tani Hutan/kelompok masyarakat Pemegang Ijin PS. Dalam rangka akselerasi PS, konsep pendampingan BERTEMAN muncul. Pendampingan BERTEMAN bukan saja dalam proses pengajuan ijin, tetapi lebih utama pada pasca perolehan ijin PS untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran masyarakat desa di sekitar hutan.

INTI PERHUTANAN SOSIAL ADALAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, dalam butir “Menimbang” tercantum tujuan utama Perhutanan Sosial (PS) adalah mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan hutan melalui pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat. Pendampingan PS seharusnya tidak hanya terfokus pada pencapaian target ijin kelola saja tetapi mencapai hakekat tujuan yang sesungguhnya sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut di atas.

Tiga unsur inti dalam Perhutanan Sosial adalah land (hutan), opportunity (Akses kelola) dan human resources (SDM). Untuk keberhasilan PS harus memperhatikan keseimbangan

ketiga unsur tersebut. Pusat Penyuluhan sebagai supporting system dalam organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memiliki tugas serta fungsi khususnya dalam pengembangan SDM LHK. Berkaitan dengan SDM untuk mendukung PS, Pusat Penyuluhan memiliki peranan dalam meningkat-peningkatan kompetensi Penyuluh merupakan hal utama yang menjadi perhatian BP2SDM.

Pendampingan PS di tingkat tapak tidak hanya dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan, tetapi juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi. Bahkan di beberapa daerah kan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan dan KTH/Masyarakat pemegang ijin. Untuk dapat melakukan pendampingan KTH/masyarakat pemegang ijin PS yang berhasil guna, peningkatan kompetensi penyuluh pendamping PS merupakan hal utama yang menjadi perhatian BP2SDM.

Dalam rangka akselerasi PS dan pendampingan di tingkat tapak yang berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pendampingan yang sinergis antar pendamping, baik dalam proses perijinan maupun pasca perolehan ijin PS. Berkaitan dengan hal tersebut Pusat Penyuluhan memunculkan konsep PENDAMPINGAN BERTEMAN.

PENDAMPINGAN BERTEMAN

BERTEMAN merupakan singkatan dari BER-bagi Peran, TE-rapkan Kebersamaan dan MAN-diri hasilnya". Dengan bersinergi bersama pendamping lainnya, adanya pembagian peran antar pendamping, dan dengan semangat kebersamaan dalam mendampingi masyarakat, diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan PS yaitu masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Berbagi Peran. Pendampingan masyarakat atau Kelompok Tani Hutan di tingkat tapak, termasuk dalam Perhutanan Sosial melibatkan berbagai unsur masyarakat, umumnya LSM dan Perguruan Tinggi baik yang berada di wilayah tersebut maupun dari daerah/provinsi lain. Hal ini seringkali menimbulkan kecurigaan dan gesekan antar pendamping,



Dua generasi masyarakat Desa Nateh menikmati ikan hasil pancingan di Sungai Batang Alai. Selain dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari, sungai dikembangkan menjadi obyek wisata arung jeram yang telah menambah pendapatan masyarakat desa.

yang pada akhirnya kontra produktif bagi pendampingan itu sendiri.

Selain menghindari adanya konflik, pembagian peran antar pendamping juga bertujuan untuk saling melengkapi. Pendampingan oleh LSM umumnya memiliki keunggulan dalam hal penguatan kelembagaan, sedangkan pendampingan oleh Penyuluh Kehutanan PNS atau Perguruan Tinggi umumnya memiliki keunggulan dalam hal teknis kehutanan, akses fasilitas dari Pemerintah dan lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk saling berbagi peran untuk proses pendampingan secara sinergis dan terintegrasi, yang mencakup kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.

Terapkan Kebersamaan. Walaupun ada pembagian peran antar pendamping, tetapi pendampingan PS oleh pihak mana pun tujuan akhirnya adalah masyarakat yang didampingi berdaya, sejahtera. Kesamaan inilah yang dapat mempersatukan dan mempererat para pendamping dari berbagai institusi. Ketika para pendamping dapat mengarahkan pada kesamaan tujuan pendampingan masyarakat, perbedaan-perbedaan visi dan misi yang diemban organisasi masing-masing pendamping tidak akan mengacaukan pelaksanaan pendampingan di tingkat tapak. Walaupun ada beberapa organisasi pendamping yang terpisah, tetapi bila bersama-sama melakukan

pendampingan di masyarakat menjadi sebuah organisasi yang menyatu. Tahapan kolaborasi pendampingan seperti ini disebut tahapan integratif, yaitu tingkatan kolaborasi yang paling tinggi dan ideal antar institusi (Suporahardjo, 2005).

Mandiri Hasilnya. Masyarakat desa atau kelompok tani hutan/pemegang ijin PS tidak selamanya didampingi. Proses pendampingan akan berakhir ketika masyarakat yang didampingi telah mencapai kemandirian. Ciri-ciri kemandirian antara lain: (1) masyarakat sudah menyadari bahwa pendampingan tidak diperlukan lagi karena masyarakat dengan sumberdaya dan kapasitas yang ada mampu mengembangkan usahanya; (2) kelompok masyarakat dampingan sudah mampu mengambil keputusan dan bertindak sebagai pendamping bagi anggotanya; dan (3) kelompok sudah mampu menjadi fasilitator bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota.

Oleh karena itu pendampingan perlu dilakukan dalam kerangka proses pembelajaran bersama ke arah kemandirian kelompok/masyarakat.



Ketika para pendamping PS di tingkat tapak dapat duduk bersama, memetakan peran secara bersama, serta terus mengarahkan pada tujuan akhir pendampingan yaitu kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, niscaya proses pendampingan yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat berjalan seiring sejalan.

Pembelajaran dari:

PENDAMPINGAN BERTEMAN di LPHD NATEH

(Batang Alai Timur, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan)

Pendampingan BERTEMAN di LPHD Nateh secara intensif dimulai sejak proses perijinan HPHD keluar, yaitu Juli 2016. Penyuluh Kehutanan dan PKSM bekerja sama dan berbagi peran dengan baik, sehingga menjadi penggerak LPHD Nateh.

Berbagi Peran

Penyuluh Kehutanan PNS berperan dalam hal:

- Mendampingi kelompok dalam mengembangkan kelola kelembagaan: administrasi, aturan kelompok dan lainnya
- Membantu LPHD dalam menyusun dan mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Desa dan Rencana Kerja Tahunan Hutan Desa.
- Menjembatani Lembaga Hutan Desa dalam menggali sumber daya dari pihak luar yang dapat memberikan bantuan atau investasi terhadap pengembangan usaha Hutan Desa.
- Membantu meningkatkan kepercayaan diri kelompok agar lebih optimis dalam membangun hutan desa untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- Memberikan fasilitasi kegiatan pelatihan pengembangan SDM bersama dengan lembaga pemerintah atau lembaga terkait diluar LPHD (misalnya: Aksioma untuk perencanaan Wisata Alam dan Federasi Arung Jeram Indonesia-FAJI untuk pelatihan operator/instruktur arung jeram).
- Membantu dalam menyelesaikan konflik yang bersifat eksternal seperti memberikan pemahaman untuk tetap menjaga hutan dari pihak luar yang akan merusak atau mengambil alih izin pengelolaan kawasan hutan.



Syarif Hidayat, S.Hut.

Penyuluh Kehutanan jenjang jabatan Pertama (IIIa), yang belum 5 tahun menjadi Penyuluh PNS ini sudah menunjukkan kegigihan dan ketekunannya dalam pendampingan masyarakat di Desa Nateh. Bersama PKSM melakukan pendampingan BERTEMAN dan mengembangkan usaha wisata arung jeram yang telah meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran di Desa Nateh.



Agus Salim

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di Desa Nateh, diawali dengan menjadi Ketua Karang Taruna. Kecintaannya pada alam dan kelestariannya ditularkan pada pemuda di desanya sehingga dengan bersemangat memajukan wisata arung jeram. Bersama 30 orang temannya, ia telah memperoleh sertifikat dari Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) menjadi instruktur/pemandu arung jeram.

Sedangkan PKSM berperan dalam hal:

- Mendampingi dan mendorong dari dalam kelompok untuk membangun minat dan kepercayaan diri anggota kelompok.
- Membantu dalam melakukan pendekatan untuk menyelesaikan konflik yang bersifat internal kelompok karena dapat dengan mudah melakukan pendekatan secara psikologis kepada anggota kelompok.
- Membagikan keterampilan yang bersifat teknis kepada anggota kelompok, sharing knowledge dari PKSM yang sudah diberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota.
- PKSM lebih jeli dalam melihat potensi yang ada di desa untuk dapat dikembangkan.

Permasalahan dalam pendampingan berteman

- Perbedaan pandangan dan pemahaman tentang pengelolaan kawasan hutan.

- Perbedaan pendekatan dalam menghadapi oknum masyarakat yang melakukan paraktek merusak hutan.
- Belum sepenuhnya memiliki keterbukaan menyangkut permasalahan internal yang terjadi dalam kelompok.

Tantangan

- Diawal-awal masyarakat desa masih pesimis terhadap manfaat hutan desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sulit untuk membangun keyakinan masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola hutan .
- Membangun kepercayaan masyarakat desa terhadap pihak luar termasuk penyuluh sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat tapak.
- Masih terdapat kesalah pahaman/kekuatiran sebagian masyarakat bahwa lahan mereka akan diambil alih oleh pemerintah.

- Kurangnya pemahaman tentang kawasan, potensi sumber daya alam yang besar di Desa Nateh belum dapat dilihat dan dimanfaatkan dengan baik.
- Menyamakan pemahaman dan sinergi antara penyuluh tentang pengelolaan kawasan secara lestari.

Kiat Keberhasilan

- Lebih memfokuskan pandangan untuk terus menggali dan jeli potensi yang besar khususnya potensi sumber daya alam Desa Nateh,
- Jangan terfokus pada masalah atau kendala yang dihadapi dalam mengembangkan hutan desa karena jika terlalu fokus pada masalah yang timbul di setiap tahapan maka kita akan terhenti akibat masalah, sebaliknya dengan menggali dan mengembangkan potensi yang ada maka akan membantu menyelesaikan masalah, seperti dengan mengembangkan wisata di tempat yang sebelumnya menjadi tempat menambang pasir dan batu menjadi tempat wisata sehingga mengurangi kegiatan masyarakat yang merusak sungai;
- Jangan takut untuk bermimpi menjadikan hutan Desa Nateh menjadi Desa Wisata.

Dibutuhkan kesabaran dan waktu yang panjang untuk dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk membangun hutan dengan lestari.

Terapkan Kebersamaan

Pengelolaan KUPS Ekowisata LPHD Nateh ini dilambangkan ibarat pembuatan gula aren, bila tidak dicampur dengan air nira yang “tua” gula aren tidak akan jadi.

Demikian ungkapan Pak Warnudin yang walaupun sudah 70 tahun masih bersemangat berpartisipasi sebagai juru parkir di Wisata Arung Jeram Nateh.

Wisata Arung Jeram telah menghidupkan semangat pemuda desa, laki-laki, perempuan, bahkan kaum lanjut usia. Semua berpartisipasi bahu membahu untuk sukses dan majunya KUPS Ekowisata.

Dengan bersemangat dan lantang mereka serukan yel-yel:

“Pendampingan Maju, Perhutanan Sosial Sukses,
Masyarakat Sejahtera..!!”

Salam Lima Jari Perhutanan Sosial - LPHD Nateh



Bagian Penyewaan perahu dan parkir kendaraan



Instruktur Arung Jeram dan Transportasi



Pengunjung diangkut menuju lokasi Arung jeram

Mandiri Hasilnya

Memang saat ini KUPS Ekowisata LPHD Nateh belum mencapai kemandirian, tetapi untuk usaha yang baru berjalan 3 bulan ini sudah menunjukkan hasil yang sangat baik, dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Masih banyak obyek wisata lainnya selain arung jeram, seperti wisata gua, puncak bukit dan lainnya yang potensial sehingga Desa Nateh sangat prospektif untuk dijadikan Desa Wisata.

- Pendapatan (kotor) KUPS Ekowisata sudah mencapai 10-15 juta di hari Sabtu dan Minggu, sehingga dalam satu bulan dapat mencapai 60 juta .
- Pengunjung di hari sabtu/minggu dapat mencapai 2000 orang.
- Penyewaan perahu sekaligus perlengkapan dan insruktur Rp. 150.000 per perahu (maksimal 6 orang).
- Pendapatan lain yang diperoleh dari biaya parkir Rp. 5,000 untuk motor, dan Rp. 10,000 untuk mobil.
- Saat ini pengunjung belum dikenakan biaya masuk lokasi karena berbagai alasan.

Masyarakat Desa Nateh mendapat tambahan pendapatan melalui usaha warung-warung di sekitar areal parkir, yang menyediakan kebutuhan para pengunjung yang sedang menunggu giliran arung jeram.

Arung Jeram Desa Nateh saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 100 orang, artinya terjadi peningkatan pendapatan, berkurangnya pengangguran di Desa Nateh. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk anak-anak sebagai generasi penerus.

Doa dan harapan SEMOGA LPHD NATEH SEMAKIN MAJU.





MANGROVE MUNJANG PENGEMBANGAN EKOWISATA DI BANGKA TENGAH

Oleh : Darman Suriah, S.Hut

*Penyuluh Kehutanan Madya, Dinas Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung

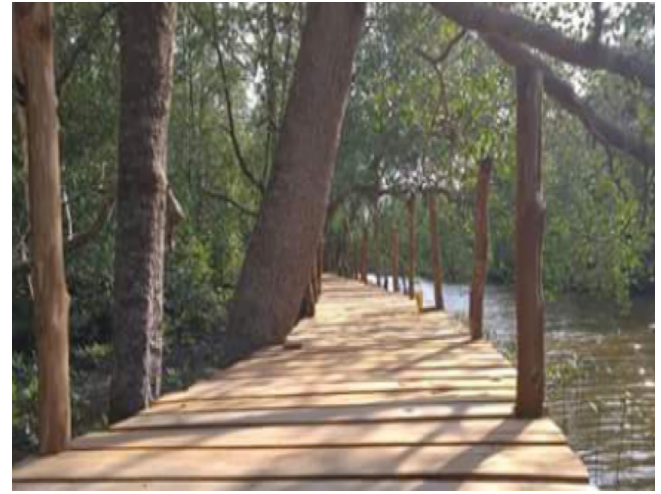
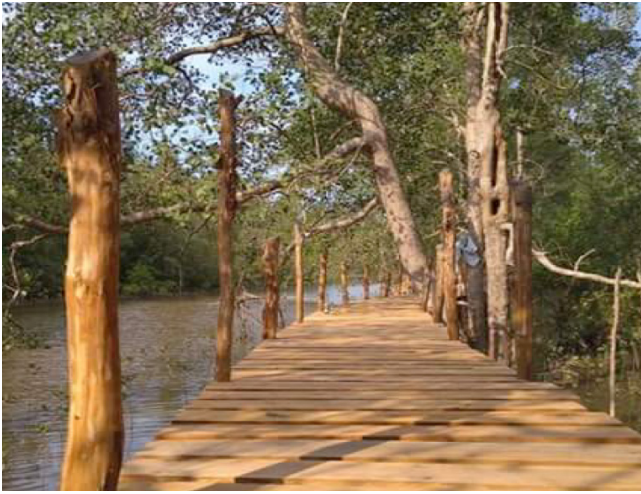
Program pembangunan kehutanan diarahkan sejalan dengan program prioritas pemerintah Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan Nawa Cita, dimana salah satu implementasi dari program prioritas tersebut dimasukkannya kegiatan perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Sebagai tindak lanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Skema Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan dimana sampai dengan tahun 2017 di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai 15.386 hektar terdiri dari : (1) jumlah Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebanyak 32 kelompok dengan anggota 1.710 orang dan luas ijin 9.964,52 Ha; (2) Hutan Desa (HD) sebanyak 3 kelompok dengan anggota 367 orang dan luas ijin 2.214,00 Ha dan (3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebanyak 81 kelompok dengan anggota 1.135 orang dan luas ijin 3.208,27 Ha. dan tahun 2018 ini direncanakan seluas 31.977,75 Hektar.

HUTAN KEMASYARAKATAN GEMPA 01

Salah satu Kelompok Tani Hutan (KTH) yang sangat berhasil dalam perhutanan sosial Di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah KTH Gempa 01. Sejarah perhutanan sosial di desa ini dimulai pada tahun 2004 karena adanya kerusakan bibir pantai akibat abrasi di Hutan Lindung Pantai Pelawan Sungai Kurau Register 24 dan adanya penebangan kayu ilegal. Menurut ketua KTH setiap tahun masyarakat sangat membutuhkan kayu untuk pembuatan bagan



Lokasi Kawasan Hutan Mangrove Munjung yang telah dibangun fasilitasnya.

tancap (bagan yang ditancapkan dilaut untuk mencari ikan sebagai sarana penangkapan ikan). Setiap bagan membutuhkan 35 – 40 batang kayu bulat, jika bagan ukuran agak besar bisa mencapai 50 batang, maka apabila masyarakat membangun bagan sebanyak 50 bagan tancap, jumlah kayu yang dibutuhkan sebanyak 2.500 batang kayu. Pemenuhan kayu untuk bagan tersebut diambil dari ekosistem mangrove / Hutan Lindung Pantai Pelawan yang dilakukan tanpa ijin.

Dampak dari pengambilan kayu di kawasan mangrove memicu rusaknya ekosistem mangrove dan semakin berkurang nyatangkapan masyarakat atau nelayan yang menangkap ikan maupun kepiting di lokasi Hutan Lindung Pantai Pelawan. Berbekal kepedulian terhadap masalah tersebut dan dengan dukungan para pemuda yang peduli dan cinta terhadap alam dan lingkungan, maka terbentuknya Kelompok Tani Hutan (Hkm) Gempa 01 Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Barat tentang Pembentukan Kelompok Tani Pecinta Alam.

Sejak saat itu, KTH Gempa 01 Desa Kurau mulai melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung pantai pelawan, yang dimulai dengan melakukan rehabilitasi kawasan hutan mangrove melalui Kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) pada tahun 2005

dan 2006, dan berkembang sampai saat ini. Upaya yang telah dilakukan KTH Gempa 01 terhadap kawasan hutan mangrove yang Allah limpahkan kepada desa ini membuahkan hasil yang tak terduga sebelumnya.

Pada tahun 2010 kelompok ini mendapat juara pertama Wanalestari katagori KTH, pada tahun 2015 mulailah dirintis adanya pengembangan hutan kemasyarakatan melalui Izin Penetapan Areal Kerja, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.358/MenLHK-Setjen/2015 dengan titik Koordinat Geografis : X : 0636176, Y : 974337. Pada tahun 2016 mendapat legalitas Izin Usaha Pemanfaatan - Hutan Kemasyarakatan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 188.44/209/DISHUT/2016 dengan Hak Kelola Kawasan di KTH Gempa 01 seluas 213 Ha.



KEGIATAN KTH GEMPA 01

Beberapa kegiatan KTH Gempa 01 dengan dukungan para pihak seperti masyarakat desa, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai dikembangkan seperti pengembangan ekowisata mangrove seluas 243 Ha., silvofishery seluas 1 hektar, pembibitan mangrove yang bekerjasama dengan BPDAS Cerucuk dan kolam ikan, kepiting dan udang, sebanyak 5 unit.

Berbagai kegiatan untuk edukasi serta pelestarian telah dilakukan, diantaranya Penanaman Mangrove dengan SD 1 Koba, identifikasi Mangrove oleh mahasiswa Universitas Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Institut Pertanian Stiper Jogjakarta, observasi mangrove Pecinta Alam Belitung, pelepasan satwa (elang Bandol) oleh Animal Lovers of Bangka Island dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa kunjungan ke kawasan hutan mangrove munjang seperti pengenalan mangrove dari SMA 1 Payung Kabupaten Bangka Selatan, studi banding dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Observasi Pertukaran pelajar Mancanegara sebanyak 10 orang, observasi AIESEC-Little World, kunjungan keluarga gathering goes to bangka island dari telkominfra Sumatera Bagian Selatan.

Saat ini KTH Gempa 01 sedang mengajukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk mengembangkan kawasan mangrove Munjang ini bukan hanya sebagai tempat rekreasi dan penelitian serta sumber ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga tempat edukasi bagi para pelajar (SD, SMP dan SMA/SMK), mahasiswa serta masyarakat dalam pelestarian hutan yang cinta lingkungan.

PRESTASI KTH GEMPA 01

Perjuangan KTH Gempa 01 dalam membangun kelompok dan melaksanakan



Kunjungan wisatawan Bangkok ke hutan mangrove Munjang

kegiatan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan mendapatkan telah mendapatkan apresiasi yaitu ;

- **Juara 1** Wanalestari katagori Kelompok tani hutan di Tingkat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010;
- **Juara 1** Wanalestari katagori Kelompok tani hutan di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka belitung tahun 2010;
- **Juara 1** Wanalestari katagori Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) tingkat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014-2015; (4) Juara 2 Wanalestari katagori Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014;
- **Juara 1** Wanalestari katagori Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka belitung tahun 2015;
- **Juara 1** Wanalestari katagori Hkm Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 dan Juara 1 Wanalestari katagori Hkm tingkat nasional tahun 2018 serta selaku ketua kelompok tani hutan Gempa 01 Bapak Yasir, Amd merupakan salah satu nominator kalpataru katagori perintis lingkungan.

PENGEMBANGAN KTH GEMPA 01

Keindahan kawasan mangrove Munjang yang sangat menawan dan menarik ada yang menyebut “kawasan mangrove cinta”, hal tersebut disampaikan bersamaan dengan dilantiknya Bupati Bangka Tengah, Dr. Ir. Ibnu Saleh, MM oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Dr. Erzaldi Rosman, SE, MM pada tanggal 27 Juli 2017.

Kawasan mangrove Munjang yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan - Hutan Kemasyarakatan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 188.44/209/DISHUT/2016 dengan Hak Kelola Kawasan di KTH Gempa 01 seluas 213 Ha diresmikan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Erzaldi Rosman, SE, MM yang ditandai dengan penanaman mangrove dan penandatanganan prasasti. Keberadaan kawasan mangrove Munjang ikut mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat di Desa Kurau, baik yang terlibat langsung pengelola kawasan maupun yang tak langsung.

Sebagai ilustrasi jenis usaha ekowisata berupa kunjungan, penyewaan perahu yang mengelilingi kawasan dapat menghasilkan 30 juta perbulan dengan kunjungan rata-rata 1.000 orang perbulan, usaha kepiting bakau, udang, ikan nila yang dikelola oleh kelompok tani hutan telah menghasilkan 18 juta perbulan serta membuka peluang usaha lain bagi masyarakat Desa Kurau dengan membuka kios yang menjual makan dan minum bagi pengunjung.

Aksesibilitas kawasan hutan mangrove Munjang

Kawasan hutan mangrove Munjang (Hutan Lindung Pantai Pelawan register 24) Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikelola Kelompok Tani Hutan (Hkm) Gempa 01 dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat ataupun roda dua dari kota Pangkalpinang (ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) sekita 30 menit dengan jarak 45 km. Lokasi ini berjarak dari pusat desa sejauh 1 Km, dan ibukota Kabupaten

Bangka Tengah (kota Koba)sejauh 30 Km. Untuk hal tersebut kami tunggu kedatangan para pencinta alam dan lingkungan di KTH Gempa 01 Desa Kurau Barat Kawasan Hutan Mangrove Munjang.



Kehidupan nelayan di kawasan hutan mangrove

“Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya”

- Siwi Tri Utami-



Menuai Pengetahuan Melalui Workshop Sekolah Lapangan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan

Oleh : Endang Dwi Hastuti
*Penyuluh Ahli, Pusat Penyuluhan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sering menjadi langganan di beberapa provinsi telah menimbulkan banyak kerugian. Disadari bahwa sebagian besar penyebab terjadinya karhutla antara lain adalah manusia, misalnya kebiasaan membuka lahan untuk berusahatani dengan cara membakar. Aktifitas masyarakat tersebut banyak dijumpai di beberapa provinsi di Indonesia, misalnya di Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Diperlukan metode penyuluhan untuk merubah perilaku masyarakat di ketiga lokasi tersebut agar memiliki kesadaran terhadap bahaya karhutla dan selanjutnya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pencegahannya.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM melalui Kemitraan bekerjasama dengan Pemerintah Norwegia tahun 2018 telah memfasilitasi Sekolah Lapangan Karhutla. Sebagai sasaran kegiatan adalah KTH Mencolok II, Provinsi Jambi; KTH Jaya Lestari, Provinsi Kalimantan Tengah serta KTH Usaha Parit Latong, Provinsi Kalimantan Barat. Metode Sekolah Lapangan menitikberatkan proses pembelajaran partisipatif dan mandiri, sehingga peserta belajar mengalami serta menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan dari apa yang diamati dan dilakukannya (learning by doing).

Secara fisik hasil Sekolah Lapangan Pencegahan Karhutla di tiga lokasi tersebut antara lain unit percontohan/dempot agroforestry dengan jenis tanaman lokal setempat, unit percontohan pembuatan asap cair/cuka kayu, dan unit percontohan usaha produktif lainnya. Sekolah Lapangan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, diharapkan bukan saja dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat sekitar hutan terhadap pentingnya menjaga hutan dan lingkungan dari kebakaran, tetapi masyarakat juga diharapkan terampil dalam menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sekitar tempat tinggalnya.

Banyak pembelajaran yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan Sekolah Lapang Karhutla ini sehingga perlu disebarluaskan kepada berbagai pihak .

Dalam rangka menyebarkan hasil pembelajaran Sekolah Lapang Karhutla telah diselenggarakan Workshop Panen Pengetahuan Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 6 September 2018, bertempat di IPB Convention Center, JL. Pajajaran Raya, Bogor.

Melalui workshop ini diharapkan pengalaman pelaksanaan Sekolah Lapang di 3 lokasi tersebut dapat menjadi percontohan bagi lokasi dan provinsi lain. Disamping itu, melalui workshop tersebut diharapkan dapat dirumuskan penyempurnaan metode Sekolah Lapang di bidang kehutanan serta menarik minat dan motivasi multipihak untuk mendukung pengembangan metode penyuluhan Sekolah Lapang dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di instansi masing-masing.

Workshop Panen Pengetahuan Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dihadiri oleh 73 orang peserta yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi, KPH, Sekretariat Direktorat Jenderal lingkup Kementerian LHK, Lembaga Donor, NGO/LSM, Penyuluh Kehutanan Pusat, UPT dan Dinas Kehutanan Provinsi , serta Widyaiswara.

Bertindak sebagai Pembicara/Narasumber workshop adalah :

- Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.
- Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.
- Kepala Pusat Penyuluhan.
- Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Ditjen PPI.
- Kepala Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango.

- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- Direktur Eksekutif Kemitraan.
- Direktur Eksekutif Yayasan FIELD Indonesia.
- KTH Mencilok II, Provinsi Jambi.
- KTH Jaya Lestari, Provinsi Kalimantan Tengah.
- KTH Usaha Parit Latong, Provinsi Kalimantan Barat.
- Penyuluh Kehutanan Pendamping Provinsi Jambi.
- Penyuluh Kehutanan Pendamping Provinsi Kalimantan Tengah.
- Penyuluh Kehutanan Pendamping Provinsi Kalimantan Barat.



Pembuatan Cuka Kayu



Pembuatan Kompos



Pembukaan lahan tanpa bakar

Pelaksanaan Workshop

Pelaksanaan Workshop dibagi dalam dua sesi yaitu : Diseminasi Hasil Pembelajaran Sekolah Lapang dan penyempurnaan Draft Petunjuk Teknis Sekolah Lapang.

Pada sesi pertama disampaikan pengalaman dan manfaat Sekolah Lapang bagi KTH yang disampaikan oleh KTH Usaha Parit Latong Kalimantan Barat ; KTH Jaya Lestari, Kalimantan Tengah; serta KTH Mencolok II Desa Mencolok, Jambi. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi tentang proses pendampingan Sekolah Lapang oleh masing-masing Penyuluh Pendamping, dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dari Kemitraan, pembahasan oleh para pembahas serta diskusi. Sesi kedua diisi dengan paparan Draft Petunjuk Teknis Sekolah Lapang dan penyampaian saran dan masukan dari pembahas dan peserta workshop.

Sarat Manfaat

Berdasarkan paparan dari KTH dan Penyuluh Kehutanan pendamping di tiga provinsi tersebut diperoleh informasi bahwa Metode Sekolah Lapang sangat bermanfaat bagi petani maupun penyuluh karena dengan metode SL Petani dapat belajar dan juga mengajarkan ilmu yang diperolehnya kepada oranglain. Selain itu SL lebih mudah diingat karena peserta langsung mempraktekkan ilmu yang diperolehnya. SL meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan KTH, meningkatkan kerjasama dan kekompakan sesama KTH serta memberi kesempatan kepada setiap peserta untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan.

Dengan melaksanakan kegiatan PLTB Petani tetap dapat berkebun tanpa membakarlahan. Petani juga memiliki demplot sebagai tempat percontohan untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat lainnya. SL berhasil merubah perilaku petani dengan proses yang lebih cepat dibandingkan metode lain. Sebelum adanya SL Karhutla, petani membuka lahan seluas 1 Ha dengan menebas dan membiarkannya kering kemudian dibakar. Setelah mengikuti SL petani sudah memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk membuka lahan tanpa bakar dan merasakan manfaatnya. Disamping itu, kesadaran petani untuk menjaga hutan dari bahaya kebakaran semakin tinggi.



Pemaparan Hasil SL oleh Penyuluh dan Ketua KTH

Hasil Workshop

Workshop Panen Pengetahuan Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan menghasilkan rumusan sebagai berikut:



Kompos KTH Mencolok II



Hasil KTH Parit Latong

- Sekolah Lapang atau sekolah tanpa dinding adalah metode penyuluhan yang menekankan proses pembelajaran secara partisipatif dan berdasarkan pengalaman, yang melibatkan peserta secara aktif untuk mencari, menemukan fakta sendiri, menganalisa dan mendiskusikan dengan sesama peserta untuk mengambil keputusan bersama terhadap permasalahan yang mereka hadapi dengan didampingi oleh penyuluh kehutanan (PK PNS, PKSM, PKS).
- Berdasarkan sharing pengalaman, pembahasan dan diskusi disimpulkan bahwa implementasi sekolah lapang dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Penyuluh Kehutanan sebagai Pendamping di 3 provinsi yakni KTH Usaha Parit Latong di Desa Jungkat,

Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah; di Kalimantan Tengah adalah KTH Jaya Lestari di Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas; serta KTH Mencolok II di Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi dinyatakan berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

- Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) memperoleh manfaat setelah mengikuti sekolah lapang diantaranya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengembangan kelembagaan kelompok tani hutan dan terbangunnya demplot pengembangan usaha produktif.
- Perlunya melebarkan cakupan topik sekolah lapang, menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Sekolah lapang diharapkan tidak berjalan sendiri namun terintegrasi dengan instansi lain terutama pemerintah daerah, tidak hanya Dinas Kehutanan namun Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dalam pengembangan Sekolah Lapang
- Keberlanjutan sekolah lapang perlu didukung upaya-upaya pemecahan masalah terkait permasalahan pembukaan lahan tanpa bakar dalam skala yang lebih luas serta permasalahan pemasaran hasil Sekolah Lapang (cuka kayu, hasil tanaman semusim). Perlu perbaikan pedoman sekolah lapang dengan menambahkan prakondisi sekolah lapang, kriteria KTH, monitoring dan evaluasi.



Alamat Redaksi :

Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM, Kementerian LHK

Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lt.8, Jl.
Gatot Subroto, Jakarta Pusat
10270

